



Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara

Editor: Lidya Christin Sinaga





Hubungan Indonesia-Cina
dalam Dinamika Politik,
Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi
di Asia Tenggara





Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).





Hubungan Indonesia-Cina
dalam Dinamika Politik,
Pertahanan-Keamanan, dan
Ekonomi di Asia Tenggara

Editor:

LIDYA CHRISTIN SINAGA



LIPI Press



© 2013 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Politik

Katalog dalam Terbitan

Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di
Asia Tenggara/Lidya Christin Sinaga (ed.). – Jakarta: LIPI Press, 2013.
xiv + 163 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-753-3

1. Diplomasi
3. Cina

2. Indonesia

327 2

Copy editor : Retno Asihanti S.
Proofreader : Fadly Suhendra
Penata Isi : Andri Setiawan dan Ariadni
Desainer sampul : Junaedi Mulawardana

Cetakan Pertama : November 2013



Diterbitkan Oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. (021) 314 0228, 314 6942. Faks. (021) 314 4591
E-mail: bmrliipi@centrin.net.id
lipipress@centrin.net.id
press@mail.lipi.go.id



PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan terbitan ilmiah yang berkualitas. Bunga rampai dengan judul *Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara* ini telah melewati mekanisme penjaminan mutu, termasuk proses penelaahan oleh Dewan Editor LIPI Press dan penyuntingan.

Bunga rampai ini mengulas tentang dinamika hubungan kerja sama antara Indonesia dan Cina, khususnya dalam bidang pertahanan keamanan, politik, dan ekonomi. Hubungan bilateral yang telah terjalin selama lebih dari enam dekade ini patut terus dievaluasi mengingat gejolak dan pasang surut hubungan sering kali terjadi. Apalagi, dewasa ini pengaruh Cina terbukti semakin menguat dalam konstelasi global dan regional yang jika dimanfaatkan dengan baik, kondisi ini tentu akan membawa pengaruh signifikan bagi Indonesia.

Harapan kami, bunga rampai ini dapat memberikan sumbangan ilmu dan wawasan bagi para pembaca serta dapat menggambarkan tentang peluang, tantangan, dan prospek hubungan Indonesia-Cina, khususnya melalui studi kasus sektor jasa dan tenaga kerja.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPI Press

| v |





KATA PENGANTAR

*B*uku *Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara* merupakan salah satu hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dalam skema penelitian Insentif Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2011. Sebelum menjadi naskah buku, tim penulis telah melakukan serangkaian kegiatan dimulai dari menyiapkan rancangan penelitian, mengumpulkan bahan literatur, mengumpulkan data, melakukan diskusi secara reguler dan wawancara dengan narasumber, hingga melakukan seminar terkait isu ini.

Namun, semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan buku ini tidak dapat berjalan tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga, terutama kepada para narasumber dari lembaga-lembaga pemerintah, universitas, dan non-pemerintah yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini. Penghargaan yang sama diberikan pula kepada para peneliti dan staf administrasi P2P LIPI yang turut menciptakan lingkungan akademis yang kondusif sehingga karya para peneliti bisa diterbitkan menjadi buku. Terakhir, tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada LIPI Press yang telah berkenan menerbitkan naskah ini menjadi buku.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini tidak lepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, siapapun yang mengambil



makna dari buku ini kiranya juga dapat memberikan masukan dan saran untuk menutup berbagai celah yang mungkin masih ada. Semoga penerbitan buku ini memberi manfaat bagi para pembaca. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2013

Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI





PRAKATA

*H*ubungan Indonesia-Cina telah berlangsung sejak lama dan mengalami pasang surut hubungan selama lebih dari enam dekade. Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan penting dan strategis bagi kepentingan nasional Indonesia, baik secara politik, pertahanan-keamanan, maupun ekonomi. Perkembangan politik apa pun yang terjadi di kawasan ini akan membawa dampak, baik langsung maupun tidak terhadap kepentingan nasional Indonesia. Menguatnya pengaruh Cina dalam konstelasi global dan regional tentu juga berdampak secara langsung bagi Indonesia. Selain itu, menguatnya peran Cina harus dipandang sebagai peluang yang perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan nasional Indonesia. Hal inilah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian dengan judul *Hubungan Indonesia-China dalam Dinamika Hubungan Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara* ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menyediakan dana untuk penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pusat Penelitian Politik LIPI dan seluruh narasumber di Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Tri Handayani dan Prayogo yang telah membantu selama proses penerbitan buku ini. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Lidya Christin Sinaga



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL & GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara: Perspektif Indonesia <i>Oleh: Lidya Christin Sinaga</i>	1
BAB II Dinamika Hubungan Ekonomi ASEAN-Cina <i>Oleh: Ratna Shofi Inayati</i>	27
BAB III Dinamika Hubungan Ekonomi Indonesia-Cina Pasca-Krisis Asia 1997 <i>Oleh: Adriana Elisabeth</i>	59
BAB IV Peluang dan Tantangan dalam Hubungan Indonesia-Cina: Sektor Jasa dan Tenaga Kerja <i>Oleh: Tri Nuke Pudjiastuti</i>	81
BAB V Hubungan Indonesia-Cina dari Perspektif Politik-Keamanan <i>Oleh: Nanto Sriyanto</i>	109
BAB VI Prospek Hubungan Indonesia-Cina <i>Oleh: Ganewati Wuryandari</i>	131
BIODATA PENULIS	161



DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel 1. Enam Dekade Dinamika Hubungan Indonesia-Cina	6
Tabel 2. Realisasi Investasi PMA Cina di Indonesia Menurut Lokasi 1 Januari 2005–31 Desember 2009	8
Tabel 3. Neraca Perdagangan ASEAN-Cina	46
Tabel 4. Perbandingan Dampak Terhadap Ekspor	54
Tabel 5. Perbandingan Dampak Terhadap Kesejahteraan	55
Tabel 6. Sepuluh Sektor yang Paling Dirugikan	56
Tabel 7. Jumlah Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Asal dan Jumlah	103
Tabel 8. Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Asal dan Lapangan Usaha (s.d. Mei 2010)	104
Gambar 1. Sistem Distribusi Barang Ekspor	51
Gambar 2: Strategi Menghadapi ACFTA.....	57

DAFTAR SINGKATAN

ACFTA	: ASEAN-China Free Trade Agreement
AEC	: ASEAN Economic Community
AFAS	: ASEAN Framework Agreement on Services
AFTA	: ASEAN Free Trade Area
AMM	: ASEAN Ministerial Meeting
APEC	: Asia Pacific Economic Cooperation
ARF	: ASEAN Regional Forum
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of South East Asian Nations
BIMP-EAGA	: Brunei Indonesia Malaysia Phillipines-East ASEAN Growth Area
BRIC	: Brasil Rusia India China
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CNOOC	: China National Offshore Oil Corporation
CNPC	: China National Petroleum Company
DCA	: Defence Cooperation Agreement
DoC	: Declaration of Conduct
EAS	: East Asia Summit
ECFA	: Economic Cooperation Framework Agreement
FDI	: Foreign Direct Investment
G-30S PKI	: Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia
GATS	: General Agreement on Trade in Services
GDP	: Gross Domestic Product
HAM	: Hak Asasi Manusia
IMS-GT	: Indonesia Malaysia Singapore-Growth Triangle
IMT-GT	: Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle
KAA	: Konferensi Asia Afrika
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi

KUR	: Kredit Usaha Rakyat
LNG	: Liquid Natural Gas
MDGs	: Millenium Development Goals
MoU	: Memorandum of Understanding
MRA	: Mutual Recognition Arrangement
NAFTA	: North America Free Trade Area
NEFOS	: New Emerging Forces
OLDEFOS	: Old Forces
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PLAN	: People Liberation Army Navy
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PM	: Perdana Menteri
PMA	: Penanaman Modal Asing
PoA	: Plan of Action
PPP	: Power Purchasing Parity
RI	: Republik Indonesia
RRC	: Republik Rakyat China
SBY	: Soesilo Bambang Yudhoyono
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIJORI	: Singapura Johor Riau
SKA	: Surat Keterangan Asal
SNI	: Standar Nasional Indonesia
Suramadu	: Surabaya Madura
TAC	: Treaty of Amity and Cooperation
TKA	: Tenaga Kerja Asing
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TNCs	: Trans National Corporations
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
WTO	: World Trade Organization



BAB I

Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara: Perspektif Indonesia

Lidya Christin Sinaga

A. PENGANTAR



Hubungan diplomatik Indonesia-Cina pada dasarnya sudah dibuka secara resmi sejak tanggal 9 Juni 1950. Namun, peristiwa G-30S PKI pada 30 September 1965 menjadi titik memburuknya hubungan kedua negara yang berujung pada pembekuan hubungan diplomatik pada tahun 1967. Setelah 23 tahun, baru pada tahun 1990 diadakan normalisasi hubungan di antara keduanya. Pascanormalisasi, hubungan di antara keduanya semakin meningkat, baik secara politik maupun ekonomi, dan memuncak dengan ditandatanganinya Deklarasi Kemitraan Strategis pada tahun 2005. Kemunculan Cina sebagai kekuatan ekonomi besar di dunia dewasa ini tentu juga berpengaruh terhadap hubungan Indonesia dengan Cina. Dengan menggunakan perspektif Indonesia, tulisan ini akan melihat enam dekade hubungan Indonesia-Cina, meskipun secara keseluruhan analisis lebih difokuskan pada hubungan kedua negara setelah krisis ekonomi 1997. Selain itu, mendiskusikan hubungan Indonesia-Cina saat ini tentu tidak dapat melepaskan diri dari dinamika Asia Tenggara. Apalagi dalam aspek politik-keamanan, Indonesia terus melibatkan Cina dalam kerangka multilateral melalui ASEAN.¹

¹ Rizal Sukma, "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties" dalam Jun Tsunekawa (ed.), *The Rise of China: Response from Southeast*



B. ENAM DEKADE HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-CINA

Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Cina, yaitu pada 9 Juni 1950, enam bulan setelah terbentuknya Republik Rakyat Cina (RRC). Pada bulan November 1953, perjanjian perdagangan Indonesia-Cina yang pertama ditandatangani di Beijing.² Selanjutnya, Perdana Menteri (PM) Zhou Enlai menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tanggal 26–28 April 1955 dan menandatangani perjanjian dwi kenegaraan Indonesia-Cina, berdasarkan proposal yang diajukan pemerintah Indonesia. Setelah itu, hubungan diantara kedua negara diwarnai dengan saling kunjung antar pihak pemerintah. Kedekatan hubungan antara kedua negara sempat dirasakan selama masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, Soekarno. Namun, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI), 30 September 1965, membawa hubungan keduanya ke titik nadir dan memuncak dengan keputusan Indonesia untuk membekukan hubungan diplomatik dengan Cina pada tanggal 9 Oktober 1967 karena kecurigaan akan campur tangan Beijing dalam peristiwa tersebut.³ Selanjutnya, pada tanggal 23 Oktober 1967, Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Beijing ditutup dan seminggu setelahnya Kedubes RRC di Jakarta pun mengalami hal yang sama. Periode tahun 1967–1990 diwarnai pembekuan hubungan diplomatik di antara kedua negara. Pada masa

Asia and Japan, The National Institute for Defense Studies, Japan, 2009, hlm. 143.

² Gudadi Sasongko, “Kronologi Hubungan RI-RRC 1950–2008” dalam I. Wibowo dan Syamsul Hadi (ed.), *Merangkul Cina Hubungan Indonesia-Cina Pasca Soeharto*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 293.

³ Rizal Sukma, “Indonesia-China Relations: The Politics of Re-Engagement”, dalam *Asian Survey*, Vol. 49, Issue No. 4, University of California Press, United States, July/August 2009, hlm. 591–608.

ini, kepentingan Indonesia di Cina diwakili Kedubes Kamboja di Beijing, sedangkan Cina diwakili Kedubes Rumania di Jakarta.⁴

Baru pada tanggal 24 Februari 1989, ketika Presiden Soeharto bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) RRC saat itu, Qian Qichen, dalam upacara pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo, dibahaslah tentang normalisasi hubungan keduanya yang tengah membeku. Pembahasan ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Tokyo antara Menlu RI, Ali Alatas, dan Qian Qichen pada tanggal 4 Oktober 1989. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1990, kedua Menlu menandatangani Komunike Bersama “The Resumption of the Diplomatic Relations between the Two Countries” di Beijing⁵. Perdana Menteri Cina, Li Peng, kemudian berkunjung ke Indonesia pada tanggal 6 Agustus 1990. Dalam pembicaraan dengan Presiden Suharto, kedua pihak menyatakan kesediaan mereka untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara atas dasar *Five Principles of Peaceful Coexistence* dan Sepuluh Prinsip Konferensi Bandung. Pada tanggal 8 Agustus 1990, Menteri Luar Negeri Cina dan Indonesia atas nama pemerintah masing-masing, menandatangani Nota Kesepahaman Penerusan Hubungan Diplomatik. Kedua belah pihak menyatakan kembalinya secara formal hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia. Presiden Soeharto kemudian melakukan kunjungan balasan pada tanggal 14–18 November 1990 sekaligus menandatangani pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerja sama Teknik⁶. Saling kunjung antarkedua negara cukup intens dilakukan setelahnya.

Indonesia memang memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu 23 tahun, untuk membangun kembali hubungan diplomatiknya dengan Cina. Ada beberapa pertimbangan terkait hal ini. Pertama,

⁴ Gudadi Sasongko, *op.cit.*, hlm. 294.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Indonesia khawatir dengan motif Cina di Indonesia karena upaya kudeta yang pernah terjadi. Kedua, pemerintah Indonesia khawatir normalisasi hubungan dengan Cina akan memicu protes anti-etnis Cina dan tidak dapat dikendalikan. Namun, Cina memahami posisi Indonesia dan bersedia menunggu karena mengetahui Indonesia merupakan mitra dagang dan politik yang berharga.⁷

Pada bulan Mei 1998, pecahlah kerusuhan di Jakarta yang pada akhirnya menumbangkan rezim pemerintahan Soeharto. Etnis Cina menjadi korban terbesar dalam kerusuhan ini. Pemerintah Cina pun langsung menyerukan keprihatinannya dan berharap Indonesia lebih bersungguh-sungguh melindungi etnis Cina yang ada di wilayahnya. Pasca-Orde Baru, dengan iklim politik yang lebih terbuka, etnis Cina di Indonesia mulai mendapat perlakuan politik yang lebih baik. Dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999–2001), Cina mendapat posisi yang istimewa dalam politik luar negeri Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan menjadi negara pertama yang dikunjungi Wahid setelah ia dilantik menjadi presiden. Kunjungan Wahid pada tanggal 1–3 Desember 1999 menjadi babak baru peningkatan hubungan bilateral antara keduanya. Kondisi tersebut ditandai dengan kesediaan Beijing untuk memberi bantuan keuangan serta fasilitas kredit, termasuk disepakatinya kerja sama keuangan, teknologi, perikanan, pariwisata, serta *counter trade* di bidang energi, yaitu menukar LNG Indonesia dengan produk-produk Cina⁸. Megawati Soekarnoputri yang memerintah pascapresiden Wahid juga meneruskan hubungan baik dengan Cina ini. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Beijing,

⁷ Aimee Dawis, Ph.D., “How Does The ASEAN-China Free Trade Agreement Prepare Indonesia to Become A Global Economic Player?” dalam *The Indonesian Quarterly Third Edition 2010 Vol. 38 No. 3*, CSIS, Jakarta, 2010, hlm. 313–314.

⁸ Syamsul Hadi, “Hubungan Indonesia-Cina di Era Pasca-Orde Baru: Perspektif Indonesia” dalam I. Wibowo dan Syamsul Hadi (ed.), *op.cit.*, hlm. 56–57.

24–27 Maret 2002, disepakati untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik.

Hubungan antara Indonesia-Cina mencapai puncaknya dengan ditandatanganinya Deklarasi Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership*) pada tanggal 25 April 2005 di Jakarta saat Presiden RRC, Hu Jintao, berkunjung ke Indonesia dalam peringatan 50 tahun KAA di Bandung. Kemitraan strategis ini mencakup kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial budaya dan kerja sama lainnya. Setelah penandatanganan Deklarasi Bersama ini, hubungan kedua negara berkembang dengan pesat. Di bidang ekonomi, target volume perdagangan sebesar US\$ 30 miliar pada tahun 2010 sudah tercapai pada tahun 2008. Bahkan pada tahun 2010 ini, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani target baru, yaitu US\$ 50 miliar untuk jangka waktu lima tahun ke depan (2010–2015). Pada kesempatan pertemuan bilateral di sela *APEC Economic Leaders Meeting* di Singapura, November 2009, Presiden SBY dan Presiden RRC, Hu Jintao, menandatangani tahun 2010 sebagai “Tahun Persahabatan Indonesia-Cina”.⁹ Dinamika hubungan Indonesia-Cina selama enam dekade secara ringkas dapat dilihat dalam Tabel 1.

Hubungan Indonesia-Cina telah berkembang cepat di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Perkembangan perdagangan antara Indonesia-Cina pada periode bulan Januari–Juni 2010 mencapai US\$ 19,5 miliar atau naik sebesar 66,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 11,72 miliar. Peningkatan perdagangan tersebut karena ekspor dan impor Indonesia-Cina yang meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan angka ekspor RRC

⁹ “Penandatanganan Plan of Action Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI-RRC”, <http://www.deplu.go.id/beijing/Pages/Print.aspx?ListName=EmbassiesNews&IDP=12&CID=id-ID>, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2010.

Tabel 1. Enam Dekade Dinamika Hubungan Indonesia-Cina

Era Soekarno	<ul style="list-style-type: none"> • 9 Juni 1950 : Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-RRC • November 1953 : Perjanjian Perdagangan RI-RRC yang pertama ditandatangani di Beijing
Era Soeharto	<ul style="list-style-type: none"> • 9 Oktober 1967 : Pembekuan hubungan diplomatik RI-RRC akibat peristiwa G30S • 3 Juli 1990 : Menlu RI dan RRC menandatangani Komunike Bersama di Beijing "The Resumption of the Diplomatic Relations Between the Two Countries"
Era Abdurrahman Wahid	<ul style="list-style-type: none"> • 1-3 Desember 1999 : Beijing bersedia memberi bantuan keuangan serta fasilitas kredit dan kerjasama keuangan, teknologi, perikanan, pariwisata, serta <i>counter trade</i> bidang energi, yaitu antara LNG Indonesia dengan produk China
Era Megawati	<ul style="list-style-type: none"> • 24-27 Maret 2002 : keduanya sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik
Era Soesilo Bambang Yudhoyono	<ul style="list-style-type: none"> • 25 April 2005 : Penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRC

ke RI sebesar US\$ 9,83 miliar atau naik 60% dan impor RRC dari RI sebesar US\$ 9,66 miliar, atau naik 73,18%. Indonesia merupakan negara tujuan ekspor urutan ke-20 bagi RRC dengan nilai perdagangan sebesar 1,39% dari total ekspor RRC ke dunia yang mencapai US\$ 705,18 miliar dan negara asal impor urutan ke-16 dengan nilai sebesar US\$ 9,66 miliar dengan pangsa Indonesia sebesar 1,49% dari total impor RRC yang mencapai nilai US\$ 649,41 miliar.¹⁰

Sementara itu, Cina merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-4 bagi Indonesia setelah Uni Eropa (UE), Jepang, dan Amerika Serikat (AS). Total ekspor nonmigas Indonesia ke Cina mengalami peningkatan antara tahun 2004 sebesar 6,1% menjadi sekitar 9,1% pada tahun 2009. Pada periode yang sama, pangsa ekspor ke UE, AS, dan Jepang mulai berkurang. Demikian pula dari sektor impor, Cina merupakan sumber impor kedua Indonesia setelah ASEAN. Jika pada

¹⁰ Data diperoleh dari Kementerian Perdagangan RI, 2011.



tahun 2004 impor Indonesia dari Cina hanya sebesar 7,9%, pada tahun 2009 impor Indonesia dari Cina melonjak ke 19,77%. Ekspor Indonesia ke Cina paling banyak adalah produk industri, diikuti sektor pertambangan, dan sektor pertanian, meskipun pertumbuhan ekspor paling besar selama periode tahun 1999–2009 adalah sektor pertambangan. Hal ini tentu terkait dengan kebutuhan Cina akan energi yang semakin besar seiring dengan *booming* perekonomiannya, terutama minyak. Selain itu, adanya kerja sama energi antara Cina dan Indonesia dalam bentuk forum energi yang dibentuk sejak tahun 2002 sebagai payung investasi Cina di Indonesia dalam bidang energi.

Selain sektor perdagangan, Cina juga berinvestasi dan menyediakan pembiayaan bidang pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hingga tahun 2008, Cina merupakan investor terbesar ke-5 di Indonesia. Beberapa perusahaan Cina yang telah berinvestasi di Indonesia di antaranya adalah CNOOC, Petro China, Alcatel Shanghai, CITIC, Haier, KONKA, Huawei Technology, ZTE Corporation, dan China Railways Engineering Corporation. Cina juga memberikan fasilitas pinjaman skema *Preferential Export Buyer's Credit* sebesar US\$ 800 juta, antara lain untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin, proyek jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), proyek Bendungan Jatigede, dan proyek PLTU Parit Baru. Pada bulan Juni 2010, pemerintah Indonesia bertemu dengan perusahaan-perusahaan konstruksi dan elektronik RRC di Shanghai untuk menawarkan proyek infrastruktur bernilai miliaran USD yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan (*bottleneck*) pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 30 eksekutif tingkat atas dari perusahaan-perusahaan RRC yang telah berbisnis secara global, seperti Cina Railway Engineering Co., Cina Industry Investment International, State Grid International Development, dan Cina Road & Bridge Corp. Pada kesempatan itu, perwakilan Indonesia juga menawarkan investor RRC untuk ambil

bagian pada proyek pembangunan jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan rel kereta api di Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Riau. Realisasi investasi Cina di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Selain itu, sinergi dan kerja sama kedua negara yang melibatkan unsur kalangan bisnis (*B to B*) dan masyarakat (*P to P*) semakin menguat serta meluas dalam kerangka penguatan kerja sama *sister-cities/provinces* kedua negara.¹¹ Salah satu kerja sama antarprovinsi kedua negara terwujud dalam penandatanganan *Letter of Intent Friendship Cooperation* antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang pada tanggal 20 Agustus 2010. Kesepakatan antara kedua belah pihak meliputi kerja sama pada tujuh bidang, yaitu investasi, perdagangan, pariwisata, pertanian, pendidikan, budaya, serta pemuda dan olahraga, ditambah dengan kesepakatan tentang bidang/ sektor lain yang dapat dikerjakan samakan.¹² Selain itu, terdapat kerja sama provinsi Jawa Barat dengan tiga provinsi di RRC, yaitu Shandong, Henan, dan Heilongjiang, yang semuanya masih dalam *Letter of Intent*. Sektor-sektor yang menjadi objek kerja sama meliputi: ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, pertanian, pariwisata, dan teknologi.¹³

Dalam bidang pertahanan, Indonesia-Cina melakukan kerja sama yang diselenggarakan dalam konteks kepentingan nasional Indonesia

¹¹ Hegemoni Gopal Cina dan Peluang Kemanfaatan Bagi Indonesia, Biro Hubungan Internasional Deputi Seswapres Bidang Politik Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 77.

¹² *Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Zhejiang, RRT pada Acara Signing Letter of Intent Friendship Cooperation antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang, RRT tanggal 19–22 Agustus 2010*, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Banten, 2010, hlm. 4.

¹³ Transkrip FGD “Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara”, The Amaroossa Hotel-Bandung, 22 Agustus 2011.

Tabel 2. Realisasi Investasi PMA Cina di Indonesia Menurut Lokasi 1 Januari 2005–31 Desember 2009

Tahun	Lokasi	Nilai Investasi (US\$. 000)
2005	Sumatra Barat	12.853,0
	Banten	23.814,0
	DKI Jakarta	8.207,4
	Jawa Timur	0,0
	Bali	177,0
2006	Kepulauan Riau	10.640,4
	Lampung	750,0
	Bangka Beliteung	219,8
	Banten	8.722,2
	Jawa Barat	7.000,0
	Jawa Tengah	2.250,0
Tahun	Lokasi	Nilai Investasi (US\$. 000)
	DKI Jakarta	780,0
	Jawa Timur	168,5
	Kalimantan Selatan	1.000,0
2007	Jawa Barat	14.866,0
	Banten	8.078,1
	DKI Jakarta	3.915,0
	Jawa Timur	1.470,0
	Nusa Tenggara Timur	400,0
	Kalimantan Timur	160,0
2008	Sulawesi Selatan	59,5
	Lampung	63.274,2
	Kepulauan Riau	1.000,0
	Bangka Beliteung	0,0
	DKI Jakarta	43.530,0
	Banten	7.200,0
	Jawa Barat	5.653,9
	Jawa Timur	2.620,0
	Bali	250,0
	Papua	13.845,3
2009	Kepulauan Riau	5.100,0
	Banten	35.002,9
	DKI Jakarta	10.542,2
	Jawa Barat	7.700,0
	Jawa Timur	4.970,4
	Bali	160,0
	Sulawesi Tengah	800,0
Papua	1.200,0	

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, 2011.

untuk membangun kemampuan pertahanan serta penanganan isu-isu keamanan bersama kedua negara. Pada tanggal 25 April 2005, Presiden RI dan RRC menandatangani *RI-PRC Joint Statement on Strategic Partnership* yang di antaranya mencakup kerja sama di bidang pertahanan. Sebagai realisasi dari kemitraan strategis di bidang pertahanan, pada bulan Juli 2006 dilangsungkan *RI-PRC Bilateral Defense Dialogue* di Jakarta yang membahas berbagai isu keamanan kawasan. Kerja sama pertahanan tersebut akan menjadi wadah komunikasi kepentingan nasional kedua negara, terutama dalam menyamakan pandangan tentang isu-isu keamanan global dan regional, serta bersama-sama mendorong penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik. Kemudian pada tanggal 7 November 2007, ditandatangani persetujuan kerja sama pertahanan oleh menteri pertahanan kedua negara di Beijing.¹⁴ Cina diharapkan berpartisipasi dalam program pengembangan industri pertahanan di Indonesia, mencakup *joint production* dan pelaksanaan *Transfer of Technology (ToT)*. Kerja sama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan RRC dianggap memberi manfaat ganda bagi kedua belah pihak, terutama untuk menopang stabilitas kawasan karena keduanya memiliki kepentingan yang sama terhadap pengamanan Selat Malaka dan pengamanan SLOC (*Sea Lane Of Communication* atau ALKI), juga keamanan pasokan energi dari dan ke Timur Tengah serta transportasi komoditas dan produk negara-negara industri ke wilayah Asia dan Eropa.

Hubungan Indonesia dengan Cina di bidang politik, pertahanan-keamanan, dan ekonomi pada dasarnya adalah hubungan yang strategis mengingat Cina kini telah menjadi kekuatan utama di dunia dengan tingkat kemajuan ekonomi dan militernya. Cina kini memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang hampir menyamai tingkat

¹⁴ *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 148.



pembangunan ekonomi di negara-negara maju.¹⁵ Selain itu, saat ini Cina juga menjadi sumber bantuan keuangan bagi banyak negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Cina menyediakan bantuan keuangan berupa *technical cooperation* kepada banyak negara di dunia, mencakup Amerika Latin, Amerika Tengah, Timur Tengah, dan Afrika. Di samping itu, kesuksesan pembangunan ekonomi Cina saat ini menjadikan banyak negara di dunia memperhatikan model pembangunan ekonomi Cina, yaitu sistem ekonomi pasar sosialis berupa kombinasi setengah pasar bebas dengan setengah otoriter bisa menghasilkan kemajuan ekonomi.¹⁶

Kapasitas Cina di bidang pertahanan juga tidak perlu diragukan lagi dengan kekuatan militernya yang semakin canggih. Fakta perbandingan jumlah personel Angkatan Darat (AD) di kawasan Asia Pasifik menunjukkan bahwa Cina menempati posisi teratas dengan jumlah prajurit AD mencapai lebih dari satu juta personel, yaitu 1.600.000 prajurit. Hal ini beralasan mengingat luasnya teritori dan besarnya jumlah penduduk yang lebih dari satu miliar orang. Berdasarkan jumlah persenjataan (alutsista/ alat utama sistem senjata) darat, seperti tank, ACV (*Armoured Combat Vehicle*), dan artileri, Cina juga patut diperhitungkan. Cina memiliki jumlah tank sebanyak 8.580 unit, yang merupakan terbesar kedua di kawasan Asia Pasifik setelah Rusia. Cina juga termasuk lima negara di Asia Pasifik yang memiliki artileri di atas 10.000 unit, bersama dengan Rusia, Korea Utara, India, dan Korea Selatan. Jumlah artileri Cina sebanyak 17.700 unit. Cina juga memiliki jumlah kapal selam terbanyak ketiga di Asia Pasifik, setelah Korea Utara dan Amerika Serikat, yaitu 69 unit, termasuk di dalamnya kapal yang dipersenjatai dengan peluru kendali.

¹⁵ Bantarto Bandoro, “Hegemoni Cina dan Kepentingan Indonesia” dalam *Hegemoni Global Cina dan Peluang Kemanfaatan Bagi Indonesia*, *op.cit*, hlm. 84.

¹⁶ I. Wibowo, “Hegemoni Cina di Dunia Analisis atas Dasar ‘Soft Power’” dalam *Hegemoni Global Cina dan Peluang Kemanfaatan Bagi Indonesia*, *op.cit*, hlm. 100–103.



Di Asia Pasifik, hanya Cina dan Amerika Serikat yang memiliki tipe kapal selam ini. Sementara itu, untuk jumlah kapal perang (*Principal Surface Combatant/ PSC* dan *Patrol and Coastal Combatant/ PCC*), Cina berada di urutan ketiga di Asia Pasifik, yaitu sebanyak 63 unit PSC yang terdiri dari *destroyer* dan *frigate* dan 301 unit PCC. Berdasarkan jumlah kapal yang dimiliki Angkatan Laut, Cina menduduki posisi pertama dengan 961 unit. Demikian pula dengan Angkatan Udaranya, Cina menempati urutan teratas untuk kekuatan pesawat tempur jenis *fighter* di Asia Pasifik, yaitu 3421 unit dan nomor dua untuk jenis *bomber*, yaitu 225 unit. Cina, Rusia, dan Amerika Serikat merupakan tiga negara di Asia Pasifik yang memiliki angkatan udara terkuat dengan dukungan pesawat tempur yang besar.¹⁷

Melihat perkembangan Cina dan perannya di kawasan maupun pada tingkat global, dapat disimpulkan bahwa Cina telah muncul sebagai kekuatan baru dunia (*emerging power*) yang akan turut menentukan percaturan politik dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia-Pasifik secara lebih luas. Apalagi, Cina kini semakin gencar memperluas kekuatannya (*soft power*), melalui bidang ekonomi dan budaya. Kebangkitan dan kemajuan Cina ini di sisi lain dimaknai secara berbeda-beda oleh berbagai pihak. Ada yang menganggapnya sebagai peluang (*opportunity*), tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai ancaman (*threat*), bahkan sebagai upaya Cina menjadi hegemon. Meskipun pada dasarnya, persoalan bagaimana mengatasi bangkitnya Cina sebagai kekuatan global adalah sebuah persoalan kebijakan.¹⁸

Hubungan Indonesia-Cina yang telah menempuh enam dekade pada dasarnya adalah hubungan yang penting dan strategis bagi kedua belah pihak. Semakin menguatnya posisi Cina sebagai salah satu

¹⁷ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 157–202.

¹⁸ Bantarto Bandoro, *op.cit.*, hlm. 84.



negara besar di dunia membuat Indonesia, di satu sisi, berkepentingan untuk memanfaatkan hubungan baiknya dengan Cina yang kini telah menjadi kemitraan strategis, untuk kepentingan nasionalnya. Bagi Indonesia, hal ini sejalan dengan konstitusi negara Republik Indonesia (RI) yang memberikan amanat bahwa Indonesia turut menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-2 menyatakan bahwa sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional adalah meningkatnya peran Indonesia dalam hubungan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional, menciptakan perdamaian dunia, mendorong terciptanya kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan internasional. Oleh karena itu, hubungan Indonesia-Cina perlu dicermati dan diselaraskan dengan tujuan tersebut dengan tetap menjaga independensi Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain.

Dalam konteks dinamika demikian, buku ini bermaksud untuk melihat secara strategis sejauh mana kemajuan, tantangan, dan peluang dalam hubungan Indonesia-Cina dari sisi politik, pertahanan-keamanan, dan ekonomi serta kebijakan yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk dapat memaksimalkan keuntungan dari hubungan bilateral tersebut.

C. INDONESIA-CINA PASCA-1997: MENUJU PENINGKATAN HUBUNGAN BILATERAL

Pemberontakan PKI tahun 1965, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah menyebabkan memburuknya hubungan Indonesia-Cina. Perubahan rezim di Indonesia, yang terjadi setelah peristiwa itu, dari Orde Lama di bawah Soekarno menuju Orde Baru di bawah Soeharto,



menuduh keterlibatan Cina dalam peristiwa tersebut dan berujung pada pembekuan hubungan diplomatik oleh Indonesia. Pemerintah Orde Baru, khususnya militer Indonesia, menganggap Cina sebagai ancaman utama bagi keamanan nasional Indonesia atau yang disebut Rizal Sukma (1999) sebagai *'triangle threat'*, yaitu Cina, PKI, dan etnis Cina. Ketiganya diasumsikan saling berhubungan dan menjadi basis legitimasi bagi pemerintah Orde Baru sekaligus mencegah Jakarta menormalisasi hubungan dengan Cina selama hampir 23 tahun.¹⁹ Politik domestik memang sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia saat itu.



Ketika akhirnya Indonesia-Cina berhasil menormalisasi hubungan pada tahun 1990, hubungan di antara keduanya tidaklah meningkat secara signifikan pada masa awal normalisasi. Kecurigaan dan sensitivitas terus mempengaruhi sikap Indonesia terhadap Cina. Indonesia cenderung bersikap hati-hati dan melakukan pendekatan *wait and see* dalam mengembangkan hubungannya yang baru dengan Cina. Hingga awal tahun 1998, Indonesia lebih memprioritaskan dimensi ekonomi dari hubungan bilateral dengan Cina yang terbatas pada perdagangan dan investasi.²⁰



Krisis ekonomi tahun 1997 yang melanda Indonesia berujung pada tumbangannya rezim Orde Baru di bawah Soeharto pada bulan Mei 1998. Jatuhnya rezim Orde Baru ini didahului oleh kerusuhan anti-etnis Cina di Indonesia. Pemerintah Cina menyatakan perhatiannya atas peristiwa ini dan dengan segala kesadaran atas sensitivitas isu menyerahkan sebagai masalah internal Indonesia. Sejak tahun 1998 inilah, seiring perubahan rezim dari Orde Baru ke era Reformasi, cakupan hubungan bilateral di antara keduanya meluas ke wilayah keamanan dan pertahanan, bahkan energi. Rentang waktu ini pula, pascatahun 1997, yang menjadi fokus tulisan ini.

¹⁹ Rizal Sukma dalam Jun Tsunekawa (ed.), *op.cit.*, hlm. 141–142.

²⁰ *Ibid*, hlm. 142–143.



Pascatahun 1997 bukan saja ditandai dengan perluasan cakupan kerja sama, melainkan juga peningkatan posisi Cina dalam politik luar negeri Indonesia dan etnis Cina dalam politik domestik. Abdurrahman Wahid, yang terpilih sebagai presiden pada bulan Oktober 1999, menunjukkan antusiasme untuk mendekatkan hubungan dengan Cina dan menjadi negara pertama yang dikunjungi pada awal pemerintahannya. Pemulihan ekonomi menjadi tugas pokok pemerintahan Wahid sebagai imbas krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Wahid berharap dukungan dari etnis Cina di Indonesia akan segera meningkat jika Indonesia membina hubungan baik dengan Beijing. Meskipun asumsi hubungan antara etnis Cina di Indonesia dan Beijing tidak ditemukan, namun hal ini menyampaikan pesan penting kepada etnis Cina di dalam dan luar negeri bahwa Ia dan pemerintahannya tidak anti-etnis Cina.²¹

Abdurrahman Wahid memelopori upaya untuk mengakhiri peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Cina di Indonesia. Ia segera menghapus Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 yang membatasi praktik agama dan adat-istiadat etnis Cina. Ia kemudian menandatangani Inpres No. 6 Tahun 2000 yang mengizinkan perayaan Tahun Baru Cina. Megawati, yang menggantikan Presiden Wahid pada bulan Juli 2001, kemudian melanjutkan upaya yang dipelopori pemerintahan sebelumnya dengan menjadikan hari Tahun Baru Cina sebagai hari libur nasional, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2003. Kemudian, Soesilo Bambang Yudhoyono yang memerintah sejak tahun 2004 juga melakukan upaya serupa dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa diskriminasi legal terhadap nonpribumi Indonesia, terutama etnis Cina di Indonesia, tidak diperbolehkan.

²¹ Rizal Sukma, *op.cit.*, hlm. 145–146.



Politik domestik Indonesia pada periode ini sudah jauh berbeda dengan periode awal normalisasi dalam memandang Cina. Pada periode ini, Cina tidak lagi dianggap mengancam secara ideologi. Mereka dihadapkan pada fakta bahwa Cina telah tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang kuat dan memandang Cina lebih sebagai sebuah peluang ekonomi.

Era Presiden Megawati menandai perluasan cakupan kerja sama di bidang energi. Terbukti kini, tiga perusahaan minyak nasional Cina telah beroperasi di Indonesia. Pertama, China National Petroleum Company (CNPC) yang kehadirannya di Indonesia diwakili oleh anak perusahaannya, PetroChina, yang masuk pertama kali pada tahun 2002. CNPC melakukan akuisisi terhadap Devon Energy di Indonesia. Tahun 2004 PetroChina memiliki 25% kepemilikan dan hak beroperasi di ladang minyak Sukowati dan kini memiliki beberapa kilang minyak dan gas di Indonesia, seperti di Jabung (Jambi), Salawati (Papua), dan Jawa Timur (Tuban). Kedua, China Petroleum and Chemical Company (Sinopec) yang masuk ke industri migas nasional bulan Juli 2005 dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama proyek eksplorasi minyak di Tuban, Jawa Timur. Kehadiran Sinopec di Indonesia diwakili Sinopec International Petroleum E & P Co., yang bertanggungjawab atas *Production Sharing Contract* (PSC) di Blok Binjai, Sumatra Utara. Ketiga, Cina National Offshore Oil Corporation (CNOOC) yang pada tanggal 28 November 2002 secara resmi membeli saham Repsol YPF di Indonesia dan lahirlah CNOOC South East Sumatra (SES) bekerja sama dengan enam perusahaan energi. CNOOC SES Ltd. menguasai lima ladang minyak Repsol YPF, dari tujuh ladang yang dimilikinya, yang tersebar di lepas pantai utara Jawa Barat, barat daya Sumatra, barat Madura, Poleng, dan Blora.²²

²² Tirta N. Mursitama dan Maisa Yudono, *Strategi Tiga Naga Ekonomi Politik Industri Minyak Cina di Indonesia*, Kepik Ungu, Jakarta, 2010, hlm. 117–137.



Perluasan kerja sama di bidang pertahanan-keamanan dicapai pada pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono seiring penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis tahun 2005. Kedua negara membentuk Mekanisme Dialog Tingkat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)-*State Councillor* pada bulan Juli 2005; Forum Konsultasi Kerja Sama Maritim pada bulan Desember 2006; Persetujuan tentang Kerja Sama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan pada bulan Desember 2007; dan Perjanjian Ekstradisi pada bulan Juli 2009. Di samping itu, pada Pertemuan Dialog ke-2 Tingkat Menko Polhukam-*State Councillor*, 21 Januari 2010, di Jakarta, telah ditandatangani *Plan of Action* (PoA) Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis Indonesia-Cina yang berisi berbagai program kegiatan konkret sebagai upaya implementasi butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam deklarasi bersama tersebut untuk periode lima tahun ke depan (2010–2015).



Pascatahun 1997 ini juga menjadi periode penting melihat dinamika kedua negara seiring pelaksanaan ACFTA. Meskipun telah ditandatangani pada tahun 2002 dan diawali dengan *early harvest program* (EHP) pada tahun 2004, ketika perjanjian perdagangan bebas ini dilaksanakan secara resmi pada tahun 2010 tetap menimbulkan respon negatif di Indonesia. Hal ini bisa dibaca dalam berbagai media massa nasional bagaimana protes dari kalangan dunia usaha hingga adanya rumor boikot. Dihadapkan pada situasi demikian, pemerintah Indonesia bereaksi dengan meminta renegotiasi. Diskusi bersama kemudian diadakan oleh KADIN Indonesia, Sekretariat ASEAN, dan Kementerian Bidang Perekonomian dan Industri, serta Perdagangan. Diskusi menghasilkan keputusan untuk meneruskan permintaan Kementerian Perindustrian untuk menunda 228 batas tarif terhadap Cina.

Merespons perkembangan tersebut, Kedutaan Besar Cina berkolaborasi dengan KADIN Indonesia melakukan dialog antara Madame



Zhang Qiyue, Duta Besar Cina, dan komunitas bisnis Indonesia pada tanggal 18 Maret 2010. Pada diskusi tersebut, Madame Zhang mendiskusikan bagaimana Cina dan Indonesia dapat mencapai sebuah *win-win solution* daripada memandang ACFTA sebagai sebuah ancaman serta menegaskan bahwa Indonesia bukanlah target utama ekspor Cina. Tidak lama setelah pertemuan dengan Madame Zhang, Cina juga mengirim menteri perdagangannya, Chen Deming, ke Indonesia pada tanggal 2 April 2010 dan mengadakan *10th Indonesia-China Joint Commission Meeting* dengan menteri perdagangan RI, Marie Elka Pangestu, pada tanggal 3 April 2010 di Yogyakarta. Namun, Cina tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Cina memang tidak dapat membuat konsesi dengan satu negara karena FTA tersebut bukan bersifat bilateral, melainkan multilateral yang melibatkan seluruh anggota ASEAN. Namun, langkah Cina mengirimkan pejabat tingkat tingginya ke Indonesia daripada membiarkan masalah meluas, untuk memelihara hubungan baik (*guanxi*) dengan Indonesia, menunjukkan hormat dan sensitivitas yang besar terhadap Indonesia.²³

D. INTERDEPENDENSI MENUJU REGIONALISME

Hubungan Indonesia-Cina pascanormalisasi harus dilihat sebagai hubungan yang kompleks antara faktor sejarah di masa lalu, politik domestik, dan pertimbangan regional. Bagaimanapun, pembekuan hubungan diplomatik selama lebih dari dua dekade menjadi pertimbangan yang sensitif, terutama bagi Cina, dalam perkembangan hubungannya dengan Indonesia. Sebagaimana diketahui, di awal normalisasinya, Indonesia mengambil sikap hati-hati dan tidak berupaya secara aktif memperluas hubungannya dengan Cina. Daripada mengembangkan hubungan politik-keamanan secara langsung dengan

²³ Aimee Dawis, *op.cit.*, hlm. 315–319.



Cina, Indonesia lebih suka berhubungan dalam kerangka multilateral, baik melalui ASEAN maupun ARF. Indonesia memandang ASEAN sebagai instrumen yang lebih efektif dalam mengelola hubungannya dengan Cina. Di sisi lain, pembuat kebijakan di Indonesia juga memandang ARF sebagai instrumen agar Cina tetap menghormati norma-norma internasional dalam hubungan antarnegara atau dengan kata lain untuk menjamin Cina akan terus memperkuat komitmen dan keterlibatannya dalam jaringan proses keamanan multilateral di kawasan.²⁴



Hubungan Indonesia-Cina secara bilateral dan dalam kerangka ASEAN secara multilateral pada dasarnya menunjukkan pola interdependensi, baik secara ekonomi maupun politik, yang mengarah pada penguatan regionalisme. Sebagaimana kita ketahui, globalisasi telah menghadapkan kita pada fenomena multilateralisme, regionalisme, dan bilateralisme yang berlangsung secara simultan. Revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi telah membuat arus pergerakan barang dan jasa, manusia, dan faktor-faktor produksi lainnya, serta informasi data dan ilmu pengetahuan semakin lancar karena batas-batas fisik dan administratif negara kian samar.²⁵ Hubungan langsung antara regionalisme dan interdependensi regional adalah kesalingtergantungan yang tumbuh di antara aktor-aktor yang berada di suatu kawasan tertentu. Menurut Hurrell (1995) sekurangnya ada tiga teori yang membahas mengenai interdependensi kawasan, yaitu neofungsionalisme, neoliberal institusionalisme, dan konstruktivisme. Jika neofungsionalisme dan neoliberal institusionalisme melihat regionalisme sebagai respon negara-negara terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh interdependensi regional dan

²⁴ Rizal Sukma, *op.cit.*, hlm. 152–153.

²⁵ Shalendra D. Sharma, “Asian: Economic Crisis and the IMF”, *Survival* Vol. 40 No. 2, Summer 1998, hlm. 27 dalam Yasmin Sungkar, *Strategi ASEAN dalam Perluasan ASEAN+3*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm. 8.



menekankan peran kritis dari institusi-institusi dalam menghadapi dan mengembangkan kohesi regional, maka konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesadaran dan identitas regional dalam memberi rasa kepemilikan kepada suatu komunitas regional tertentu.²⁶ Bila diamati, proses regionalisme yang berlangsung di Asia Pasifik, khususnya dalam kerangka ASEAN-Cina, membutuhkan sebuah manajemen kolektif seiring meningkatnya interdependensi ekonomi di kawasan tersebut. Kohesi regional timbul dari cara bagaimana negara semakin menguatkan hubungan pada tiap permasalahan baru yang lebih besar dan lebih kompleks.



Hubungan Cina dengan ASEAN semakin meningkat setelah Cina menormalisasi hubungannya dengan Indonesia pada bulan Juli 1990. Cina kemudian melanjutkannya dengan membuka hubungan diplomatik dengan Singapura pada tanggal 3 Oktober 1990. Selanjutnya, Cina mulai berupaya membuka hubungan resmi dengan ASEAN. Pada tanggal 19 Juli 1991, Menlu Cina, Qian Qichen, menghadiri pembukaan AMM ke-24 di Kuala Lumpur atas undangan pemerintah Malaysia. Pada kesempatan ini, Cina menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan ASEAN. Sejak saat itu, Cina menjadi mitra konsultatif ASEAN.



Hubungan ini semakin berkembang dengan ikut sertanya Cina dalam ARF mulai tahun 1994. Hingga akhirnya, pada AMM ke-29 di Jakarta, Juli 1996, ASEAN menyetujui status mitra dialog penuh bagi Cina menggantikan statusnya semula. Pada bulan Desember 1997, Presiden Cina saat itu, Jiang Zemin, dan seluruh pemimpin negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan informal pertamanya dalam kerangka ASEAN+1 dan mengeluarkan pernyataan bersama untuk membentuk kemitraan berdasarkan prinsip bertetangga yang baik (*good neighbourhood*) dan saling percaya menuju abad 21. Pada

²⁶ Nuraeni S, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 52–53.



tahun 2001, Cina mengusulkan pembentukan wilayah perdagangan bebas dengan ASEAN (*ASEAN-Cina Free Trade Area/ ACFTA*) yang difokuskan pada bidang pertanian, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, investasi, dan kerja sama lembah sungai Mekong. Pada *ASEAN-Cina Summit* ke-6 di Kamboja, 4 November 2002, akhirnya ditandatangani *Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of Cina*, yang kemudian diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of Cina*.

Hubungan ASEAN-Cina terus meningkat dengan ditandatanganinya *Joint Declaration of the Heads of State/Government of the ASEAN and the People's Republic of Cina (PRC) on Strategic Partnership for Peace and Prosperity* pada *ASEAN Summit* ke-7 di Bali, Oktober 2003. Pada saat yang sama, Cina juga menyetujui *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*, yaitu *code of conduct* hubungan antarnegara di Asia Tenggara, sekaligus menjadi mitra dialog ASEAN pertama yang menandatanganinya. Di samping itu, di bidang politik-keamanan, Cina sebelumnya juga sudah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) Between the Governments of the Member Countries of the ASEAN and the Government of the PRC on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues* di Bangkok, 10 Januari 2003, dan *Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea (DoC)* pada tahun 2002.

Pertengahan tahun 1990-an diwarnai dengan sikap Cina yang memproyeksikan dirinya sebagai sebuah kekuatan besar yang ingin menjalin hubungan yang dekat dengan negara tetangganya, terutama ASEAN. Kemauan Cina dan komitmennya yang terus meningkat terhadap ASEAN ini juga disambut baik oleh Indonesia. Mengutip

Rizal Sukma “*Indonesia’s growing comfort in dealing with Cina has also been the function of a significant shift in Cina’s overall approach towards Southeast Asia since the mid-1990*”.²⁷ Cina terus berupaya menunjukkan dirinya sebagai sebuah “responsible power”. Krisis keuangan yang melanda banyak negara Asia, termasuk Indonesia, menjadi salah satu jalan bagi Cina menunjukkan niat baiknya di kawasan dengan menawarkan bantuan dan pinjaman berbunga rendah ke beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia. Kesan positif ini semakin meningkat ketika pada bulan Desember 2004 bencana tsunami melanda Indonesia dan beberapa negara di Samudera Hindia. Cina menunjukkan respon yang cepat dengan memberikan bantuan bagi korban hingga proses rekonstruksi.

Sikap Cina terhadap ASEAN mencerminkan pandangannya yang luas yaitu menganggap ASEAN sebagai salah satu pilar dalam sistem multipolar. Cina mengakui peran penting ASEAN dalam ARF dan APEC, serta forum regional lainnya. Peningkatan hubungan dalam ACFTA yang diprakarsai Cina, terutama ditujukan sebagai *confidence building measures* untuk mengurangi kecurigaan ASEAN terhadap Cina. Hal ini dapat dijadikan modal oleh Cina untuk mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan regional dan global. Dukungan semacam ini sangat penting bagi Cina dalam rivalitasnya dengan Amerika Serikat dan Jepang. Bagi negara-negara ASEAN, selain kepentingan ekonomi, ACFTA juga dipandang penting secara politik-keamanan karena integrasi ekonomi dengan Cina diharapkan dapat mengikat kepentingan Cina di kawasan sehingga Cina turut berkepentingan untuk mendukung keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Melalui perjanjian ini diharapkan Cina dapat menahan diri dalam menghadapi masalah-masalah bilateral.²⁸

²⁷ Rizal Sukma, *op.cit.*, hlm. 150.

²⁸ Ratna Shofi Inayati (ed.), *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)?*, LIPI Press, Jakarta, 2006, hlm. 14–15.



Cina tampaknya menyadari bahwa Indonesia merupakan kekuatan ekonomi besar di Asia Tenggara dan memainkan peran kunci untuk stabilitas regional. Indonesia dan Asia Tenggara telah sejak lama menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan dan strategi jangka panjang Cina.²⁹ Tak heran Cina “rela” menunggu lebih dari dua dekade untuk bisa membangun hubungan diplomatik kembali dengan Indonesia dan bahkan segera sesudah normalisasi pada tahun 1991, diskusi awal untuk pembentukan ACFTA dimulai. Lebih dari itu, ACFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama yang dilakukan Cina dengan kelompok negara di dunia. Kawasan Asia Tenggara sejak lama telah menjadi tujuan pengembangan kekuatan lunak Cina, baik melalui ekonomi maupun budaya. Asia Tenggara tidak saja menguntungkan secara ekonomi bagi Cina dengan pasar yang menjanjikan mengingat jumlah penduduknya yang besar serta jalur perdagangan dan sumber energi, tetapi juga menguntungkan secara politik bagi stabilitas kawasan.

Oleh karena itu, respon Indonesia terhadap kekuatan Cina yang semakin meningkat tidak lagi hanya dipahami dari perspektif bilateral, tetapi dalam konteks yang lebih luas terkait implikasi regional dari kebangkitan Cina di Asia Timur. Indonesia bersama negara ASEAN lainnya tentu tidak menginginkan Cina mendominasi kawasan ini dan lebih menempatkannya dalam kompetisi dengan kekuatan global lainnya. Apa yang diajukan Indonesia dengan memperluas keanggotaan *East Asia Summit* (EAS) tidak hanya terbatas pada *ASEAN Plus Three* (APT), yaitu *ASEAN Plus* Cina, Jepang, dan Korea seperti usul Malaysia, tetapi memasukkan juga Australia, India, New Zealand, dan bahkan Amerika Serikat serta Rusia yang kehadiran perdananya di EAS pada bulan November 2011, semakin menegaskan posisi Indonesia terhadap Cina.

²⁹ Bantarto Bandoro, *op.cit.*, hlm. 88.

E. PENUTUP

Hubungan Indonesia-Cina pada dasarnya telah berlangsung sejak lama dan mengalami pasang surut hubungan selama lebih dari enam dekade. Indonesia menyadari sepenuhnya kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan penting dan strategis bagi kepentingan nasional Indonesia, baik secara politik, pertahanan-keamanan, maupun ekonomi. Perkembangan politik apapun yang terjadi di kawasan ini akan membawa dampak langsung dan tidak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia. Menguatnya pengaruh Cina dalam konstelasi global dan regional tentu juga berdampak secara langsung bagi Indonesia. Selain itu, menguatnya peran Cina ini harus dipandang sebagai peluang yang perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan nasional Indonesia. Walaupun demikian, tak dapat dipungkiri masih banyak ganjalan dalam hubungan keduanya, termasuk pelaksanaan ACFTA yang disinyalir menjadi ancaman baru akibat dampak yang ditimbulkannya bagi industri di Indonesia, yang akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab berikutnya. Dalam hal ini, *good will* dari kedua belah pihak untuk simbiosis yang saling menguntungkan sangat menentukan bagi masa depan hubungan keduanya. Tentu saja, komitmen Indonesia akan *One Cina Policy* akan menjadi landasan penting bagi keduanya sebagaimana tertuang dalam *aide de-memoire* sewaktu normalisasi hubungan, “*Indonesia consistently adheres to the one-Cina policy, recognizing the People’s Republic of Cina as the sole legitimate with Taiwan as an integral part of Cina. The two governments have reached the understanding that Indonesia only maintains economic and trade relations of non-government nature with Taiwan*”.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Survey, Vol. 49, Issue No. 4, University of California Press, United States, July/August 2009.

Bakrie, Connie Rahakundini, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2008.

Greenwald, Alyssa, "The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): A Legal Response To China's Economic Rise?", <http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?16+Duke+J.+Comp.+&+Int%27+L.+193>, diunduh pada tanggal 25 Agustus 2010.

Hegemoni Gopal Cina dan Peluang Kemanfaatan Bagi Indonesia, Biro Hubungan Internasional Deputi Seswapres Bidang Politik Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 2008.

<http://www.aseansec.org/13196.htm>, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2010.

Inayati, Ratna Shofi (ed.), *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)?*, LIPI Press, Jakarta, 2006.

Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Zhejiang, RRT pada Acara Signing Letter of Intent Friendship Cooperation antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang, RRT tanggal 19–22 Agustus 2010, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Banten, 2010.

Mursitama, Tirta N. dan Yudono, Maisa, *Strategi Tiga Naga Ekonomi Politik Industri Minyak Cina di Indonesia*, Kepik Ungu, Jakarta, 2010.

"Penandatanganan Plan of Action Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI-RRC", <http://www.deplu.go.id/beijing/Pages/Print.aspx?ListName=EmbassiesNews&IDP=12&CID=id-ID>, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2010.

S, Nuracini, *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Sungkar, Yasmin, *Strategi ASEAN dalam Perluasan ASEAN+3*, LIPI Press, Jakarta, 2005.

The Indonesian Quarterly Third Edition 2010 Vol. 38 No. 3, CSIS, Jakarta, 2010.

Transkrip FGD "Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Kemampuan, dan Ekonomi di Asia Tenggara", The Amaroossa Hotel-Bandung, 22 Agustus 2011.

Transkrip Seminar Bidang Perkembangan Politik Internasional P2P-LIPI "Indonesia di Tengah Pusaran Arus Perdagangan Bebas", Jakarta, 27 April 2010.

Tsunekawa, Jun (ed.), *The Rise of China: Response from Southeast Asia and Japan*, The National Institute for Defense Studies, Japan, 2009.

Wibowo, I. dan Hadi, Syamsul (ed.), *Merangkul Cina Hubungan Indonesia-Cina Pasca Soeharto*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.





BAB II

Dinamika Hubungan Ekonomi Asean-Cina

Ratna Shofi Inayati

A. PENGANTAR

Sebuah terobosan yang dilakukan oleh ASEAN dan Cina pada akhirnya terealisasi dalam bentuk komunitas perdagangan bebas melalui *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA). Walaupun ada keyakinan dalam jangka panjang FTA ini akan menguntungkan, beberapa industri seperti tekstil, mainan, dan sepeda motor dalam jangka pendek mengalami dampak negatif. Cina merupakan anggota *World Trade Organization* (WTO) dan relatif termasuk anggota baru, tetapi sudah menguasai pasar dunia. Ketika sistem kuota dihapuskan pada bulan Januari 2005, produk tekstil dan garmen Cina membanjiri pasar dunia. Tidak terkecuali pasar Indonesia juga dibanjiri produk Cina yang jauh lebih murah daripada produk domestik. Industri tekstil Indonesia yang belum lagi pulih dari kehancuran sebagai dampak krisis ekonomi 1997, sekarang harus berhadapan dengan gempuran produk Cina.

Ada pula kekhawatiran bahwa ACFTA bisa menurunkan lajunya proses *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tawaran FTA dari Cina dikawatirkan bisa mengganggu inti perdagangan yang tercakup dalam AFTA. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang meragukan motivasi Cina, apakah akan mengarah ke dominasi atau integrasi ekonomi.



ASEAN dalam mencapai integrasi ekonominya bisa terkendala bila membiarkan proses AFTA teralihkan oleh daya tarik ekonomi Cina yang mengesankan. Kekhawatiran ini semakin terasa ketika Cina memperlihatkan tujuan strategis yang jelas, sedangkan ASEAN belum mempunyai gambaran yang jelas untuk menempatkan dirinya dalam lingkungan baru kebangkitan Cina.

Meskipun skema ACFTA menggunakan nama ASEAN, hubungan yang dibangun lebih menekankan pada kesepakatan bilateral, misalnya antara Cina-Indonesia, Cina-Malaysia, Cina-Singapura, dan seterusnya. Bab ini memfokuskan pada dinamika hubungan ekonomi ASEAN-Cina. Selanjutnya, meskipun ACFTA merupakan fenomena interregionalisme (karena Cina dan ASEAN berada di kawasan yang dianggap berbeda), fenomena ini tetap merupakan FTA yang memiliki karakteristik layaknya regionalisme lain sehingga analisisnya pun tetap menggunakan pendekatan kawasan. Kesiapan menyambut dampak positif dan negatif dari terselenggaranya ACFTA menjadi problematika tersendiri yang menarik untuk dicermati, terutama di Indonesia sebagai salah satu subyek hukum internasional yang memiliki potensi *comparative advantage*. Investasi ke dalam dan ke luar negeri dalam konteks ACFTA merupakan peluang yang memiliki dua sisi yang berlawanan, menjanjikan atau justru merugikan. Indonesia dengan segala potensinya dihadapkan pada sebuah tantangan untuk dapat bertahan dan meningkatkan posisinya di kancah perdagangan dan investasi. Namun, bagi masyarakat di Indonesia, muncul pro-kontra tentang bagaimanakah kemampuan dan kematangan hukum investasi di Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas versi ACFTA ini.

B. KESIAPAN MENUJU PERDAGANGAN BEBAS

Saat ini Cina berperan sebagai lokomotif baru ekonomi dunia pada saat negara-negara maju tidak dapat menggali sumber pertumbuhan



baru dalam waktu dekat.¹ ACFTA adalah kendaraan penting untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua pihak dalam meningkatkan perdagangan, investasi, serta aliran barang dan jasa. Namun, sementara Cina sudah lebih siap ke arah liberalisasi, khususnya di bidang pertanian, ASEAN masih harus lebih menyamakan dan mengkoordinasikan langkahnya ke arah perdagangan bebas ASEAN-Cina.

Sejak tahun 1993 sampai 2003, laju pertumbuhan rata-rata untuk perdagangan ASEAN dan Cina adalah 20,8%. Sejalan dengan ini, kegiatan saling berinvestasi di antara keduanya juga meningkat. Dari tahun 1991–2000, investasi ASEAN di Cina meningkat dengan laju rata-rata 28% tiap tahun dan pada tahun 2001 mencapai 6,6% dari total investasi asing di Cina. Sebaliknya, investasi Cina di ASEAN pada tahun 2001 meningkat tajam, meskipun relatif kecil, dan mencapai 7,7% dari seluruh investasi Cina di luar.² Telah diperkirakan bahwa ACFTA akan meningkatkan ekspor ASEAN ke Cina sebesar 48% dan sebaliknya ekspor Cina ke ASEAN akan meningkat 55%.³ Meskipun model perkiraan ini tidak menampilkan angka ekspor keduanya ke pasar dunia, diyakini bahwa ACFTA juga akan memperkuat ekspor ASEAN dan Cina ke pasar dunia. Dengan dorongan dari pemerintah Cina dan adanya ACFTA, para ekonom optimis investasi perusahaan-perusahaan Cina di ASEAN akan meningkat. Berbagai perusahaan Cina bisa membangun pusat-pusat *Research and Development* (R&D) di negara-negara ASEAN yang sudah maju teknologinya dan sebagian lagi bisa berinvestasi pada proyek pengembangan sumber alam di negara-negara ASEAN yang memiliki banyak sumber daya alam.

¹ Developing ASEAN-China Relations: Realities and Prospects, A Brief Report on the ASEAN-China Forum, ISEAS, Singapore, 2004, hlm. 26.

² *Ibid.*, hlm. 27.

³ *Forging Closer ASEAN-China Economic Relations in the Twenty-First Century*, a report submitted by the ASEAN-China Expert Group on Economic Cooperation, October 2001, hlm. 31.



Dengan pertumbuhan ekonomi yang didorong investasi dan kekuatan konsumsi domestik, tantangan utama bagi ekonomi Cina di masa depan adalah kebutuhan mendesak untuk membangun institusi yang praktis, transparan, dan efektif yang mampu menetapkan dan melaksanakan aturan-aturan yang diperlukan agar ekonomi pasar berfungsi dengan baik. Di sisi lain, daya tarik Cina yang semakin kuat menimbulkan kesan posisi ASEAN semakin lemah. Oleh karena itu, di samping optimisme yang telah diuraikan di atas, muncul juga pandangan yang menganggap terlalu awal untuk memastikan keberhasilan yang substansial dari perjanjian perdagangan bebas. Penerimaan negara-negara ASEAN atas pendekatan dan tawaran Cina untuk lebih meningkatkan kerja sama tidak bisa dikatakan sepenuh hati, terlepas dari persetujuan di tingkat pimpinan. Langkah-langkah inisiatif Cina di bidang ekonomi tidak dapat menghapus kenyataan bahwa Cina dan hampir semua anggota ASEAN sebenarnya bersaing di pasar ekspor dunia.



Lebih lanjut, ASEAN juga menyadari persaingannya dengan Cina dalam menarik investasi asing. Masalahnya adalah meluasnya keyakinan bahwa banyak investor meninggalkan ASEAN dan berpaling ke Cina. Meskipun pemberitaan merosotnya investasi asing di ASEAN kadang-kadang agak berlebihan, persepsi yang muncul di Asia Tenggara adalah bahwa mengalirnya investasi asing ke Cina menimbulkan dampak negatif bagi wilayah di sekitarnya. Persepsi ini mendorong tumbuhnya rasa terancam di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Meskipun ASEAN-Cina FTA diyakini bisa memperluas perdagangan, wilayah perdagangan bebas yang demikian luas dapat menciptakan biaya yang tidak sedikit menyangkut ketentuan asal barang serta pengawasan dan implementasi administrasinya. Selanjutnya, hal ini bisa menimbulkan kerumitan ketika beberapa anggota ASEAN dan Cina terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas yang terpisah sekaligus saling tumpang tindih. Jadi, keinginan



untuk meningkatkan kerja sama sebenarnya dibarengi dengan kesadaran bahwa akan ada tantangan yang muncul dari pembentukan wilayah perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina. Dengan struktur industri yang hampir sama di antara keduanya, persaingan juga akan meningkat di pasar domestiknya masing-masing. Oleh karena itu, penghapusan hambatan perdagangan yang merupakan mekanisme penciptaan wilayah perdagangan bebas, juga mengakibatkan hilangnya pendapatan dari tarif dan ancaman bagi industri domestik.

C. POSISI STRATEGIS ASEAN BAGI CINA



Hubungan antara ASEAN dan Cina sebenarnya secara positif sudah terjalin semenjak tahun 1990-an atau sejak ASEAN diakui Cina sebagai suatu komunitas yang menjanjikan di bidang perekonomian. Meskipun pada waktu itu hubungan antara ASEAN dan Cina terjalin hanya melalui perjanjian bilateral antara Cina dan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN secara individual, Cina telah menancapkan pondasi kegiatan perekonomian yang kuat. Dalam kegiatan-kegiatan ASEAN di bidang perekonomian, sering kali Cina hadir sebagai pihak yang diundang atau bahkan menjadi konsultan ekonomi bagi aktivitas perekonomian ASEAN. Strategi ini berdampak pada eksistensi Cina dalam kawasan ASEAN sebagai subyek yang turut serta dalam perkembangan perdagangan internasional kawasan. Jadi, adalah suatu kewajaran bila Cina kemudian mendorong adanya perdagangan bebas antara ASEAN-Cina karena pengalamannya berdagang di kawasan Asia Tenggara sekaligus penerimaan ASEAN demi kemudahan investasi.⁴

Guna mewujudkan tekadnya memperkuat perekonomian, Cina lebih berkepentingan menjalin hubungan yang lebih erat dengan

⁴ *Forging Closer ASEAN-China Economic Relations in the Twenty-First Century*, a report submitted by the ASEAN-China Expert Group on Economic Cooperation, October 2001, hlm. 5-7.



ASEAN. Tahun 2000 *Gross Domestic Product* (GDP) Cina sebesar US\$ 1,08 triliun, terpaut jauh dari Jepang yang mencapai US\$ 4,14 triliun (tahun 2001) dan Amerika Serikat US\$ 8,35 triliun (tahun 1999). Akan tetapi, Cina bersemangat membuat target bahwa dalam 20 tahun ke depan GDP-nya akan mampu menyamai Jepang, menjadi sekitar US\$ 5 triliun. Pertumbuhan GDP Cina sebesar 8–9% per tahun selama ini adalah salah satu bukti tekadnya dalam mewujudkan target GDP yang dikehendaki. Untuk itu berbagai kebijakan dan cara ditempuh Cina dalam mengantisipasi berbagai faktor internal maupun eksternal, yaitu hubungan bersahabat Cina dengan negara-negara lain. Seperti dikemukakan Tan Weiwen bahwa:⁵

“Basis kebijakan hubungan luar negeri Cina adalah lima prinsip hidup berdampingan secara damai, seperti terkandung dalam Konferensi Asia Afrika 1955. Hubungan diplomatik internasional Cina selalu memegang prinsip ini. Sebetulnya, prinsip hubungan luar negeri Cina sama dengan Indonesia, yaitu bebas dan aktif serta mengutamakan perdamaian.”

Pada tahun 1994, Cina menjadi mitra dalam ARF dan sejak tahun 1996 menjadi mitra dialog ASEAN. Sementara itu, pada tahun 2001 Cina mengusulkan adanya perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina. Pada waktu itu, Cina mengusulkan suatu kawasan perdagangan bebas FTA dengan ASEAN dalam konsep *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) yang ditargetkan akan terwujud pada tahun 2010. Kesepakatan ACFTA ditandatangani bersama pada KTT ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2001.

Dari proses penyusunan dan penandatanganan perjanjian itu, tampaknya Cina lebih bersemangat dan berharap mendapat keuntungan dari perjanjian ASEAN-Cina tersebut. Dari kenyataan tersebut terkesan bahwa ASEAN lebih bernilai strategis bagi Cina dibandingkan dengan nilai strategis Cina bagi ASEAN. Bahkan pada

⁵ Wawancara dengan Tan Weiwen, Councillor for Trade and Commerce, Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina, di Jakarta, 2006.



tahun 2003, Cina menjadi pihak di luar ASEAN yang pertamakali menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama (*Treaty of Amity and Cooperation /TAC*), baru kemudian Jepang dan Korea Selatan menyusul menandatangani TAC. Kesan tersebut semakin diperkuat dengan keputusan Cina melunakkan sikapnya mengenai Laut Cina Selatan dengan menandatangani *The Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South China Sea* di Kamboja pada tahun 2002.⁶ Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, Cina mengambil sikap tegas dan kaku menghadapi negara-negara lain dalam soal Laut Cina Selatan. Dalam hal ini, Cina berusaha menghindari konflik langsung dengan Amerika Serikat.

Sementara itu, faktor internalnya adalah para pemimpin Cina yang mentransformasikan modal menjadi kesempatan untuk mendorong elitee dan masyarakatnya bersikap produktif dan mengerjakan berbagai hal dalam standar internasional. Oleh karena itu, berbagai acara dan *event* internasional digelar di Cina, seperti *Asian Games* tahun 2003, Olimpiade tahun 2008, dan Pameran Dunia tahun 2010. Rakyat Cina memperkuat diri dengan bekerja keras. Akibatnya, negeri yang berpenduduk satu miliar jiwa ini bagai pabrik raksasa karena semua orang mau dan berusaha untuk bekerja keras memproduksi barang. Kini Cina adalah negara paling produktif di seluruh dunia dan hasilnya dapat dilihat di pasaran dunia. Di samping itu, desain dan harga dibuat menarik sehingga produk-produk Cina bisa bersaing dengan produk negara-negara lain. Barang-barang dari Cina membanjiri negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di setiap sudut pasar Indonesia, produk Cina berani bersaing karena murah, seperti sepeda motor, *Air Conditioner* (AC), dan tekstil. Kini banyak pengusaha dalam negeri terancam serbuan barang-barang dari Cina.

⁶ Ong Keng Yong, "Securing a Win-Win Partnership for ASEAN and China", ISEAS, Singapore, 2005, hlm. 21.



Secara nyata kini dan di masa depan, Cina akan terus membutuhkan energi serta bahan mentah untuk produksinya yang besar. Merupakan kebutuhan amat riil untuk bebas menjual produknya ke suatu wilayah dan mendapatkan suplai bahan baku dan energi. Oleh karena itu, ASEAN menjadi mitra strategis bagi kepentingan Cina.

Lalu, bagaimana negara-negara ASEAN menangkap peluang dari Cina? Negara-negara ASEAN sudah lama mengidealkan integrasi ekonomi dan perdagangan bebas sebagai alat untuk meningkatkan daya saing. Hal ini merupakan tuntutan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta untuk mewujudkan pembangunan yang setara dan inklusif di dalam ASEAN dan dengan negara-negara mitra.

Pembangunan pesat Cina menjanjikan keuntungan karena membutuhkan bahan baku dan energi dari negara-negara ASEAN. Selain pasar bahan baku, Cina juga merupakan pasar potensial bagi produk-produk dari ASEAN. Namun, kebutuhan nyata untuk menopang integrasi ekonomi dan perdagangan bebas tampaknya belum sejelas dan sekuat seperti kebutuhan riil Cina. Sebagai produsen bahan baku dan energi, negara ASEAN akan diuntungkan. Akan tetapi, sebagai produsen barang-barang manufaktur, Cina akan lebih diuntungkan daripada ASEAN.

Pertumbuhan Cina yang sangat pesat menjadi salah satu perhatian dunia. Banyak negara beserta para ahlinya (khususnya di wilayah Asia Timur dan Tenggara) secara terus-menerus mencoba membuat analisa dampak jangka panjang dari munculnya kekuatan baru tersebut. Kalangan bisnis juga berusaha melakukan penyesuaian dengan gerak perubahan ini dan berpikir agar bisa mengambil manfaat dari terbentuknya ASEAN-Cina FTA. Meskipun bisa diperkirakan dampak negatifnya, saat ini fokus utamanya adalah peluang besar dari pertumbuhan di Cina. Bagaimanapun juga, bangkitnya kekuatan ekonomi Cina adalah perkembangan yang tidak bisa diabaikan. Dengan



demikian, ASEAN dan Cina bersama-sama berharap akan bisa saling memperoleh keuntungan dari pengembangan hubungan mereka.⁷

D. ASEAN MENYAMBUT KERJA SAMA DENGAN CINA

Ada beberapa kondisi ekonomi Cina yang secara umum merupakan faktor daya tarik bagi ASEAN dalam menyambut tawaran FTA dari Cina. *Pertama*, ASEAN memandang Cina sebagai pasar yang berpotensi dengan luas wilayah dua kali wilayah ASEAN dan penduduk 1,3 milyar. Daya beli di Cina yang semakin kuat dan pasarnya yang semakin terbuka membuka peluang bagi ekspor ASEAN yang selama ini mengalami kesulitan karena rendahnya tingkat perdagangan intra-ASEAN. *Kedua*, ekonomi Cina bisa lebih komplementer dengan ekonomi ASEAN dibandingkan intra-ekonomi ASEAN sendiri. Sebenarnya, Cina sendiri memiliki sistem industri yang hampir lengkap. Dengan masuknya Cina dalam komunitas ekonomi global, ASEAN bisa ikut ambil bagian dalam rantai produksi Cina. Sebaliknya, pertumbuhan di Cina yang membutuhkan semakin banyak energi dan mineral bisa dipenuhi oleh negara-negara ASEAN yang kaya akan sumber energi tersebut. *Ketiga*, ASEAN bisa memanfaatkan kebangkitan ekonomi Cina yang kekuatan ekspornya juga diimbangi kekuatan pasar domestiknya. Sekarang Cina menjadi mitra dagang yang semakin penting bagi negara-negara Asia. Mitra dagang utama Jepang bukan lagi Amerika, tetapi Cina. Jika pada masa lalu kebangkitan ekonomi Jepang membawa serta kebangkitan ekonomi ASEAN, sekarang hal yang sama diharapkan dari kebangkitan ekonomi Cina.

Pada dasarnya, negara-negara *Plus Three* (Jepang, Korea Selatan, dan Cina) mempelajari kemungkinan FTA dengan ASEAN. Namun dalam hal ini, Cina merupakan pihak yang paling siap melakukannya dan ASEAN segera menyambutnya. Ada dua pertimbangan mengapa ASEAN tidak menunggu kesiapan Jepang dan Korea Selatan. *Pertama*,

⁷ *Ibid*, hlm. 277.



sepertinya Jepang memiliki kualifikasi yang cukup untuk pemererat kerja sama ekonomi dengan ASEAN. Walaupun ekonomi Jepang dalam situasi tidak menguntungkan dalam sepuluh tahun terakhir, tetapi sebenarnya GDP Jepang masih menduduki urutan kedua tertinggi di dunia dan beberapa industrinya masih unggul di pasar global. Namun krisis ekonomi 1997 semakin memperburuk kondisi ekonomi Jepang sehingga ia harus menarik investasinya di beberapa negara Asia dan mengatasi dilema ekonomi domestik dengan mendevaluasi mata uangnya. Dalam situasi demikian, kekuatan ekonomi Jepang untuk memimpin dan mendorong ekonomi Asia menurun drastis. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa Jepang sendiri tidak bisa menyangga tugas besar, yaitu mengintegrasikan ekonomi Asia. *Kedua*, memang diakui Korea Selatan cukup berhasil dalam pemulihan ekonomi sejak krisis dibandingkan dengan negara lain. Bahkan secara bertahap Korea Selatan berusaha mengatasi persoalan dalam struktur ekonomi, sistem perbankan, dan korupsi. Namun semua ini tidak cukup bagi Korea Selatan untuk bisa memimpin integrasi ekonomi Asia karena skala ekonominya yang relatif kecil.

Di samping pertimbangan ekonomi, aspek politik juga ikut menyumbang dalam perubahan kebijakan negara-negara Asia Tenggara terhadap Cina, antara lain: (1) pentingnya melibatkan Cina dalam mengatasi potensi konflik intraregional; (2) perlunya menyeimbangkan kekuatan di kawasan yang selama ini didominasi Amerika Serikat dan Jepang; dan (3) kebutuhan akan kekuatan suara yang lebih besar dalam forum internasional mengingat ASEAN dan Cina mempunyai kesamaan pandangan.

Dalam konteks ACFTA, pertanyaan penting yang belum bisa segera dijawab adalah apakah komplementaritas akan mengungguli kompetisi di antara keduanya. Salah satu tujuan utama membentuk kawasan perdagangan bebas adalah memanfaatkan komplementaritas yang ada. Namun masih diperlukan waktu untuk menjawab

secara pasti pertanyaan di atas. Untuk sementara, paling tidak kita bisa melihat arah perkembangan perdagangan antara ASEAN dan Cina selama ini sebagai indikasi kepentingan FTA. Walaupun tidak sebesar dan sepenting perdagangan ASEAN dengan Amerika Serikat atau Jepang, perdagangan ASEAN dengan Cina meningkat pesat belakangan ini. Bahkan, krisis ekonomi 1997 tidak menyurutkan perdagangan antara keduanya.⁸

Pada kenyataannya, diplomasi Cina pada masa reformasi berhasil membangun hubungan baik dengan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan regional pun semakin bisa menerima kehadiran Cina. Ditambah lagi, keberadaan Cina dalam arena global yang dengan cepat bisa bertahan dalam lingkungan yang semakin banyak tantangannya.

Dengan ditetapkannya ACFTA sebagai bagian integral dari hubungan ekonomi ASEAN-Cina ke depan, pertanyaan berikutnya adalah keuntungan apa yang akan diperoleh dari inisiatif ini. Bagaimana ASEAN akan menghadapi dominasi Cina di bidang ekonomi mengingat Cina memiliki populasi, GDP, dan angka perdagangan yang tinggi? FTA ini akan menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dalam konteks jumlah penduduk dan mencakup negara-negara berkembang yang tingkat pembangunannya masih beragam. Pada prinsipnya, dalam suatu FTA, penghapusan hambatan tarif bisa memperluas perdagangan karena biaya akan turun dan efisiensi ekonomi meningkat.

E. HUBUNGAN YANG SALING MENGUNTUNGKAN

Sejak krisis ekonomi melanda Asia tahun 1997, negara-negara ASEAN berusaha keluar dari krisis dengan melakukan upaya pemulihan ekonomi domestik masing-masing dan memperkuat integrasi

⁸ Ong Keng Yong, "Comprehensive Integration Towards The ASEAN Community", pidato Sekjen ASEAN pada APEC Ministerial Meeting, Santiago, 18 November 2004.



ekonomi regional. Namun, upaya integrasi ASEAN ke dalam sulit dijalankan karena beban yang masih ditanggung masing-masing negara akibat krisis sehingga diperlukan kekuatan pendorong dari luar ASEAN. Di samping itu, ASEAN sebagai satu entitas regional masih memiliki berbagai keterbatasan, antara lain tingkat pertumbuhan yang rendah jika dibandingkan dengan NAFTA (*North America Free Trade Arrangement*) dan Uni Eropa. Pada tahun 2000, GDP ASEAN mencapai US\$ 581,58 miliar, sedangkan NAFTA dan Uni Eropa masing-masing sudah mencapai US\$ 11.059,93 miliar dan US\$ 7.894,52 miliar.⁹ Singapura adalah anggota yang paling maju ekonominya di ASEAN, namun tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ASEAN secara keseluruhan. Ditambah lagi dengan pasar yang kecil dan tingkat perdagangan intra-ASEAN yang rendah. Sebagai perbandingan, pada tahun 2000, perdagangan intra-ASEAN hanya mencapai 24,1%, sedangkan NAFTA dan Uni Eropa sudah mencapai 47% dan 60,4% dari masing-masing perdagangan totalnya.¹⁰ Faktor lain yang tidak menguntungkan adalah komplementaritas yang rendah dalam profil ekonomi ASEAN. Di antara negara anggota ASEAN belum tercermin diversifikasi industri sehingga tidak bisa menarik manfaat dari komplementaritas ekonomi regional. Di antara negara anggota ASEAN masih terdapat kesamaan dalam struktur ekonomi dengan sumber-sumber ekonomi yang sama pula sehingga sulit untuk mengembangkan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, sektor pertanian adalah salah satu andalan yang dimiliki banyak negara anggota sehingga tidak terjadi permintaan produk pertanian di antara mereka. Bahkan mereka harus bersaing dalam merebut pasar asing. Dari aspek ekonomi, berbagai faktor keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN maupun ASEAN sebagai satu entitas tidak mampu menjadi

⁹ *The World Bank World Development Indicators, 2000.*

¹⁰ *WTO International Trade Statistics, 2001.*



pendorong untuk memulihkan kekuatan ekonomi regional. Oleh karena itu, ASEAN harus berintegrasi dengan kawasan yang lebih luas dan lebih kuat ekonominya, yaitu Asia Timur. Dalam hal ini, Cina yang aktif mendekati ASEAN dan menawarkan FTA lebih dahulu, baru kemudian Jepang dan Korea Selatan.

Di samping itu, kondisi dalam negeri Cina mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu. Pada saat krisis moneter terjadi di Asia, kondisi Cina sarat dengan korupsi dan kapitalisme perkoncoan, tetapi tidak terseret ke dalam krisis. Apakah resep jitu Cina?

Pada saat negara Asia lain dipaksa menaikkan suku bunga dalam situasi krisis, Cina tetap bisa bebas menurunkan suku bunganya tanpa harus cemas mata uangnya akan terdevaluasi karena negara ini menerapkan sistem nilai tukar tetap (*fixed*). Hal ini menyebabkan mata uang yuan tidak konvertibel terhadap dolar AS. Memang prosedur yang diterapkan dalam pengendalian nilai tukar tersebut dapat membuka peluang terjadinya korupsi, tetapi tidak menghalangi Cina melancarkan manuver kebijakan yang tidak dipunyai oleh negara-negara Asia lain dalam menghadapi krisis. Padahal, kebebasan melancarkan manuver kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat membangun kembali perekonomian Asia.

Sampai saat ini *sustainability* dari proses reformasi ekonomi Cina tampak berjalan dengan lancar dan cukup berhasil. Yang menarik adalah proses reformasi ekonomi Cina dapat dilaksanakan tanpa mengubah sistem politiknya. Setelah negara ini lebih terbuka, investasi berdatangan dari seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan seperti Oracle, Microsoft, IBM, Intel mendirikan pusat-pusat riset di Cina dengan menggunakan teknisi Cina untuk pengembangan produk jangka panjang. Dalam bidang teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa Cina tergolong lebih maju dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Cina juga mengklaim sebagai pemimpin di bidang tertentu, seperti *digital media*, *voice-recognition*, dan *voice-synthetic technology*.



Masalah persaingan dalam menarik modal merupakan kecemasan bagi negara-negara ASEAN karena daya tarik Cina jelas jauh lebih kuat bagi investor asing. Kekhawatiran ini mendapat tanggapan positif dari Cina dengan menawarkan wilayah perdagangan bebas (*free-trade zone*) antara Cina-ASEAN. Pada akhirnya tahun 2001 di Brunei Darussalam, ASEAN-Cina telah menyepakati rencana perdagangan bebas dalam sepuluh tahun mendatang.

Kesepakatan tersebut kemudian dilanjutkan ke pertemuan ASEAN-Cina di Nusa Dua Bali pada bulan Oktober 2003. Pada saat itu, telah dijalin kemitraan strategis untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bersama. Kesepakatan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis untuk Perdamaian dan Kemakmuran (*Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity*) oleh Perdana Menteri Cina Wen Jiabao dengan sepuluh negara anggota ASEAN.¹¹ Dalam deklarasi disebutkan, di bidang politik kedua pihak akan memperdalam pemahaman serta persahabatan antara rakyat ASEAN dan Cina dan memainkan peran dialog dan mekanisme konsultasi pada berbagai tingkatan. Di bidang ekonomi, keduanya akan memperkuat pasar dan jaminan momentum pertumbuhan yang berjalan pesat pada hubungan ekonomi dan perdagangan ASEAN-Cina. Selanjutnya, ASEAN-Cina *Free Trade Zone* menjadi tulang punggung kerja sama keduanya menuju tahun 2010 yang kerja samanya disepakati di Vientianne, Laos pada tahun 2004.

Untuk menarik manfaat dari kerja sama ASEAN-Cina, Indonesia patut berbenah diri untuk tidak kalah dalam persaingan. Di tengah semua keunggulan Cina, tentunya banyak pula kekurangan yang dimilikinya sehingga masih ada peluang yang perlu kita tangkap supaya kerja sama ini berimbang dan tidak didominasi Cina. Selain itu dalam

¹¹ Saw Swee-Hock, "An Overview of ASEAN-China Relations", ISEAS, Singapore, 2005, hlm.1–30.

lingkungan yang dinamis seperti sekarang, tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri kuat tanpa mempertimbangkan interdependensi.

Ide pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Cina pertama kali muncul dalam pertemuan informal ASEAN+3 di Singapura pada tahun 2000. Pada waktu itu pemimpin negara-negara ASEAN merasa khawatir akan dampak masuknya Cina ke dalam WTO. Mereka berpikir bahwa Cina akan semakin kompetitif dalam menarik investasi asing dan ASEAN harus bersaing lebih ketat dengan Cina dalam merebut pasar ekspor. Oleh karena itu, kekhawatiran ini secara khusus dilontarkan kepada perdana menteri Zhu Rongji dengan mengusulkan dilakukannya studi bersama mengenai dampak masuknya Cina ke dalam WTO.¹² Ternyata Zhu Rongji tidak hanya menyetujui usulan tersebut, bahkan lebih jauh mengusulkan dilakukannya studi kelayakan tentang kemungkinan perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina. Pertimbangannya adalah sesudah Cina menjadi anggota WTO, pasar Cina akan semakin terbuka. Sementara itu, bagi ASEAN yang sedang melaksanakan AFTA, tidaklah mustahil untuk melakukan pengaturan perdagangan antara kedua pihak. Di satu sisi ASEAN bisa menarik keuntungan dari liberalisasi dan pertumbuhan tinggi di Cina dan di sisi lain Cina bisa memperluas hubungannya dengan ASEAN dengan memanfaatkan mekanisme AFTA untuk memperluas pasar dan investasi di masa depan. Oleh karena itu, saat Zhu Rongji secara resmi mengusulkan ASEAN-Cina FTA pada pertemuan ASEAN+1 tahun 2001, ASEAN menyambut positif tawaran tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat secara berkelanjutan mengharuskan Cina memastikan bisa memperoleh cukup pasokan energi dan bahan mentah. Dalam hal ini, negara-negara ASEAN yang kaya sumber alam dipandang sebagai pemasok yang penting.

¹² Panitchpakdi Supachai & Mark L. Clifford, *China and the WTO*, John Wiley & Sons, Singapore, 2002, hlm. 25.



ASEAN dan Cina sama-sama menghadapi tekanan dari semakin luas dan dalamnya integrasi ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika. Dari waktu ke waktu, anggota Uni Eropa semakin bertambah dan diperkirakan integrasi ekonominya akan semakin kuat. Demikian pula dengan Amerika yang bertekad memperluas integrasi daratan Amerika Utara dan Selatan dengan menggunakan NAFTA sebagai landasan. Bila dua kawasan ini berhasil memperdalam dan memperluas integrasi ekonominya, akan terjadi diskriminasi terhadap negara dan kawasan yang tidak termasuk di dalamnya. Tidak mustahil ekspor Cina akan mengalami diskriminasi yang semakin nyata. Lagipula, investasi asing akan mengalir ke kedua kawasan tersebut untuk mengambil keuntungan dari tarif khusus dan skala ekonomi bagi produksi dengan pasar yang besar dan terintegrasi.



Di samping motivasi ekonomi, dalam hal membangun kerja sama lebih kuat dengan ASEAN, strategi Cina juga mencakup pertimbangan politik dan keamanan. Menyadari masih banyaknya negara tetangga yang curiga atas kebangkitan Cina dan pasang-surutnya hubungan Cina-Amerika, pemimpin Cina berusaha melancarkan kebijakan memelihara hubungan bertetangga dengan baik dan ramah. Bagaimanapun kuatnya Cina, strategi yang agresif tidak akan menguntungkannya, karena justru akan menjauhkan Cina dari para tetangganya. Oleh karena itu, Cina melancarkan strategi perdamaian terhadap negara-negara di kawasan sehingga Cina bisa menikmati terciptanya lingkungan strategi regional yang aman.

Pada praktiknya, ekspor Cina masih sering mengalami hambatan nontarif di pasar Amerika dan Uni Eropa meskipun Cina sudah masuk dalam WTO. Oleh karena itu, Cina dengan kekuatan manufakturnya ingin memperluas pasar ekspornya untuk mengurangi resiko tersebut dan ASEAN menjadi pasar yang semakin penting bagi ekspor Cina. Pada tahun 1993, Cina menduduki urutan kelima dalam impor ASEAN dengan mengambil 1,9% dari total impor ASEAN. Tahun

2000 Cina sudah mengambil 5,2% bagian dari impor ASEAN dan menduduki urutan keempat.¹³ Neraca perdagangan ASEAN-Cina sampai tahun 2009 telah mengalami peningkatan seperti digambarkan pada Tabel 3.¹⁴

Tabel 3. Neraca Perdagangan ASEAN-Cina

	2006	2007	2008	2009
ASEAN	926,5	4.028,4	1,855,7	4.536,6
Cina	31,5	28,9	139,6	65,5

Sumber: Kemendag, 2009.

Cina dan ASEAN menciptakan “*the world’s biggest free trade area*” pada tanggal 1 Januari 2010 dengan total GDP keduanya sebesar US\$ 6,6 triliun. Perdagangan intraregional di kawasan meningkat 20% per tahun. Perdagangan ASEAN-Cina dengan negara-negara lain di dunia sudah mencapai US\$ 4,3 triliun atau sama dengan 13,3% dari perdagangan dunia. Total pasar 1,9 miliar konsumen dan pendapatan per kapita rata-rata US\$ 2.000–5.000. Tren berubah karena pertumbuhan kelas menengah di “*emerging markets*” (kategori pendapatan antara US\$ 6.000–30.000). Cina telah melampaui Amerika menjadi mitra dagang ketiga terbesar ASEAN. Dalam tiga sampai lima tahun, Cina akan melampaui Jepang dan Eropa menjadi mitra dagang nomor 1.

F. INDONESIA MENGHADAPI ACFTA

Sejak ACFTA efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, perdagangan antara ASEAN dengan Cina meningkat. Namun, kesepakatan ACFTA memberikan dampak tidak simetris terhadap neraca perdagangan negara-negara ASEAN, khususnya ASEAN-5 yang terdiri atas

¹³ *ASEAN Statistical Yearbook 2001*.

¹⁴ Kemendag, 2009.

Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mengalami defisit perdagangan dengan Cina.

Tujuan diselenggarakannya ACFTA adalah: (1) memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota; (2) meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi; (3) menggali bidang-bidang kerja sama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota; (4) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam–CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.¹⁵ Di samping itu, ACFTA membuka akses pasar yang selebar-lebarnya sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang lebih kurang sama besarnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan melalui proses negosiasi yang dilakukan dengan cara *request* dan *offer*. Dalam proses negosiasi ini tentunya tidak ada pihak yang mau membuat persetujuan kalau dia dirugikan. Jadi, ketika negara-negara ASEAN mulai berunding dengan Cina, harus dibuat penelitiaan yang mendalam dan telitei terlebih dahulu, seberapa besar kira-kira keuntungan yang akan diperoleh, dan di bidang mana saja akan untung atau rugi, serta pada negara ASEAN mana keuntungan atau kerugian akan lebih besar. Tidak cukup hanya dengan melihat potensi pasar Cina yang besar, tetapi apakah memang ada kemungkinan untuk meningkatkan ekspor ke sana. Juga, tidak cukup dengan membuat analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA)¹⁶ karena, *pertama*, jenis analisis ini

¹⁵ Dokumen ASEAN-China: *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity. Article 5.*

¹⁶ *Ibid.*



sifatnya *statis*, kita hanya melihat posisi pada tahun tertentu saja atau paling jauh *comparative static*. *Kedua*, kalau misalnya Indonesia bisa ekspor kelapa sawit ke Cina, tidak berarti bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif terhadap Cina. Cina tidak mempunyai kelapa sawit akibat iklimnya yang tidak cocok untuk menanam kelapa sawit. Selain itu, keuntungannya tidak akan banyak kalau Indonesia hanya sekedar mampu mengekspor bahan mentahnya saja karena *value added*-nya rendah. Hal yang harus dikejar adalah ekspor barang-barang hasil olahan industri yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Untuk impor bahan-bahan mentah yang tidak terdapat di dalam negeri, biasanya tidak dikenakan tarif (tarifnya nol). Bagi jenis barang yang tarifnya nol atau rendah, suatu persetujuan perdagangan bebas tidak ada gunanya karena memang sudah bebas. Sebagai bagian integral dari persetujuan ini juga ada persetujuan mengenai *Early Harvest Programme* di bidang pertanian yang sudah mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2003.

Dampak asimetris ACFTA juga terjadi secara nasional, yaitu terdapat daerah di Indonesia yang mengalami kerugian, khususnya daerah-daerah industri di Jawa yang menghasilkan barang sejenis (bersifat substitusi) dengan barang asal Cina. Sementara itu, daerah di luar Jawa menikmati manfaat dari ACFTA dalam posisinya sebagai sentra produk primer untuk pertambangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan lainnya. Secara umum, produk Indonesia kalah bersaing dengan produk impor asal Cina, sementara struktur industri Indonesia relatif sama dengan Cina sehingga menghasilkan barang yang sama dengan yang dihasilkan oleh industri di Cina. Selain itu, ketergantungan ekspor Indonesia terhadap komoditi primer, seperti kakao, kopi, rumput laut, dan nikel yang bernilai tambah rendah, relatif tinggi dibandingkan dengan impor dari Cina yang didominasi oleh barang elektronik, mesin, dan tekstil yang bernilai tambah tinggi.



Saat ini, terdapat kecenderungan kenaikan impor ke Indonesia terhadap buah-buahan dari Cina, dengan proporsi impor buah sekitar 51% terhadap impor buah dari semua negara. Barang utama yang diimpor Indonesia berupa mesin aplikasi (20% dari total impor mesin aplikasi dari semua negara), elektronik (40% dari total impor elektronik dari semua negara), dan produk tekstil (10%–60% dari total impor elektronik dari semua negara). Sementara itu, impor dari ASEAN berupa aplikasi 22%, kendaraan bermotor 38%, dan produk tekstil 5–50%. Untuk produk pertanian, bea masuk sudah bebas sejak tahun 2004 dan pada tahun 2010 hampir semua produk pertanian sudah bebas. Sementara itu, produk tekstil, mesin, dan elektronik akan bebas bertahap mulai tahun 2010 sampai 2018.¹⁷

Barang-barang produksi Cina yang sejak lebih kurang 20 tahun terakhir ini membanjiri pasar dunia terutama karena harganya yang sangat murah, dan dapat dikatakan tidak ada negara lain yang bisa menandinginya, baik negara maju maupun negara berkembang. Jika dahulu Cina adalah negara yang tertutup di balik *tirai bambu*, sekarang Cina telah menjadi negara yang ekonominya terbuka. Sangat sulit untuk menjawab dengan tuntas sebab-sebab sangat murah nya harga barang-barang buatan Cina. Murah nya barang-barang asal Cina adalah suatu fenomena yang tidak bisa dilawan oleh negara manapun di dunia.¹⁸ Dalam kenyataannya, produk-produk Cina yang sering disebut sebagai ancaman bagi produk lokal negara-negara ASEAN seperti tekstil, buah-buahan, dan sayur-mayur bukanlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan besar di Cina. Produk tekstil yang membanjiri sebagian negara ASEAN termasuk Indonesia didatangkan oleh pedagang yang tidak memiliki komitmen bisnis jangka panjang. Pendekatan bisnis para pedagang ini tentu saja membawa dampak negatif pada kredibilitas produk-produk Cina.

¹⁷ Kajian Ekonomi Regional Jakarta, Triwulan IV, Kemendag, 2009.

¹⁸ Tarmidi, L.T., "ACFTA Sudah Terlanjur", *Kompas*, 22 Januari 2010.



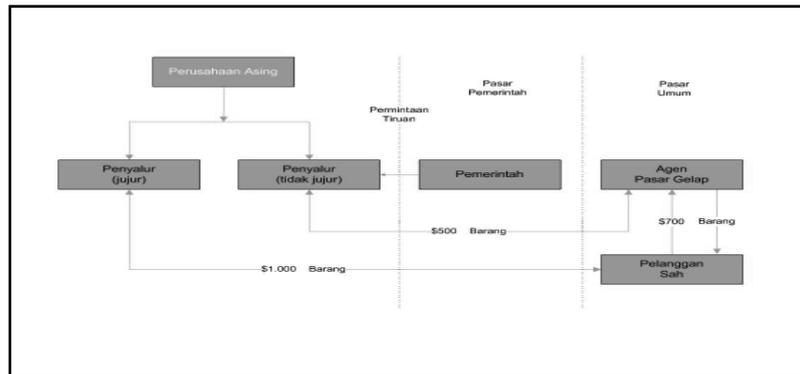


Produk-produk asal Cina seperti elektronik, sepeda motor, dan bahkan mobil, ketika pertama kali memasuki pasar Indonesia, langsung diserbu konsumen. Namun, mereka segera menyadari bahwa produk itu sangat rendah mutunya. Selain itu, tidak ada jaringan pelayanan purna jual yang disiapkan oleh para pedagang yang memang lebih mementingkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Setelah konsumen menyadari kenyataan ini, produk dari Cina kalah bersaing dengan produk Jepang yang memang sudah didukung oleh jaringan layanan purna jual yang sudah berjalan secara efektif.

Untuk membangun sistem distribusi barang-barang ekspor, perlu dipahami tantangan yang dihadapinya. Produk dari satu negara dapat memasuki negara lain melalui dua jalur, yaitu jalur resmi dan tidak resmi yang dikenal dengan "*honest distributor*" dan "*dishonest distributor*". Dalam pasar IT (*information technology*) Indonesia, misalnya, *parallel import* (PI), yaitu produk teknologi tinggi yang dibeli pedagang di luar negeri dan masuk ke Indonesia tanpa membayar pajak. Hal ini berbeda dengan produk yang didatangkan melalui jalur logistik resmi dan perusahaan besar. Jalur resmi secara otomatis akan meningkatkan harga jual karena mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan layanan purna jual.

Mayoritas produk-produk dari Cina, baik yang berteknologi tinggi maupun produk padat karya termasuk buah-buahan, dimasukkan melalui jalur tidak resmi. Hal ini yang membuat harga jual di pasaran demikian rendah dan mengancam produk lokal. Jadi, karakteristik perdagangan Indonesia-Cina dalam kerangka ACFTA lebih merupakan kesibukan para perantara, mereka yang memperdagangkan produk dari satu negara ke negara lain, dan bukan produsen.

Meskipun Cina sudah mampu membuat banyak jenis barang manufaktur, tetapi tingkat kualitas, kecanggihan, dan presisinya belum setingkat dengan produk-produk dari negara-negara maju. Mereka juga tidak perkasa di semua bidang, bahkan bisa dikalahkan



Sumber: KPMG, diolah.

Gambar 1. Sistem Distribusi Barang Ekspor

di pasar Indonesia. Ketika krisis moneter tengah melanda Indonesia, Indonesia pernah diserbu sepeda motor Cina yang harganya sangat murah. Pada waktu itu, ada lebih dari 100 merek yang dirakit dan beredar di Indonesia, tetapi kini hanya tinggal beberapa perusahaan saja yang masih produksi dan jumlah produksinya juga sangat kecil. Sejak beberapa tahun yang lalu, ada perusahaan lokal yang merakit mobil Cina seperti Geely, Cherry, Great Wall, dan truk Foton. Namun, jumlah produksinya masih kecil. TV, lemari es, dan AC buatan Cina juga agak sulit masuk di pasaran Indonesia kalau melalui jalur resmi.¹⁹

Problematika yang muncul kemudian adalah konteks kesiapan Indonesia dalam ACFTA ini terutama dalam menyediakan sarana keteraturan di bidang hukum investasi. Dengan dibukanya pintu perdagangan bebas versi ACFTA ini, Indonesia diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi investor untuk memasukkan modalnya ke Indonesia. Kemudahan ini menjadi ukuran pasti karena Indonesia

¹⁹ Tarmidi, L. T., P. Gammeltoft, "The Characteristics of China's Multinationals in the Manufacturing Sector Operating in Indonesia", makalah pada Conference "Emerging Multinationals: Outward Foreign Direct Investment from Emerging and Developing Economies", diselenggarakan oleh Copenhagen Business School, Copenhagen, 9-10 Oktober 2008.



telah lama dianggap oleh investor sebagai negara yang berpotensi, tetapi memiliki hambatan di bidang hukum investasinya, terutama persyaratan-persyaratan yang sangat ketat sehingga rentan terhadap munculnya penyimpangan-penyimpangan.

Kendala investasi di Indonesia yang umum terjadi misalnya seperti: pengurusan izin yang terlalu berbelit-belit, perilaku negatif birokrasi, pembatasan bidang usaha, kelemahan infrastruktur yang mendukung investasi, serta belum terciptanya kepastian hukum dan penegakan hukum, di samping juga fasilitas perpajakan. ACFTA yang menjadi sarana bagi peningkatan investasi di Indonesia memberikan dorongan agar di Indonesia dilakukan pembaharuan hukum investasi, atau bilamana dimungkinkan, dilakukan perubahan-perubahan seperlunya yang dapat mengakomodir kepentingan investasi di Indonesia.



Sejak perjanjian ACFTA ditandatangani, industri dalam negeri yang rentan terhadap pemberlakuan ACFTA tidak melakukan persiapan yang seharusnya dilakukan untuk bisa bersaing. Demikian juga dengan kebijakan pemerintah sendiri yang belum optimal memberikan dukungan kepada industri dalam negeri untuk siap bersaing di era perdagangan ACFTA. Hingga saat ini, walaupun ada perubahan yang cukup berarti sebagai hasil konkrit dari proses pembangunan ekonomi, kontribusi sektor-sektor nonprimer, khususnya industri manufaktur terhadap GDP dan diversifikasi produksi di sektor industri manufaktur di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Melihat pada industri-industri yang rentan dalam menghadapi ACFTA, seperti baja, tekstil, dan alas kaki, bisa dikatakan bahwa sejak awal berkembangnya industri manufaktur di dalam negeri, tampaknya tidak ada perkembangan berarti yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, bagaimana memajukan industri dalam negeri harus menjadi prioritas, khususnya industri manufaktur agar mempunyai daya saing yang kuat.

G. DAMPAK PENERAPAN ACFTA BAGI INDONESIA

Sejumlah perusahaan dari negara ASEAN melakukan investasi di Indonesia dengan harapan dapat memanfaatkan skema AICO dan kemudian CEPT-AFTA. Sementara itu, investasi Cina di Indonesia belakangan ini menyebar ke sektor infrastruktur. Minat investasi di sektor manufaktur yang terus berkembang ini antara lain didukung oleh adanya ACFTA yang memungkinkan Indonesia menjadi *regional base of production* atau menjadikan Indonesia sebagai bagian dari *regional production network*.²⁰

Pada Tabel 4 diilustrasikan bagaimana perbandingan dampak terhadap ekspor dengan dua skenario, yaitu skenario I jika Indonesia ikut AFTA dan ACFTA; skenario II jika Indonesia hanya ikut AFTA.

Berdasarkan data tersebut (Tabel 4), jika Indonesia ikut AFTA dan ACFTA, potensi kenaikan ekspor Indonesia ke Cina masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan ekspor Cina ke Indonesia. Namun, apabila Indonesia tidak mengikuti ACFTA dan hanya mengikuti AFTA, pasar Indonesia justru terancam oleh ekspansi produk dari ASEAN yang mendapatkan keuntungan atas tersedianya bahan baku atau produk antara yang lebih murah dari Cina. Sementara itu, akses Indonesia ke pasar Cina terbatas dan kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya.

Simulasi pada Tabel 5, menunjukkan bahwa secara keseluruhan perjanjian AFTA dan ACFTA akan meningkatkan kemakmuran Indonesia. Salah satu ukurannya adalah *equivalent variation* (EV).²¹ Namun, fakta lain menunjukkan bahwa terdapat sepuluh sektor di Indonesia yang paling dirugikan dengan penerapan ACFTA (Tabel 6).

²⁰ Gusmardi Bustami, "Indonesia Di Tengah Pusaran Arus Perdagangan Bebas", disampaikan pada Rountable Discussion P2P-LIPI, Jakarta, 27 April 2010.

²¹ *Ibid.*

Tabel 4. Perbandingan Dampak terhadap Ekspor

Negara Asal	Skenario	Negara Tujuan										Total
		Asia Tenggara Lainnya	Singapura	Vietnam	Thailand	Filipina	Malaysia	Indonesia	Cina	Sisa Dunia		
Asia Tenggara lainnya	I	0,2	14,2	2	111,6	1,3	-13,1	7,4	574,2	16	713,7	
	II	0,2	12,5	2	111,9	1,2	-13,7	7,1	592,1	3,8	717,2	
Singapura	I	71,5	0	817,3	1.431,8	11,4	429,6	104,4	5.361,7	-7.129,5	1.098,1	
	II	69,9	0	813,9	1.424,5	9,3	412,9	175,9	5.463,2	-7.215,1	1.154,5	
Vietnam	I	-0,2	-17,4	0	487,2	125,6	13,2	1	1.986,2	-834,1	1.361,5	
	II	-0,2	-19,1	0	484,8	125,3	12,2	0,6	1.620,3	-857,2	1.366,8	
Thailand	I	518,5	-77,3	393,3	0	179,6	922,3	236,9	6.750,6	-5.871,3	3.052,6	
	II	515,9	-88,2	390,2	0	177,2	912	252,4	6894,3	-5984,6	3.069,3	
Filipina	I	2,9	-15,3	81,9	795,4	0	134,4	40,1	974,8	-1.306	708,3	
	II	2,9	-17,6	81,8	793,9	0	133,2	41,6	995,9	-1.318	713,7	
Malaysia	I	206,8	-826	401,2	1.783,4	63,8	0	161,9	6.393,4	-6.596,8	1.587,6	
	II	205,7	-870,9	399,7	1.773,8	61,8	0	177	6.597,2	-6.733,5	1.611,3	
Indonesia	I	20,5	-167,9	246	1.213,2	114,4	462,7	0	3.443,9	-3.967,8	1.365	
	II	30,4	90,8	276,1	1.330,3	148,3	590,9	0	-435,8	-1.403,9	627	
Cina	I	316,3	562,2	1.913,8	3.257,6	842	1.697	1.776,5	-1.717,8	1.456,9	10.104,5	
	II	316,5	551,7	1.915,2	3.253,8	841,2	1.691	13,6	-1.427,6	1.408,1	8.563,7	

Sumber: Danareksa Research Institute, 2009

Catatan:

- Skenario I Indonesia ikut AFTA dan ACFTA
- Skenario II Indonesia hanya ikut AFTA

Tabel 5. Perbandingan Dampak terhadap Kesejahteraan

Negara Asal	Skenario	EV (Juta dollar AS)	QGDP (%)	U (%)
Singapura	I	1.879,4	0,05	2,51
	II	1.951,3	0,06	2,6
Vietnam	I	428,6	0,25	1,47
	II	437,0	0,25	1,5
Thailand	I	1.373,9	0,08	1,38
	II	1.407,5	0,08	1,42
Filipina	I	403,8	0,24	0,63
	II	410,5	0,24	0,64
Malaysia	I	1.447,0	0,33	1,86
	II	1.482,1	0,33	1,9
Indonesia	I	734,9	0,07	0,55
	II	194,5	0,03	0,15
Cina	I	-188,2	0,03	-0,02
	II	-257,1	0,02	-0,02

Sumber: Danareksa Research Institute

Menurut Subdinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perdagangan, beberapa kendala yang dihadapi UMKM di antaranya tidak memiliki akses ke luar negeri dan kurangnya promosi ke luar negeri sehingga masih minim jumlah UKM yang mengirim produknya ke luar negeri. Selain itu, kendala lainnya adalah masih minimnya anggaran yang dimiliki para perajin UKM serta pengerjaannya yang masih manual.

H. STRATEGI MENGHADAPI ACFTA

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, Indonesia harus menjalankan strategi untuk menghadapi dampak ACFTA, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.

Ada tiga strategi, yaitu *pertama*, penguatan daya saing global dengan cara penanganan isu domestik yang meliputi penataan lahan dan kawasan industri, yaitu: (1) Pembenahan infrastruktur dan energi; (2) Pemberian insentif (pajak maupun nonpajak lainnya); (3) Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (4) Perluasan akses

Tabel 6. Sepuluh Sektor yang Paling Dirugikan

Sektor	Output Indonesia	Ekspor Indonesia ke Dunia	Ekspor Indonesia ke Cina	Ekspor Cina ke Indonesia
Produk-produk kulit	-10,37	-10,81	11,66	40,86
Produk metal (SITC 287, 289, 523)	-7,45	-7,45	16,56	35,55
Produk manufaktur (SITC 663, 899)	-6,84	-7,44	68,45	99,67
Pakaian Jadi	-5,82	-7,12	276,69	109,87
Gandum (wheat)	-1,85	-2,02	-7,72	1,78
Gula	-1,74	-3,12	10,29	118,55
Tebu, Bit Gula	-1,65	12,69	28,98	5,65
Padi	-1,64	28,9	-34,34	104,43
Beras diproses (Processes rice)	-1,56	0,08	5,54	108,74
Crops nec (SITC 071-0751)	-1,43	-4,19	22,67	30,37

Sumber: Danareksa Research Institute



Gambar 2. Strategi Menghadapi ACFTA

pembiayaan dan pengurangan biaya bunga (KUR, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, modal ventura, keuangan syariah, anjak piutang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dsb); (5) Pembenahan sistem logistik; (6) Perbaikan pelayanan publik (*National Single Window*, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dsb); (7) Penyederhanaan peraturan; dan (8) Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan.²²

Kedua, pengamanan pasar domestik dilakukan dengan tiga cara, yaitu (1) meningkatkan pengawasan di perbatasan yang meliputi: peningkatan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan FTA, menerapkan *Early Warning System* untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor, pengetatan pengawasan penggunaan surat keterangan asal (SKA) barang dari

²² Gusmardi Bustami, *op.cit.*

negara-negara mitra FTA, pengawasan awal terhadap kepatuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), label, *ingredients*, kadaluarsa, kesehatan, lingkungan, *security*, dsb; penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO (*safeguard measures*) terhadap industri yang mengalami kerugian yang serius (*seriously injury*) akibat tekanan impor (*import surges*), dan penerapan instrumen *antidumping* dan *countervailing duties* atas importasi yang *unfair*; (2) peredaran barang di pasar lokal meliputi: *Task Force* pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri, kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia; (3) promosi penggunaan produksi dalam negeri, yang mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres No 2 tahun 2009) dan menggalakkan program 100% Cinta Indonesia dan Industri Kreatif.

Ketiga, penguatan ekspor yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan peluang pasar Cina dan ASEAN; penguatan peran perwakilan luar negeri; promosi pariwisata; perdagangan dan investasi; penanggulangan masalah dan kasus ekspor; pengawasan SKA Indonesia; dan peningkatan peran LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan tarif dan nontarif untuk mengantisipasi dampak negatif ACFTA.²³ Kebijakan tarif di antaranya penundaan beberapa sektor yang diperkirakan dapat mengganggu industri nasional. Sebanyak 228 pos tarif diusulkan akan ditunda penerapannya, antara lain:

- a) Sebanyak 146 pos tarif *Normal Track 1* (NT 1) yang harus 0% pada 2010 diusulkan menjadi *Normal Track 2* (NT 2) atau menjadi 0% pada tahun 2012.
- b) Sebanyak 60 pos tarif *Normal Track 1* (NT 1) yang harus 0% pada tahun 2010 diusulkan menjadi *Sensitive List* (SL) atau 0%–5% pada tahun 2018.

²³ *Ibid.*

- c) Sebanyak 22 pos tarif yang sudah 0% dalam ACFTA 2009 dinaikkan menjadi 5% dan dimasukkan dalam katagori *Sensitive List* (SL) atau 0%–5% pada tahun 2018.

Sementara itu, kebijakan nontarif yang akan dimaksimalkan, antara lain *pertama*, produk yang beredar wajib menggunakan SNI, label halal, dan label berbahasa Indonesia. *Kedua*, pengetatan pengawasan impor produk manufaktur di enam pelabuhan besar (pengetatan izin importir terdaftar + pemberdayaan kinerja Bea dan Cukai). *Ketiga*, penanganan *unfair trade: antidumping* dan *safeguard*. *Keempat*, harmonisasi tarif terutama bagi produk yang bahan bakunya masih masuk dalam HSL (*high sensitivity list*), seperti gula, beras, jagung, dan kedelai agar bea masuk impor barang menjadi lebih besar dari bahan baku (gula *versus* permen).

I. PENUTUP

ASEAN dan Cina telah masuk dalam sistem perdagangan dunia sehingga tidak ada satu negara atau kawasan pun yang bisa secara bebas menentukan ekonomi seperti apa yang diinginkannya. Pada saat ASEAN dan Cina memulai pembicaraan tentang rencana membentuk kawasan perdagangan bebas mereka menyadari betul bahwa mereka harus menghadapi sistem global sehingga baik ASEAN maupun Cina tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Kemajuan teknologi yang pesat juga bisa menimbulkan tekanan dalam tata nilai di tiap kawasan yang kemudian menjadi tantangan bagi stabilitas sosial. Dalam hal ini, ASEAN dan Cina menyadari perlunya menyatukan tujuan-tujuan sosial, politik, dan ekonomi ke depannya untuk mengurangi perbedaan politik yang bisa menghambat kerja sama. Tantangan yang masih harus dihadapi dan diantisipasi dalam proses ACFTA adalah: homogenitas produk ekspor, rasionalisasi industri dan perusahaan, penyesuaian bagi usaha kecil dan menengah, serta kemungkinan

pengalihan perdagangan, biaya ekonomi dan hilangnya pendapatan dari tarif bea masuk.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat diambil untuk menol-
long posisi Indonesia dari suatu persetujuan yang telah terlanjur
ditandatangani meskipun dampaknya tidak akan terlalu besar, seperti
meningkatkan efisiensi dan daya saing produk Indonesia antara lain
dengan membangun infrastruktur. Ini membutuhkan waktu yang
lama sementara persaingan tajam sudah dimulai. Indonesia perlu
menurunkan suku bunga atau meningkatkan efisiensi dan daya saing
karena ini sangat diperlukan untuk menghadapi para pesaing. Ini
adalah resep umum kalau Indonesia mengadakan FTA dengan India,
Eropa, Jepang, Amerika, Afrika Selatan, dan negara lainnya. Akan
tetapi, dalam menghadapi persaingan dari Cina, tetap saja Cina tidak
bisa dilawan karena harga barang-barangnya sangat rendah. Semua
negara di dunia sudah kewalahan menghadapi persaingan dari Cina.
Pertanyaan penting adalah apakah dominasi produk Cina sifatnya
jangka pendek atau jangka panjang. Kemungkinan dominasi produk
masih akan berlangsung cukup lama dalam jangka menengah antara
lima hingga sepuluh tahun. Dalam jangka panjang, negara-negara
anggota ASEAN baru bisa memetik keuntungan dari FTA ini, tetapi
sementara itu sudah banyak perusahaan dalam negeri yang bangkrut.
Jadi, ACFTA benar-benar merupakan ancaman bagi Indonesia.
Untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi
asing, perlu diperhatikan beberapa hal, seperti: penyederhanaan
birokrasi (*one roof service*) dan aturan penanaman modal; adanya
kepastian hukum dan peraturan ketenaga kerjaan yang kondusif;
serta tersedianya infrastruktur yang memadai. Untuk itu diperlukan
suatu pemerintahan yang efisien dan efektif serta sektor swasta dan
pengusaha yang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustami, Gusmardi, "Indonesia di Tengah Pusaran Arus Perdagangan Bebas", disampaikan pada *Rountable Discussion* P2P-LIPI, Jakarta 27 April 2010.
- Developing ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, A Brief Report on the ASEAN-China Forum, ISEAS, Singapore, 2004.
- Forging Closer ASEAN-China Economic Relations in the Twenty-First Century*, a report submitted by the ASEAN-China Expert Group on Economic Cooperation, October 2001.
- Kajian Ekonomi Regional Jakarta, Triwulan IV, Kemendag, 2009.
- L.T., Tarmidi, P. Gammeltoft, "The Characteristics of China's Multinationals in the Manufacturing Sector Operating in Indonesia", makalah pada Conference "Emerging Multinationals: Outward Foreign Direct Investment from Emerging and Developing Economies", diselenggarakan oleh Copenhagen Business School, Copenhagen, 9–10 October 2008.
- Ong Keng Yong, "Comprehensive Integration Towards The ASEAN Community", pidato Sekjen ASEAN pada APEC Ministerial Meeting, Santiago, 18 November 2004.
- Supachai, Panitchpakdi and Mark L. Clifford, "Cina and the WTO", *John Wiley & sons*, Singapore, 2002.
- Swee-Hock, Saw, "An Overview of ASEAN-Cina Relations", *ISEAS, Singapore*, 2005.
- Tan Weiwen, Councillor for Trade and Commerce, Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina, di Jakarta, 2006.
- _____, "ACFTA Sudah Terlanjur", *Kompas*, 22 Januari 2010.
- Tarmidi, L.T., "Securing a Win-Win Partnership for ASEAN and China", *ISEAS*, Singapore, 2005.

Dokumen

- The World Bank World Development Indicators*, 2000.
- WTO International Trade Statistics*, 2001.
- ASEAN Statistical Yearbook*, 2001.
- Dokumen ASEAN-China: *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity. Article 5.*





BAB III

Hubungan Ekonomi Indonesia-Cina Pasca-Krisis Asia 1997

Adriana Elisabeth

A. PENGANTAR

Sejak Deng Xiaoping memperkenalkan reformasi di Cina, ekonomi Cina berkembang dan meluas secara luar biasa mulai akhir 1970-an. Sampai saat ini, ekonomi Cina bertumbuh secara kuat. Selama tahun 2001–2009, pertumbuhan ekonomi Cina mencapai 10,7% meskipun pada kuartal pertama 2009 sempat melemah karena krisis ekonomi global. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Cina menurun sampai 6,1%.¹ Cina, India dan Indonesia merupakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di Asia, yang pada tahun 2010, ketiga pusat pertumbuhan itu mengalami pertumbuhan yang paling cepat. Cina mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8,7%, India mencapai 6,8%, sementara Indonesia mencapai 4,6%.²

Hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Cina lebih dulu terjadi, tetapi sejak peristiwa G-30S PKI 1965, hubungan diplomatik

¹ John Wong, “China’s Economy 2010: Continuing Strong Growth, with Possible Soft Landing for 2011”, dalam *East Asian Policy, an International Quarterly*, Vol. 3, No. 1, East Asian Institute, National University of Singapore, Singapore, Januari–Maret 2011, hlm. 13.

² Gita Wirjawan, “Indonesia’s 21st Century Growth Story”, dalam *The Indonesian Quarterly*, Edisi ke-3, Vol. 38, No. 3, CSIS, Jakarta, 2010, hlm. 343.



Indonesia-Cina cenderung diwarnai saling curiga, meskipun kedua negara saling membutuhkan secara ekonomi. Akibat perbedaan kepentingan nasional maupun sistem politik dan ekonomi, Indonesia dan Cina tidak selalu berada pada posisi yang “setara”, bahkan sejak Cina mengalami kebangkitan ekonomi, Indonesia cenderung kurang mampu memanfaatkan keuntungan dari hubungan ekonominya dengan Cina.

Sebagai sesama anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), Indonesia dan Cina mengaplikasikan sistem ekonomi liberal dengan indikator utama pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan dominasi ekonomi global, Indonesia dan ASEAN bersepakat dalam pemberlakuan perdagangan bebas di ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*) sejak tahun 1992. Dalam rangka mendorong kemajuan ekonomi kawasan, ASEAN dan tiga negara di luar ASEAN (Korea Selatan, Jepang dan Cina) sepakat membentuk *ASEAN Plus Three* (ASEAN+3). Kemudian pada tahun 2002, ASEAN dan Cina menandatangani dibentuknya *ASEAN Cina Free Trade Agreement/ACFTA* yang mulai berlaku pada Januari 2010.

Dengan kata lain, Cina merupakan entitas ekonomi yang eksis dan hampir selalu diperhitungkan dalam proses pembangunan nasional Indonesia (bilateral) maupun pembangunan regional dan subregional ASEAN (multilateral). Namun demikian, bagi pelaku ekonomi (pengusaha, pedagang dan produsen) Indonesia, kerja sama perdagangan bebas dengan Cina (ACFTA) cenderung tidak menguntungkan bagi Indonesia.

Kebangkitan ekonomi Cina tidak hanya mengkhawatirkan negara-negara Asia, tetapi bahkan juga bagi Amerika Serikat (AS). Hal ini terutama karena kekuatan ekonomi Cina mampu mendukung industri pertahanan Cina, sehingga Cina dapat mengembangkan kekuatan militernya. Profil ekonomi dan pertahanan Cina telah menjadikannya sebagai kekuatan besar (*major power*). Namun, Cina



menyangkal dengan mengatakan bahwa Cina bukan kekuatan baru yang mengancam. Untuk itulah Cina terus mempropagandakan *peaceful rise of Cina*. Meskipun demikian secara fisik, Cina justru menunjukkan kekuatan militernya dengan menggelar pasukannya di daerah perbatasan Laut Cina Selatan. Langkah militer Cina ini memancing kemarahan negara-negara yang juga mengklaim daerah perbatasan itu (*claimants*), terutama Filipina dan Vietnam.

Pro dan kontra mengenai kebangkitan Cina terus diperbincangkan, terutama berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan bagi keamanan dan stabilitas politik, keamanan dan ekonomi nasional maupun regional ASEAN. Sehubungan dengan hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Cina, kondisi terkini dan dinamika hubungan kedua negara dikaitkan dengan strategi Indonesia maupun Cina dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun daya saing ekonomi masing-masing. Selanjutnya, dinamika hubungan ekonomi Indonesia-Cina dianalisis dalam konteks globalisasi atau perdagangan bebas berdasarkan karakteristik globalisasi, seperti mobilitas perdagangan bebas barang dan jasa, modal dan tenaga kerja. Kemudian dari pendekatan regionalisme, khususnya integrasi ekonomi, Indonesia dan Cina sebagai mitra dagang (serta dalam konteks ASEAN+3 dan ACFTA) sama-sama melandaskan kerja sama ekonomi dan perdagangan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Integrasi ekonomi dimanfaatkan untuk menciptakan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan. regionalisme (integrasi ekonomi) dalam rangka mencapai kepentingan nasional itu sendiri.

B. HUBUNGAN INDONESIA-CINA: SELAYANG PANDANG

Indonesia dan Cina mendapatkan kemerdekaan setelah Perang Dunia II, tetapi kerja sama ekonomi kedua negara baru dimulai pada tahun 1953. Hubungan ekonomi bilateral berjalan dan berkembang baik



sampai terjadi peristiwa politik pada 1965 atau Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengikuti garis politik Beijing (Partai Komunis Cina). Sejak peristiwa itu, hubungan politik dan ekonomi Indonesia dan Cina tidak lagi berkembang secara mulus meskipun keduanya saling tergantung, terutama secara ekonomi.

Sejak menjadi anggota WTO pada tahun 2001, ekonomi Cina terus bertumbuh pesat bahkan Cina menjadi kekuatan ekonomi baru mengalahkan AS dan Jepang. Cina juga menjadi mitra dialog ASEAN dan anggota ASEAN+3. Perkembangan ekonomi politik di kawasan ini membuat peran Cina semakin diperhitungkan, terutama dalam perdagangan dan investasi berkaitan dengan pembangunan kawasan. Meskipun demikian, negara-negara ASEAN bereaksi secara berbeda mengenai kebangkitan ekonomi Cina, terutama berkaitan dengan pemenuhan kepentingan nasional masing-masing.

Sebagai anggota WTO, Cina tampak lebih mampu memanfaatkan peluang pasar global untuk mendorong kemajuan perekonomian nasionalnya. Sementara itu Indonesia, meskipun menganut kebijakan ekonomi makro yang propasar, hasilnya tetap kurang dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di Asia, apalagi untuk menandingi Cina. Hal itu terutama dari segi harga komoditas yang cenderung lebih tinggi dibandingkan Cina, begitu pula dalam segi biaya produksi yang lebih tinggi karena upah pekerja yang lebih rendah di Cina.

Ada banyak pihak mengasumsikan bahwa Cina lebih unggul dibandingkan Indonesia dalam kompetisi ekonomi global. Hal ini menjadi sulit dipercaya karena baik Indonesia maupun Cina sama-sama memiliki banyak masalah sosial-ekonomi, seperti masalah kesenjangan pembangunan, pengangguran dan kemiskinan, serta masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim global. Hal ini menunjukkan kondisi paradoks di Indonesia dan Cina, tapi bedanya pertumbuhan ekonomi Cina (*Gross Domestic Product/GDP*) pada



tahun 2010 mampu berada pada peringkat keempat di dunia.³ Sementara itu, Indonesia belum mampu mencapai posisi seperti itu, padahal Indonesia memiliki kekayaan dan potensi sumber daya alam yang jauh melebihi Cina begitu pun dengan luas wilayahnya.

Dampak kemajuan dan “dominasi” ekonomi Cina di kawasan semakin tampak setelah diberlakukannya ACFTA pada Januari 2010. Meskipun negara-negara ASEAN telah bersepakat untuk memberlakukan AFTA pada tahun 1992, serta menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan Jepang, pemberlakuan ACFTA nyatanya tidak berdampak positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, Cina lebih banyak mendapatkan keuntungan ekonomi daripada Indonesia. Hal ini terutama banyak diungkapkan oleh pelaku ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, bagi masyarakat yang tergolong sebagai kelompok ekonomi lemah, dengan daya beli ekonomi yang terbatas, produk-produk Cina yang relatif sangat murah dibandingkan produk-produk lokal menjadi pilihan utama, meskipun tidak berkualitas, bahkan terdapat produk makanan, minuman maupun mainan anak-anak yang berdampak buruk bagi kesehatan.

Pascakrisis ekonomi Asia pada 1997, Cina muncul menjadi “pemain baru” dalam ekonomi kawasan maupun secara bilateral. Perdagangan dan investasi Cina meluas bukan hanya di Asia melainkan juga sampai ke Afrika. Reformasi ekonomi di Cina semakin intensif sejak awal 1992. Kemudian, pada Kongres Nasional ke-14 bulan Oktober 1992, Deng Xiaoping membentuk sebuah strategi ‘*socialist market economy*’,⁴

³ GDP Cina tidak terlepas dari peran Hongkong dan Taiwan dalam meningkatkan sektor ekonomi, perdagangan, dan investasi Cina.

⁴ “Socialist Market Economy” diterjemahkan sebagai “Ekonomi Pasar Sosialis”, yang memadukan prinsip-prinsip ekonomi sosialis dengan liberalis. Cina tetap mengutamakan peran negara dalam mengatur kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi (John Locke), tetapi menjalankan pula prinsip *division of labour* dan saling ketergantungan ekonomi (Adam Smith) maupun keunggulan komparatif (David Ricardo).

yang selanjutnya dibuat dalam paket reformasi ekonomi terpadu/integratif, diawali dengan memperkenalkan program perubahan di sektor fiskal dan keuangan.⁵ Tujuan reformasi ekonomi Cina adalah mengatasi kebangkrutan ekonomi Cina secara nasional antara lain karena inefisiensi (termasuk korupsi), penutupan perusahaan-perusahaan kecil yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya angka pengangguran, dan lain-lain.⁶

Ekonomi pasar sosialis yang menjadi landasan strategi ekonomi Cina antara lain dilakukan dengan melakukan pembaharuan sektor pajak dan privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Perusahaan/investor asing dapat membeli saham perusahaan nasional di Cina.⁷ Singkatnya, keberhasilan reformasi ekonomi Cina menghasilkan pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat signifikan di dunia, tetapi hal ini mengakibatkan Cina tidak mampu lagi menyerap dan mengelola investasi asing (*Foreign Direct Investment*/FDI) yang masuk ke negaranya.

Cina terkesan sangat agresif meluaskan ekonominya ke berbagai kawasan. Dengan persyaratan yang cenderung sangat lunak, Cina berhasil merambah hampir ke semua wilayah ekonomi di dunia, seperti Afrika. Kedekatan Cina dengan Afrika dimulai ketika Presiden Cina, Hu Jintao, mengunjungi Afrika pada tahun 1999. Pada waktu itu, Ia masih menjabat sebagai wakil presiden. Selanjutnya, pada akhir tahun 2008, *Cina Africa Fund* telah menginvestasikan 20 proyek bernilai US\$ 400 juta, dan akan meluaskan investasinya dengan total nilai US\$ 5 miliar. Kemudian, untuk mengatasi krisis pangan di Afrika,

⁵ Kyoko Sheridan (ed.), *Emerging Economic Systems in Asia, A Political and Economic Survey*, Allen & Unwin, St. Leonards NSW, 1998, hlm. 296.

⁶ *Ibid.*, hlm. 297.

⁷ *Ibid.*, hlm. 297–298.

Cina akan membangun 14 pusat demonstrasi teknologi pertanian yang pembangunannya dimulai pada akhir tahun 2009.⁸

Selain itu, Cina mampu menandingi kekuatan AS dan negara-negara Uni Eropa dalam hal bantuan luar negeri. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, AS dan negara-negara Uni Eropa, dikenal sebagai negara maju/kaya yang *menjadi* donor program-program pembangunan di negara-negara berkembang/miskin. Dengan perkembangan ini, dinamika politik dan ekonomi Cina telah mempengaruhi perspektif dan proses pembangunan global (*global development*) dan pemerataan (*equity*).

Menurut Fred Bergsten, Cina dapat dikatakan sebagai *global economic superpower* karena Cina memenuhi tiga kriteria dari definisi itu, yakni: “1) *it must be large enough to significantly affect the world economy*, 2) *it must be sufficiently dynamic to contribute meaningfully to global economic growth*, 3) *it must be open enough to trade and capital flows to have a major impact on other countries*”.⁹

Terlepas dari definisi dan kriteria sebagai kekuatan ekonomi global, kemajuan ekonomi Cina yang sangat pesat harus dilihat dari konsep pembangunan Cina yang disebut “wawasan ilmiah pembangunan”. Secara sederhana dapat dipahami sebagai aturan pokok mengenai pembangunan yang berpusat pada rakyat, bersifat seimbang dan berkelanjutan, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam perencanaan pembangunannya.¹⁰ Adapun sasaran ekonomi Cina abad ke-21 adalah “mengubah Cina dari bengkel kerja dunia menjadi inovator dunia”. Tantangan terbesarnya bukan hanya bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi, melainkan

⁸ John Naisbitt and Doris Nasbitt, *China's Megatrends, 8 Pilar yang Membuat Dahsyat China*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 166.

⁹ Lok Sang Ho and John Wong, *APEC and the Rise of China*, World Scientific, Singapore, 2011, hlm. 97.

¹⁰ John Naisbitt and Doris Nasbitt, *op.cit*, hlm. 82.



juga melaksanakan pembangunan dengan pertimbangan aspek lingkungan yang telah dicanangkan.¹¹ Namun dalam kenyataannya, Cina tetap belum mampu membangun secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Hal ini terutama terlihat dari seringnya terjadi bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Cina daratan.

Dalam hubungan bilateral dengan Indonesia, meskipun Cina cenderung mendapatkan keuntungan lebih banyak secara ekonomi daripada Indonesia, Indonesia tetap mempunyai kelebihan dibandingkan Cina, khususnya dalam hal potensi dan kekayaan sumber daya alam, luas wilayah, dan potensi pasar. Untuk itu, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Cina sangat relevan apabila ditinjau dari pendekatan/perspektif di berbagai tingkatan (*multi level*) dan isu (*multi issue*). Dalam era global, hubungan antarnegara tidak lagi ditentukan oleh satu isu, melainkan berbagai isu yang saling berkorelasi, ataupun tidak hanya berlaku pada satu tingkatan tertentu saja, tetapi berbagai tingkatan atau lapisan.¹²

Sehubungan dengan isu pembangunan global, terutama hubungannya dengan program pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*), peran Indonesia dan Cina terkait dengan target pembangunan global pada tahun 2015 sesuai kesepakatan *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan upaya mengurangi angka kemiskinan sebesar 50% dari kondisi kemiskinan sejak kesepakatan itu dibuat pada tahun 1990. Target MDGs juga relevan dengan konteks ASEAN yang menghadapi berbagai isu sosial ekonomi sehubungan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah maupun antarnegara.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 84.

¹² Lihat *World Politics*, hlm. 11.



Seiring dengan pergeseran paradigma di ASEAN berkaitan dengan isu-isu keamanan negara menuju keamanan manusia, maka proses dan fokus pembangunan ASEAN ditujukan untuk membangun masyarakat ASEAN atau *people-centeredness ASEAN*. Isu kemiskinan dan ketimpangan pembangunan menjadi hal yang paling relevan sehubungan dengan konsep *people-centeredness*. Indonesia dan Cina belum sepenuhnya mampu mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat atau kepentingan setiap warga negara sebagai individu yang berdaulat. Apabila dikaitkan dengan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), baik Indonesia maupun Cina dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak-hak dasar atau hak-hak sosial ekonomi warga negaranya sendiri. Dengan kata lain, kesepakatan global mengenai perdagangan bebas cenderung bertentangan dengan kewajiban negara/pemerintah, baik Indonesia maupun Cina dalam memenuhi dan menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya (*human security*).

C. EKONOMI CINA PASCA-1997

Pada tahun 1979, Cina membuka hubungan ekonomi dengan AS. Masa itu merupakan awal baru hubungan kedua negara. Kemudian pada tahun 1980, Cina memulai proses reformasi ekonomi secara nasional dengan menetapkan Shenzhen sebagai daerah uji coba sistem reformasi baru Cina. Seiring dengan reformasi ekonomi di Cina, pembangunan wilayah di Cina dikembangkan dalam bentuk kerja sama segitiga pertumbuhan (*growth triangle approach*). Kerja sama ini menjadi model bagi pengembangan ekonomi kawasan Asia Tenggara yang kemudian dikenal dengan IMS-GT (*Indonesia Malaysia Singapore-Growth Triangle* dulu bernama SIJORI/Singapura Johor Riau) pada tahun 1990; IMT-GT (*Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle*) pada tahun 1992; BIMP-EAGA (*Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East ASEAN Growth Area* atau *EAGA Quadraengle*) pada



tahun 1994; dan *Greater Mekong/Mekong Basin* pada tahun 1996. Semua kerja sama subkawasan itu masih ada meskipun kemajuannya sangat terbatas. Selain karena perbedaan sistem ekonomi, termasuk perbedaan institusi politik dan ekonomi antarnegara subkawasan, tidak maksimalnya kemajuan kerja sama ekonomi subregional ini disebabkan oleh konflik politik dan sosial yang terjadi di beberapa bagian wilayah kerja sama, seperti di Mindanao (Filipina Selatan), Poso (Sulawesi Tengah), Ambon (Maluku), dan Papua.¹³

Sementara itu, dalam kerja sama global (*Trans National Corporations/TNCs*), menurut *Asia Monitor Resource Centre* (2011), strategi Cina dilakukan di bidang: (1) *Trading companies*, (2) *Manufacturing enterprises*, (3) *Oil and Mining Companies*, (4) *Financial institutions*, dan (5) *Construction companies*.¹⁴ Dalam skala global, di antara 20 entitas ekonomi dunia antara tahun 2008–2009, aliran FDI Cina berada di urutan keenam setelah AS, Perancis, Jepang, Jerman, dan Hongkong. Dalam periode antara tahun 1980–1990, pertumbuhan investasi Cina rata-rata hanya US\$ 1 triliun. Namun, antara tahun 1992–1993, Cina mengalami pertumbuhan tertinggi di sektor investasi dan meningkat secara signifikan sejak tahun 2004, hingga pada tahun 2005 mencapai US\$ 46,3 triliun. Figur ini jauh melampaui FDI India dan Brazil, bahkan juga melampaui FDI Afrika Selatan yang berjumlah US\$ 38,5 triliun dan Korea Selatan sebesar US\$ 36,4 triliun.¹⁵

¹³ Indonesia memiliki anggota BIMP-EAGA atau I-EAGA terbanyak mencakup semua provinsi yang ada di Indonesia bagian Timur. Namun provinsi yang maju dalam kerja sama EAGA ini hanya dicapai oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

¹⁴ Au Loong Yu and Kevin Li, "Preliminary Report on China's going Global Strategy: A Labour, Environment, and Hong Kong Perspective", *Capital Mobility Research Paper Series No. 3*, Asia Monitor Resource Centre, Maret 2011, hlm.3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4.



Pada tahun 2005, semakin banyak negara besar khawatir dengan pengaruh ekonomi Cina yang cenderung menguat secara global. Hal ini antara lain disebabkan Cina mengalami pemulihan ekonomi pascakrisis dibandingkan negara-negara maju seperti, AS, Jerman, Perancis, Kanada, dan Italia. Cina dapat merebut pasar negara-negara besar pascakrisis, terutama menciptakan lapangan kerja dengan investasi Cina di berbagai negara. Kekhawatiran terhadap dampak kemajuan ekonomi Cina disebabkan pemberlakuan kebijakan mata uang Cina yang menguntungkan industri dan ekspor Cina. Hal ini dirasakan oleh Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Italia.¹⁶



Sebaliknya, bagi negara-negara di Afrika, seperti Nigeria dan Kenya, investasi dan perdagangan Cina berdampak positif bagi perekonomian mereka, terutama di sektor pertambangan dan eksplorasi sumber daya alam, khususnya energi dan logam.¹⁷ Selain itu, investasi Cina mampu membuka lapangan kerja dan membangun prasarana baru. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa investasi Cina bertujuan untuk menguasai sumber daya alam Afrika.¹⁸



Pada tahun 2010, Cina mengalami surplus perdagangan. Meskipun terimbas oleh krisis global tahun 2008, Cina mampu mengatasi dampak negatif krisis global itu dan menekan tingkat inflasi ke titik yang terendah di antara empat negara ekonomi baru, yaitu Brazil, Rusia, India, dan Cina (BRIC), dengan tingkat inflasi Cina kurang dari 6% di bawah Brazil, 7% untuk Rusia, dan 11% untuk India.¹⁹

Pertumbuhan ekonomi Cina pascakrisis tahun 2008 mampu mengalihkan *global economic gravity* ke Asia Timur. Dengan pemulihan

¹⁶ BBC Indonesia. Lihat hasil survey BBC mengenai pengaruh ekonomi China pascakrisis, 28 Maret 2011. (diakses 18 September 2011).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ John Wong, *op.cit.*, hlm. 17.



ekonomi secara tetap dan pertumbuhan yang cepat, Cina mampu mengatasi persoalan pengangguran dengan mudah. Selain itu, Cina menjalankan program stimulus ekonomi yang berhasil mengembangkan bisnis perumahan dan meningkatkan pengeluaran untuk program jaminan sosial. Pada akhir tahun 2010, total nominal GDP Cina dapat menggantikan posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi dunia terbesar kedua. Berdasarkan indikator PPP (*purchasing power parity*), total GDP Cina mampu mencapai kekuatan ekonomi dunia terbesar kedua setelah AS.²⁰

Meskipun Cina mencoba mempertahankan nilai mata uang yang rendah untuk mendapatkan keuntungan maksimal di sektor industri dan ekspor, Cina tidak bisa hanya mengandalkan pasar AS, tetapi juga harus membuka hubungan dengan pasar negara lainnya. Untuk itu, Cina mulai mengubah arah kebijakan perdagangannya dengan menurunkan atau memotong tarif impor dan mempermudah aturan bagi para importir.²¹ Menurut Wakil Menteri Perdagangan Cina, Zhing Shan, perubahan kebijakan ini dilakukan karena tujuan utama perdagangan internasional Cina bukan hanya untuk surplus perdagangan, melainkan juga untuk menjaga keseimbangan perdagangan. Pada bulan Januari 2010, Cina mengalami surplus perdagangan sekitar 57 triliun rupiah atau US\$ 6,5 triliun.²²

Sejak diterapkannya reformasi ekonomi di Cina, Pemerintah Cina juga melakukan perubahan kebijakan di tingkat nasional, seperti sistem *hukou* atau pendaftaran rumah tangga untuk meningkatkan fasilitas di pedesaan dan perkotaan secara sama. Daerah percontohan untuk penerapan sistem ini bernama Chengdu. Selama ini pedesaan tidak mendapatkan fasilitas dan pelayanan setaraf dengan daerah perkotaan. Sistem ini memberikan kemudahan kepada warga desa

²⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

²¹ BBC Indonesia, "China Ubah Kebijakan Perdagangan", 4 Maret 2010. (diakses 18 September 2011).

²² *Ibid.*





untuk datang ke kota. Namun akibatnya, pertambahan penduduk di kawasan perkotaan di Cina, seperti di Beijing cenderung bertambah. Untuk mengatasi arus penduduk desa ke kota, Pemerintah Beijing mengeluarkan kebijakan untuk membatasi buruh migran dari perdesaan ke perkotaan.²³

Meskipun Cina berada pada kondisi paradoks (*major power versus poverty and development gap*), transisi di Cina hadir ditandai dengan kekuatan kelas menengah kaya yang sangat menentukan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi dalam negeri Cina. Hal ini juga menimbulkan tantangan bagi Cina dalam memenuhi kebutuhan konsumen di Cina, termasuk di sektor jasa.²⁴ Dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan, Pemerintah Cina menaikkan pajak kekayaan, tetapi kebijakan ini ditentang oleh kelas menengah di Cina.²⁵

Selain isu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi Cina terhalang oleh (1) rapuhnya sistem keuangan dan perusahaan-perusahaan milik negara (sejenis BUMN), (2) efek ekonomi akibat korupsi, (3) masalah air bersih dan polusi udara, (4) kemungkinan menurunnya FDI, (5) masalah HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, (6) konsumsi dan harga energi, serta (7) isu politik Taiwan.

Dengan kebijakan luar negeri Cina (*One Cina Policy*), Cina mengisolasi Taiwan secara politik di tingkat internasional meskipun secara domestik, Taiwan merupakan sumber investasi terbesar di Cina daratan, sekitar 60% dari investasi yang ada di Negeri Tirai Bambu ini. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ekonomi antara Cina dengan Taiwan di bawah *Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)* pada bulan Juni 2010, Cina mengakui perkembangan ekonomi

²³ BBC Indonesia, "Beda Kota dan Desa Cina", 7 Maret 2011. (diakses 18 September 2011).

²⁴ Lihat Joint Report P2P LIPI-CIER TASC, September 2011.

²⁵ Sheridan Praso (19 September 2011). "China in Transition", <http://www.strategy-business.com/article/00088?/> (diakses 21 Oktober 2011).



Taiwan yang semakin signifikan di tingkat global. Namun pada saat bersamaan, Cina semakin memiliki akses untuk “memonitor” manuver atau diplomasi ekonomi Taiwan yang secara konsisten dan agresif berupaya membangun kerja sama ekonomi bilateral dengan beberapa negara ASEAN, termasuk dengan Indonesia.

Secara rasional, banyak kelebihan yang dimiliki Taiwan yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memajukan sektor ekonomi dan perdagangan Indonesia. Pertama, Taiwan menetapkan standar kualitas produk dan teknologi yang lebih maju dibandingkan Indonesia, baik di sektor pertanian, otomotif dan elektronik maupun pengembangan sumber daya manusia. Kedua, sistem manajemen keuangan maupun pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang optimal dalam ekonomi nasional Taiwan. Ketiga, kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi maju dan bahasa asing.

D. EKONOMI INDONESIA PASCA-1997

Tulisan ini mengacu pada rekomendasi yang disampaikan pada bab sebelumnya mengenai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan fokus pada pengamanan pasar domestik dan penguatan ekspor serta daya saing global Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Cina serta dampak kemajuan ekonomi Cina bagi Indonesia. Selain perbedaan pandangan terhadap kekuatan ekonomi Cina serta dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional dan regional, kekuatan ekonomi Cina secara global dikaitkan dengan karakteristik perdagangan bebas, strategi perluasan pasar di tingkat, dan diplomasi ekonomi Cina.

Pasca wafatnya pemimpin besar Cina, Deng Xiao Ping pada bulan Februari 1997, kebijakan ekonomi dan perdagangan luar negeri Cina dengan Indonesia tidak mengalami perubahan. Menurut Ketua Umum Lembaga Kerja sama Ekonomi, Sosial, dan Budaya





Indonesia-Cina, Sukamdani S. Gitosardjono kepada ANTARA, hal ini disebabkan Deng telah menyiapkan kadernya sejak dia melakukan reformasi ekonomi dan meletakkan landasan baru bagi sistem ekonomi Cina pada tahun 1980-an. Pernyataan senada juga diungkapkan Sofyan Wanandi dan Marie Elka Pangestu. Meskipun kematian itu berdampak juga pada sepiunya pasar saham di Hongkong (menurut lembaga rating *Standard and Poor's*), arus investasi Cina ke Taiwan tidak mengalami perubahan.²⁶

Bagi Cina, Indonesia memiliki banyak potensi yang penting bagi ekonomi Cina, terutama di sektor energi (pertambangan dan mineral) dan potensi pasar sebagaimana yang diraih Cina sejak diberlakukannya ACFTA pada bulan Januari 2010. Sejak saat itu, komoditas perdagangan yang berasal dari Cina membanjiri pasar domestik Indonesia. Akibatnya, produk lokal Indonesia semakin termajinalisasi di pasar domestik. Namun demikian, mantan Menteri Perdagangan RI, Marie Elka Pangestu, tetap melihat peluang untuk bersaing dengan produk Cina dengan cara meningkatkan kualitas produk lokal. Persoalannya, untuk meningkatkan kualitas produk lokal atau secara umum berkaitan dengan peningkatan daya saing pasar domestik, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dan dikembangkan. Pertama, meningkatkan teknologi berkaitan dengan pengelolaan produk-produk lokal sampai kepada akses pasar. Kedua, memberdayakan dan meningkatkan kontribusi UKM dalam perdagangan nasional. Hal ini berkaitan dengan *trade creation* dan *trade diversion*. Ketiga, memperkuat kerja sama antara institusi riset dengan sektor industri untuk menghasilkan inovasi-inovasi di bidang perdagangan.

Kebijakan perdagangan dan investasi Indonesia terhadap Cina di luar konteks ACFTA cenderung sangat terbuka, misalnya

²⁶ Suara Pembaruan Online, "Hubungan Ekonomi Indonesia-Cina Pasca Deng Xiaoping Tetap Baik", 21 Februari 2007. (diakses 18 September 2011).



investasi Cina telah mendominasi hampir sebagian besar sektor energi Indonesia, termasuk di Papua, wilayah paling timur Indonesia yang masih sangat terbatas infrastruktur fisiknya. Begitupun di sektor infrastruktur, baik pembangunan jembatan maupun pabrik tekstil, investasi Cina berperan cukup dominan untuk menggerakkan sektor ini. Namun, dari segi kualitas konstruksi infrastruktur, Cina tidak mewujudkannya setara dengan kualitas yang dijalankan pada proyek-proyek di negara lain, seperti di Eropa dan Australia. Walaupun demikian, perbedaan kualitas pengerjaan proyek infrastruktur ini sebagian disebabkan Indonesia tidak menetapkan standar yang ketat, baik secara kualitas material maupun tenaga kerja. Hal ini ditandai dengan tenaga kerja yang dibawa dari Cina dan dipekerjakan di Indonesia. Tampaknya, perbedaan kebudayaan antara Indonesia dan Cina belum dapat diselesaikan, termasuk bagaimana Cina lebih suka bernegosiasi dengan memakai tenaga perantara/*broker* yang berkebangsaan Cina atau minimal keturunan Cina yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Mandarin.

Secara politik, Indonesia menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, berbeda dengan Cina yang menganut sistem komunisme. Hal ini berdampak pada kesepakatan bilateral di bidang ekonomi dan perdagangan. Cina selalu melibatkan perusahaan-perusahaan negaranya, sementara bagi Indonesia yang menganut kombinasi kebijakan propasar dan peran negara dalam sektor ekonomi, tidak semua kesepakatan perdagangan harus melibatkan kepentingan negara melalui perusahaan negara (BUMN). Indonesia juga membuka kesempatan dan peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan swasta.

E. KEPENTINGAN INDONESIA DALAM HUBUNGAN EKONOMI DENGAN CINA

Kebijakan ekonomi makro Indonesia cenderung berpihak pada kepentingan pasar/pemodal daripada kepentingan masyarakat



pekerja/konsumen. Kebijakan semacam ini memang sejalan dengan prinsip-prinsip pasar bebas yang banyak dianut oleh berbagai negara, terutama yang tergabung dalam WTO. Perdagangan bilateral antara Indonesia dan Cina sudah berlangsung lama jauh sebelum Cina menjadi anggota WTO. Meskipun kedua negara sama-sama anggota WTO, implementasi kebijakan ekonomi Indonesia berbeda dengan Cina. Kalau Cina menjalankan kebijakan “Ekonomi Pasar Sosialis” dengan sistem komunis sejak tahun 1949, Indonesia menjalankan kebijakan ekonomi neoliberalis dengan praktik menggabungkan kekuatan pasar dan intervensi negara, sedangkan sistem politik dijalankan secara demokratis.

Untuk memahami dinamika hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Cina, perlu dianalisis beberapa sektor yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan peran Cina di Indonesia, terutama sektor pertambangan/energi, infrastruktur, serta program pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*).²⁷

Unsur lain yang juga mempengaruhi dinamika hubungan Indonesia-Cina adalah posisi Indonesia yang sekarang sudah masuk dalam kelompok ‘*low middle income country*’. Dengan kondisi ini, Indonesia menjadi anggota G-20. Apa arti Indonesia bagi Cina? Secara ekonomi, mempersoalkan keanggotaan Indonesia di G-20 tidak relevan, meskipun Indonesia tergolong sebagai negara ‘*low middle income*’. Namun, hal ini berpengaruh secara politik. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN serta negara demokratis dengan posisi strategis di kawasan merupakan aset bagi kepentingan politik dan keamanan AS, terutama dalam menghadapi kebangkitan Cina.

²⁷ David Held and David Mephram (ed.), *Progressive Foreign Policy* Chapter 4 “Development and Equity”, Polity, Cambridge, 2007.

I. KEPENTINGAN EKONOMI INDONESIA DI ASEAN

Sesuai dengan pilar Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) untuk membentuk ASEAN *Single Market*, pertumbuhan ekonomi yang merata, menjaga stabilitas ekonomi global, ASEAN telah mencapai berbagai kesepakatan dalam kerangka perdagangan bebas dengan negara-negara ekstra-ASEAN, termasuk dengan Cina. Selain dalam kerangka ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan dan Cina), pada bulan Januari 2010, ASEAN telah menyepakati *free trade agreement* dengan Cina atau ACFTA.

Meskipun perdagangan dan investasi Cina di ASEAN sudah berlangsung secara intens dalam ASEAN+3, di dalam implementasi ACFTA muncul persoalan atau keluhan, khususnya dari Indonesia. Hal ini berkaitan dengan konflik kepentingan antara pedagang atau produsen lokal yang harus bersaing dengan produk-produk Cina di pasar domestik yang relatif lebih terjangkau harganya, terutama bagi konsumen lokal yang secara ekonomi masih tergolong kurang mampu. Masuknya produk Cina ke pasar domestik memberikan pilihan bagi para konsumen untuk membeli sesuai dengan tingkat daya belinya, meskipun dari segi kualitas, para konsumen tidak mempunyai pilihan selain membeli produk dengan kualitas yang kurang baik, bahkan terkadang berbahaya bagi kesehatan.

Karena kesepakatan perdagangan bebas sudah menjadi keniscayaan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Elka Pangestu, menyarankan produsen Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk lokal dalam menghadapi persaingan dagang dengan Cina.²⁸ Hal ini berhubungan dengan tingkat pengembangan teknologi untuk menciptakan produk-produk yang bermutu tinggi sekaligus aman bagi konsumen. Namun, persoalannya adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya konsumen agar mampu membeli

²⁸ Presentasi Menteri Perdagangan RI dalam Diskusi Ulang Tahun *the Jakarta Post*, Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Mei 2011.



produk yang aman. Fakta ini membuktikan bahwa pasar bebas atau perdagangan bebas memberikan peluang bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, tetapi pada saat yang bersamaan membawa kerugian bagi kelompok ekonomi yang tidak mempunyai kemampuan modal dan akses ekonomi yang memadai untuk bersaing secara bebas.

2. KEPENTINGAN EKONOMI INDONESIA DI APEC

Kepentingan Indonesia di APEC berkaitan dengan status Taiwan yang menjadi anggota APEC sebagai sebuah entitas ekonomi karena Taiwan (Chinese Taipei) merupakan bagian dari Cina. Bagi Taiwan, eksistensinya di APEC merupakan bentuk pengakuan internasional yang penting meskipun menurut APEC dan terminologi WTO, Taiwan tetap disebut sebagai kekuatan ekonomi bukan sebagai sebuah negara.²⁹

APEC dibentuk pada tahun 1989 sebagai forum konsultasi dan organisasi kerja sama yang tidak memiliki struktur dengan program yang terbatas, yaitu kerja sama antarsektor. Cina telah memanfaatkan APEC untuk memudahkan jalan menjadi anggota WTO serta menampilkan kekuatan entitas ekonominya, termasuk otoritas ekonomi Taiwan dan Hongkong.³⁰ Strategi ini merupakan salah satu langkah

²⁹ Bagi Indonesia yang menganut *One China Policy* (Kebijakan Satu China), Taiwan merupakan isu domestik Cina. Indonesia hanya berhubungan dengan Taiwan dalam segi ekonomi. Hal ini disebabkan Taiwan semakin menunjukkan peran ekonominya di tingkat global, baik sebagai anggota WTO maupun sebagai entitas ekonomi dalam kerja sama APEC. Selain itu, secara rasional, Taiwan memiliki beberapa kelebihan secara ekonomi dibandingkan Cina, seperti dalam segi kualitas produk perdagangan maupun dalam sistem pengupahan terhadap tenaga kerja migran. Taiwan memiliki standar dan kualitas yang lebih baik dibandingkan Cina. Dengan kata lain, secara ekonomi, Indonesia dan Taiwan dapat meningkatkan kerja sama per sektor dan bersifat praktis meskipun Indonesia tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Cina.

³⁰ Lok Sang Ho and John Wong (eds.), *op.cit.*, hlm. 4.



Cina yang berhasil membuat negaranya menjadi daerah tujuan investasi asing (FDI) yang paling diminati.

Berbagai catatan keberhasilan Cina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun meningkatkan peringkat kekuatan ekonominya secara global merupakan bukti keberhasilan diplomasi ekonomi Cina. Namun dari segi kekayaan dan potensi sumber daya alam, Indonesia memiliki kekayaan dan potensi yang jauh lebih besar dibandingkan Cina. Oleh karena itu, Cina sangat berketetapan untuk menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia, misalnya di sektor energi, seiring dengan permintaan energi Cina yang terus meningkat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan industri maupun transportasi.

F. PENUTUP

Eksistensi kekuatan ekonomi Cina di dunia tidak dapat disangkal lagi. Namun, Indonesia sebagai pemain ekonomi di kawasan Asia Tenggara maupun sebagai anggota G-20 merupakan kekuatan ekonomi yang sangat penting untuk diperhitungkan. Di tingkat regional ASEAN, Indonesia tetap memiliki kekuatan besar untuk menentukan arah perkembangan ekonomi regional. Namun, langkah-langkah yang harus ditempuh berkaitan dengan peningkatan daya saing nasional untuk mampu berkompetisi di tingkat regional maupun global berhubungan dengan kemampuan dan penguasaan teknologi, sistem manajemen, dan inovasi terkait dengan peningkatan dan modifikasi produk-produk perdagangan, perluasan akses pasar dengan terlebih dahulu memperkuat pasar domestik dan meningkatkan kualitas produk lokal.

Untuk dapat berkompetisi secara terbuka dengan ekonomi Cina, Indonesia harus melakukan beberapa perubahan meliputi hal-hal berikut ini: pertama, mengubah pola pikir dan arah kebijakan ekonomi makro secara nasional, tidak hanya propasar (*pro-growth*), melainkan



juga prorakyat (*pro-job*) dan prolingkungan (*pro-environment*). Untuk itu, pengelolaan potensi dan kekayaan sumber daya alam harus diutamakan untuk kepentingan setiap warga negara Indonesia. Kedua, meningkatkan daya saing ekonomi nasional dengan mengutamakan dan meningkatkan kualitas produk Indonesia, yaitu dengan meningkatkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi modern. Ketiga, mengintegrasikan dan meningkatkan perdagangan dan investasi dengan pengembangan riset dan inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC Indonesia, 28 Maret 2011. (diakses 18 September 2011).
- BBC Indonesia, "China Ubah Kebijakan Perdagangan", 4 Maret 2010. (diakses 18 September 2011).
- BBC Indonesia, "Beda Kota dan Desa Cina", 7 Maret 2011. (diakses 18 September 2011).
- Held, David and David Mephram (ed.), *Progressive Foreign Policy*, Polity, Cambridge, 2007.
- Ho, Lok Sang and John Wong (ed.), *APEC and the Rise of Cina*, World Scientific, Singapore, 2011.
- Joint Report P2P LIPI-CIER TASC, September 2011.
- Naisbitt, John and Doris Nasbitt, *Cina's Megatrends, 8 Pilar yang Membuat Dahsyat Cina*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Praso, Sheridan, "China in Transition", <http://www.strategy-business.com/article/00088?/>, 19 September 2011. (diakses 21 Oktober 2011).
- Presentasi Menteri Perdagangan RI dalam Diskusi Ulang Tahun *the Jakarta Post*, Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Mei 2011.
- Sheridan, Kyoko (ed.), *Emerging Economic Systems in Asia, a Political and Economic Survey*, Allen & Unwin, St. Leonards NSW, 1998.
- Suara Pembaruan Online, "Hubungan Ekonomi Indonesia-Cina Pasca Deng Xiaoping Tetap Baik", 21 Februari 2007. (diakses 18 September 2011).
- Wirjawan, Gita, "Indonesia's 21st Century Growth Story", dalam *The Indonesian Quarterly, Edisi ke-3, Vol. 38, No. 3*, CSIS, Jakarta, 2010.



Wong, John, "China's Economy 2010: Continuing Strong Growth, with Possible Soft Landing for 2011", dalam *East Asian Policy, an International Quarterly*, Vol. 3, No. 1, East Asian Institute, National University of Singapore, Singapore, Januari–Maret 2011.

Yu, Au Loong and Kevin Li, "Preliminary Report on China's going Global Strategy: A Labour, Environment, and Hong Kong Perspective", *Capital Mobility Research Paper Series No. 3*, Asia Monitor Resource Centre, Maret 2011.



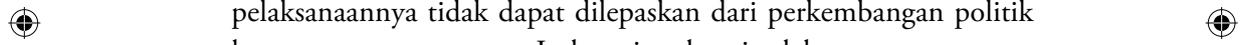


BAB IV

Peluang dan Tantangan Dalam Hubungan Indonesia-Cina: Sektor Jasa dan Tenaga Kerja

Tri Nuke Pudjiastuti

A. PENGANTAR



Pakta Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*–FTA) yang pada dasarnya merupakan pakta kerja sama ekonomi antarnegara, dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik keamanan suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengupayakan kemajuan pembangunan negaranya, melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan cara menarik masuk investasi asing ke Indonesia. Masuknya investasi maupun produk asing ternyata tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga negatif. Indonesia menghadapi tantangan yang serius dalam mempertahankan kedaulatannya dalam arti luas. Salah satu persoalan politik keamanan bagi Indonesia adalah ketika Indonesia tidak lagi mampu menguasai penataan kehadiran dan produk asing, khususnya warga negara asing yang menjual jasa tenaga kerja dan produk negara lain yang menyingkirkan hasil produksi dalam negeri.

FTA dalam kerangka bilateral sebenarnya telah mulai dilakukan Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, yang diawali oleh Singapura, dengan melakukan kesepakatan dengan beberapa negara maju.



Langkah-langkah FTA secara regional maupun bilateral tersebut terus berlanjut hingga akhirnya dicapai beberapa kesepakatan antara ASEAN dan negara-negara maju, salah satunya adalah *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA). Dengan adanya berbagai kesepakatan FTA secara bilateral maupun multilateral terhadap suatu negara sebenarnya dimaksudkan untuk memperkuat hubungan dagang dengan kekuatan ekonominya sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing di tingkat internasional maupun regional. Hal itu membawa banyak konsekuensi pada penataan regulasi, infrastruktur, dan segala hal yang terkait untuk dapat memenuhi standar yang disepakati dalam FTA tersebut, yang biasanya meliputi lalu lintas barang, investasi, keuangan, dan jasa.



Berkaitan dengan itu, Indonesia memberikan banyak perhatian dan terus terlibat secara aktif dalam perundingan-perundingan kerja sama ekonomi internasional dalam kerangka FTA tersebut. Hal itu tidak lepas dari kebijakan Indonesia yang memandang kerja sama dalam kerangka ASEAN tetap ditempatkan sebagai prioritas dalam lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia. Untuk itu, FTA yang telah menjadi salah satu pilihan dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara lain secara bilateral, khususnya hubungan Indonesia-Cina, juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka ASEAN.

Ketika ACFTA ditandatangani Presiden Megawati di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, tanggal 6 November 2001, ada satu hal yang dianggap sebagai peluang positif bagi Indonesia, yaitu semakin terbuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari Cina. *Hal itu diharapkan akan mampu meningkatkan kerja sama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas, antara lain mampu memanfaatkan sektor jasa yang membantu Indonesia melakukan peningkatan *capacity building*, *transfer of technology*, dan *managerial capability* bagi tenaga kerja Indonesia.*



Persoalannya, apakah Indonesia mampu memanfaatkannya demi kepentingan perkembangan Indonesia dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal dengan adanya kerja sama tersebut atau sebaliknya, Indonesia kehilangan kemampuannya dan tidak lagi mampu melindungi kepentingan nasionalnya sehingga kedaulatan di bidang jasa dan tenaga kerja akan terkikis. Hal itu dalam jangka panjang dapat mengikis politik-keamanan secara keseluruhan. Untuk itu, tulisan ini menganalisis sejauh mana kepentingan hubungan Indonesia dengan Cina dalam kerangka sektor jasa dan tenaga kerja di Indonesia dan sejauh mana dampaknya pada instabilitas politik-keamanan di Indonesia. Tulisan ini diawali dengan gambaran umum kebutuhan Indonesia dan kepentingan Cina di bidang sektor jasa di Indonesia.

B. LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA DALAM KERANGKA ASEAN



Indonesia berkepentingan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi secara makro, tetapi juga pada tataran tenaga kerja Indonesia. Diketahui data statistik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia masih mencapai 7,41%, mengalami penurunan dibandingkan keadaan pada bulan Agustus 2009 yang sebesar 7,87%. Sementara itu, jumlah angkatan kerja berkisar 116 juta orang, naik 2,17 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2009 dan naik 2,26 juta dibandingkan keadaan bulan Februari 2009. Demikian pula penduduk yang bekerja, pada bulan Februari 2010 bertambah 2,54 juta dibandingkan bulan Agustus 2009. Tingkat pengangguran yang tinggi juga terkait dengan masih banyaknya penduduk pekerja yang jenjang pendidikannya hanya sekolah dasar (SD), yaitu mencapai 55,31 juta orang (51,50%), tingkat diploma hanya 2,89 juta (2,69%), dan sarjana hanya sebesar 4,94 juta orang (4,60%). Turunnya angka pengangguran, serta meningkatnya jumlah tenaga kerja tersebut telah meningkatkan tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK) sebesar 0,23% selama periode satu tahun. Angka tersebut belum termasuk pengangguran setengah terbuka, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 30 jam per minggu.¹ Masih tingginya angka pengangguran di Indonesia harus diatasi dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unggul. Selain memperluas lapangan pekerjaan, juga disadari masih banyak perangkat yang harus disiapkan untuk mengatasi pengangguran. Hal itu terbukti dalam kegiatan bursa kerja yang sering kali hanya memenuhi separuh dari kebutuhan.²

Dalam situasi persaingan pasar yang semakin kompetitif, perdagangan jasa menjadi sumber nilai tambah (*value added*) yang cukup besar. Data menunjukkan bahwa sektor jasa memegang peranan penting di ASEAN. Rata-rata 40–50% GDP negara ASEAN berasal dari sektor jasa, sedangkan dalam perekonomian Indonesia mengambil porsi 46% dari total GDP pada tahun 2007. Liberalisasi diyakini membawa beberapa dampak positif, antara lain pengguna jasa akan lebih leluasa memilih yang penyedia tepat untuk mereka, termasuk produk penyedia jasanya; mendorong terjadinya *flight to quality* yang akan memacu ke persaingan usaha yang lebih tertib; dan tercapainya *good corporate governance*. Liberalisasi juga akan memperluas kesempatan lapangan kerja bagi para profesional dan *skilled labors*, memungkinkan terjadinya arus masuk modal luar, serta memacu ke pengembangan teknologi, informasi, dan manajemen yang lebih baik di tingkat global.³

¹ Berita Resmi Statistik No. 33/05/Th. XIII, 10 Mei 2010.

² Hal itu disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Muhaimin Iskandar, dalam sambutannya pada pembukaan Nakertrans Expo 2011, di Pusat Promosi dan Informasi Bisnis Kota Tegal, Jawa Tengah. *Kompas*, 21 Juni 2011.

³ Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerja sama Ekonomi Internasional, *Perkembangan Jasa-Jasa dan Posisi Indonesia Dalam Perundingan GATS ke Depan*, Jakarta: Bappenas, 2004.

Namun di sisi lain, liberalisasi juga memberi dampak negatif ketika suatu negara seperti Indonesia yang telah menandatangani kesepakatan, tetapi tidak mampu secara cepat memenuhi standar yang diharapkan. Secara internasional, Indonesia telah menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO), bahkan telah melayangkan sektor dan subsektor yang menjadi komitmen Indonesia (*Indonesia's Schedule of Commitment–Indonesia's SoC*) dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS)⁴ serta setuju dengan prinsip-prinsip dasar GATS, yaitu sebagai berikut:⁵

- 1) GATS mencakup seluruh sektor jasa yang diperdagangkan secara internasional.
- 2) Perlakuan sama bagi semua (*most favoured nation*) berlaku bagi seluruh sektor jasa, kecuali sektor-sektor yang masih dinyatakan dikecualikan untuk sementara.
- 3) Peraturan perundangan seluruh negara anggota harus transparan, yang mana diperlukan *inquiry points* di setiap negara. GATS mengharuskan negara-negara anggota membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka untuk semua pihak.
- 4) Peraturan harus obyektif dan beralasan.
- 5) Pembayaran internasional secara umum tidak terbatas.
- 6) Komitmen suatu negara (*individual countries commitment*) harus sebagai hasil perundingan dan diikat.
- 7) Liberalisasi progresif melalui perundingan lebih lanjut.

⁴ Bidang jasa dikategorikan sebagai salah satu dari isu baru. Sebagaimana diketahui, perundingan Putaran Uruguay/GATT tersebut telah berakhir dan menghasilkan kesepakatan umum para anggota WTO (nama baru dari institusi GATT, yaitu *General Agreement on Trade in Services* (GATS) di Marakesh, Maroko. Perjanjian ini mulai berlaku sejak awal 1995. Adapun yang dimaksud dengan *Schedule of Commitment* (SoC) adalah suatu komitmen yang memuat sektor-sektor jasa yang dinyatakan terbuka untuk diakses oleh penyedia jasa dari negara lain, serta komitmen mengenai tingkat keterbukaan pasarnya. SoC dari semua negara anggota WTO merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian GATS.

⁵ Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerja sama Ekonomi Internasional, *Ibid.*

Adanya prinsip-prinsip tersebut menunjukkan Indonesia sudah terikat pada kesepakatan. Keterikatannya menjadi masalah serius bagi Indonesia saat ini, ketika Indonesia tidak menata secara baik peraturan maupun implementasi peraturan tersebut. Dalam banyak kasus, ketidaksiapan terdapat pada infrastruktur dari perdagangan jasa tersebut, seperti pelatihan dan pemagangan secara baik.⁶

Sementara itu, dalam kerangka regional, Indonesia telah menyepakati liberalisasi perdagangan jasa di tingkat ASEAN. Kesepakatan itu tertuang dalam *Bangkok Summit Declaration of 1995* dan *Asean Framework Agreement on Services (AFAS)* dalam *ASEAN Summit* ke-5 di Bangkok, 15 Desember 1995. Tujuan disepakatinya AFAS adalah secara substantif menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan jasa di antara negara-negara ASEAN. Perihal itu dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan bagi penyalur dan pengguna jasa dalam kawasan ASEAN secara efisien dan kompetitif.⁷ Jadi, AFAS ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan akses pasar (*market access*) dan upaya nasional (*national treatment*) bagi penyalur dan pengguna jasa di antara negara-negara ASEAN. Ada empat macam mode atau bentuk perdagangan jasa:

- a) Pasokan Lintas Batas (*Cross Border Supply-CB*)
- b) Pemenuhan Kebutuhan Luar Negeri (*Consumption Abroad-CA*)
- c) Kebutuhan Komersial (*Commercial Presence-CP*)
- d) Mobilitas Orang Per Orang (*Movement of Natural Personel-MNP*)

Dari keempat bentuk perdagangan jasa di atas, pada kenyataannya mode pertama hingga ketiga tidak terlalu menjadi masalah

⁶ Tantangan dan persoalan keprofesian dalam AFAS (*Asean Framework Agreement in Services*) ternyata pada banyak sektor yang disepakati, seperti bidang kesehatan dan transportasi laut, banyak didominasi pihak asing dari pengusaha maupun tenaga terdidiknya.

⁷ "Introduction To ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)", <http://www.aseansec.org/>, diunduh pada tanggal 24 Agustus 2010.

bagi Indonesia mengingat pengaturan hal itu telah ada sebelumnya. Namun, adanya poin nomor empat itu sebenarnya agak bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan asing di Indonesia yang tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebenarnya, untuk hal yang sama, MNP yang masuk ke suatu negara untuk bekerja terdapat banyak pengaturan dan pembatasan yang diberlakukan pada sebagian negara anggota ASEAN. Sebagai contoh, Singapura dan Malaysia, mempunyai pengaturan dan persyaratan yang ketat atas masuknya MNP *highly skilled*. MNP *highly skilled* dan tenaga kerja asing (TKA) yang dibawa investor asing mengalami pembatasan yang dimaksudkan untuk melindungi tenaga kerja lokalnya.⁸ Hanya bedanya, kedua negara tersebut melaksanakan peraturannya dengan ketat, sedangkan Indonesia tidak melakukannya. Selain itu, UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatur mobilitas TKA masih sangat erat terkait dengan kepemilikan perusahaan. Artinya, apabila pihak investor asing mendapat izin untuk menanamkan modalnya ke suatu perusahaan atau membuka perusahaan baru, investor asing tersebut juga mendapat izin atau dibolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana ketentuan. Namun demikian, kebutuhan TKA tidak terbatas pada perusahaan atau lembaga asing saja, tetapi perusahaan atau lembaga nasional, bahkan daerah. Hal ini yang masih kurang terlihat pengaturannya secara baik.

Sejak penandatanganan AFAS hingga saat ini, Indonesia telah menyepakati enam paket komitmen liberalisasi jasa ketika dilaksanakan KTT ke-13 ASEAN di Singapura, November 2007. KTT tersebut menyepakati pengesahan paket ke-6 tersebut sebagai kelanjutan liberalisasi jasa di bawah AFAS. Prinsip, strategi, dan modalitas untuk liberalisasi jasa tersebut ditujukan guna mewujudkan realisasi bebasnya arus perdagangan jasa ASEAN dalam rangka pembentukan kawasan ekonomi terintegrasi “Komunitas Ekonomi ASEAN” tahun

⁸ Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerja Sama Ekonomi Internasional, *Ibid*.

2015. Integrasi perdagangan jasa ASEAN akan dilaksanakan dengan mengacu pada cetak biru pembentukan komunitas ekonomi ASEAN yang juga telah disepakati pimpinan ASEAN pada kesempatan KTT tersebut. Di samping itu, telah ditandatangani *ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services and the ASEAN Multilateral Agreement on Air Services* pada pertemuan ke-14 *ASEAN Transport Ministers' Meeting* pada bulan November 2008.

Persoalan dan kepentingan internal tiap negara anggota tentang liberalisasi perdagangan jasa tersebut disepakati setelah berbagai negosiasi internal anggota ASEAN yang akhirnya mencapai paket kesepakatan, yaitu:

- 1) Jasa bisnis, termasuk di dalamnya antara lain jasa teknologi informatika, *accounting*, *auditing*, hukum, arsitektur, permesinan, dan survei pasar.
- 2) Jasa konstruksi, termasuk di dalamnya antara lain konstruksi bangunan komersial, jasa teknik sipil, pekerjaan instalasi, dan peminjaman kebutuhan konstruksi.

Hasil penelitian tim ASEAN LIPI menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut diupayakan untuk mendorong pemerintah agar mampu membangun koordinasi serta bekerja sama secara internal pemerintahan dan eksternal dengan berbagai pihak untuk mencapai perdagangan jasa yang dapat bergerak bebas.⁹ Upaya tersebut diterjemahkan dalam *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*, yang salah satunya secara bertahap menghapuskan semua hambatan yang membatasi akses pasar. Hal ini mengakibatkan tenaga-tenaga profesional dan tenaga kerja trampil bebas bergerak di kawasan ASEAN.

⁹ Adriana Elisabeth, "Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN: Urgensi dan Permasalahannya", dan juga tulisan Jasmin Sungkar, "Isu Perdagangan Bebas Barang dan Jasa dalam Komunitas Ekonomi ASEAN", dalam Adriana Elisabeth (Ed), *Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN*, LIPI Press, Jakarta, 2009, hlm. 13-14 dan 140-141.

Bila diperhatikan, setiap aturan yang dikembangkan dalam AFAS sebenarnya cakupan liberalisasi jasanya telah melampaui hal-hal yang telah diatur dan dilaksanakan di bawah skema GATS. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa AFAS ini dirancang menjadi kesepakatan bagi anggota GATS atau dapat disebut dengan istilah GATS-Plus.¹⁰ Namun, satu hal yang penting untuk diperhatikan dan dapat menjadi kekuatan suatu negara dalam menjaga pasar perdagangan jasa negerinya adalah setiap negara anggota ASEAN tetap memiliki hak pengaturan internal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan AFAS. Dengan adanya ketentuan tersebut dan untuk mempermudah kebebasan bergerak sektor jasa termasuk jasa tenaga kerja di tingkat ASEAN, diusahakan adanya pengakuan profesi dengan pertimbangan bisa mempermudah mobilitas tenaga kerja di kawasan tersebut. Dibandingkan dengan perdagangan barang, perdagangan jasa masih memerlukan banyak kesepakatan. Hal itu bisa dipahami mengingat setiap negara harus memperhitungkan keamanan bekerja bagi tenaga kerjanya sendiri. Untuk itu, ada 13 langkah yang sedang dilakukan di tingkat ASEAN, yaitu:¹¹

- 1) Menghapuskan semua hambatan perdagangan jasa dalam empat sektor prioritas: transportasi udara, e-ASEAN, *healthcare*, dan pariwisata pada tahun 2010, serta sektor prioritas ke-5, yaitu jasa logistik pada tahun 2013;
- 2) Menghapus semua hambatan perdagangan jasa dalam sektor prioritas lainnya pada tahun 2015;
- 3) Mengambil langkah-langkah liberalisasi lewat berbagai putaran pada setiap dua tahun hingga tahun 2015;

¹⁰ "Introduction To ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)", <http://www.aseansec.org/> dan lihat Denis Hew, "Introduction: Brick by Brick – The Building of an ASEAN Economic Community", dalam Denis Hew (Ed.), *Brick by Brick – The Building of an ASEAN Economic Community*, ISEAS, Singapura, 2007, hlm. 7.

¹¹ "ASEAN Economic Blueprint", dalam *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015*, ASEAN Sekretariat, Jakarta, 2009, hlm. 26.

- 
- 
- 
- 4) Menargetkan jadwal sejumlah subsektor baru dalam setiap putaran: sepuluh subsektor pada tahun 2008, 15 subsektor pada tahun 2010, dan seterusnya.
 - 5) Menjadwalkan paket komitmen dalam tiap putaran sesuai parameter tertentu;
 - 6) Menetapkan parameter liberalisasi bagi *national treatment limitations*;
 - 7) Menjadwalkan komitmen menurut parameter yang disepakati bagi *national treatment limitations*;
 - 8) Menyelesaikan kompilasi sebuah inventaris hambatan pada bulan Agustus 2008.
 - 9) Membolehkan fleksibilitas yang mencakup subsektor yang tidak termasuk dalam liberalisasi dan yang belum semua parameter dipenuhi;
 - 10) Menyelesaikan MRAs yang sedang dalam proses negosiasi, seperti jasa arsitek, jasa akuntan, kualifikasi survei, dan tenaga medis pada tahun 2008 serta tenaga kesehatan gigi pada tahun 2009;
 - 11) Mengimplementasikan MRAs dengan cepat dan efisien menurut persyaratan tiap MRA;
 - 12) Mengidentifikasi dan mengembangkan MRAs bagi jasa profesional lainnya pada tahun 2012 dan menyelesaikan sepenuhnya pada tahun 2015;
 - 13) Memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan *capacity building* untuk bidang jasa.

Dewasa ini telah dibahas tujuh sektor jasa yang disepakati dan akan diterapkan di tingkat ASEAN, yaitu transportasi udara, jasa bisnis, konstruksi, jasa keuangan, transportasi laut, telekomunikasi, dan pariwisata.¹² Secara prinsip, setiap negara anggota yang sudah

¹²Kesepakatan tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2007 baru dicapai lima kesepakatan (untuk transportasi udara, jasa bisnis, konstruksi, jasa keuangan, dan



siap diperbolehkan meliberalisasi sektor jasa tertentu untuk memulai terlebih dulu dan yang lain dapat bergabung kemudian.

Sementara itu, dalam kerangka MRAs yang diharapkan dapat mempermudah mobilitas jasa professional, telah disepakati tujuh macam jasa, yaitu jasa keahlian teknik (2005), perawat (2006), arsitek dan kualifikasi survei (2007), akuntan, tenaga medis dan kesehatan gigi (2009).

Perdagangan jasa di internal pasar ASEAN dan eksternal pada kenyataannya tumbuh terus dan memberikan nilai tambah dan sebagai komponen *Gross Domestic Product* (GDP) bagi negara-negara anggotanya. Namun jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Filipina, Indonesia hanya mencapai sekitar 40%-nya.¹³ Adapun bila dilihat dari sisi ekspor-impor, sektor jasa dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang baik. Pada tahun 1998 misalnya, ekspor jasa yang semula hanya mencapai US\$ 57,4 miliar menjadi US\$ 153,2 miliar pada tahun 2007. Demikian pula nilai impor jasa yang pada tahun 1998 hanya mencapai US\$ 66,5 miliar, menjadi US\$ 176,3 miliar pada tahun 2007.¹⁴ Tren yang ada menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN menjadi tempat tujuan yang menarik bagi kalangan profesional dari berbagai negara di luar negara-negara ASEAN.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti kesepakatan AFAS, telah dibentuk *Coordinating Committee on Services* (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS. Liberalisasi jasa tersebut mencakup delapan sektor, yaitu: jasa angkutan udara dan laut, jasa bisnis, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi, jasa pariwisata, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan jasa logistik.

transportasi laut). Sementara itu, paket jasa telekomunikasi dan pariwisata baru disepakati dan ditandatangani pada bulan Desember 2008.

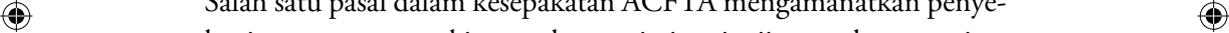
¹³ *ASEAN Statistical Yearbook 2007*.

¹⁴ *WTO Trade Statistic 2007*.



Di samping itu, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Ekonominya, telah menandatangani *MRA Framework on Accountancy Services, MRA on Medical Practitioner, and MRA on Dental Practitioners*. *MRA Framework on Accountancy Services* akan menjadi prinsip-prinsip dasar dan kerangka negosiasi bilateral atau multilateral. Sementara itu, MRAs mengenai *Medical Practitioners and Dental Practitioners* diharapkan dapat memfasilitasi mobilitas *qualified medical and dental practitioners*. Di Amerika Serikat (AS) juga telah ditandatangani MRAs di bidang *engineering services, architectures services, nursing services and surveying and urged renewed efforts by the related professional bodies to implement the MRAs*. Untuk *MRA on Tourism Professionals*, diharapkan dapat ditandatangani pada *ASEAN Tourism Ministers Meeting* pada bulan Januari 2009.

C. LIBERALISASI JASA DALAM KERANGKA ACFTA



Salah satu pasal dalam kesepakatan ACFTA mengamanatkan penyelesaian secepat mungkin untuk negosiasi perjanjian perdagangan jasa yang meliberalisasi secara progresif dan menghapuskan secara substansial semua diskriminasi dan/atau pelarangan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perdagangan jasa antara ASEAN dan Cina. Di samping itu, kedua belah pihak dapat memperluas kedalaman dan lingkup perdagangan jasa dengan cakupan sektor yang substansial melebihi yang dilakukan berdasarkan perjanjian umum perdagangan jasa (GATS) dari WTO (*World Trade Organization*).

Dalam implementasi FTA ASEAN-Cina di bidang jasa, Cina telah mengajukan *request* kepada Indonesia untuk sepuluh sektor jasa, yaitu *business services*; komunikasi; konstruksi dan jasa *engineering*; distribusi; pendidikan; lingkungan; keuangan; jasa sosial dan kesehatan; jasa olahraga, budaya dan rekreasi; dan jasa transportasi. Berkenaan dengan hal tersebut, telah disepakati bahwa *basis offer* untuk sektor-sektor yang masuk dalam komitmen pertama FTA ASEAN-

Cina bidang jasa adalah AFAS-4 (*business services*, telekomunikasi, konstruksi, jasa terkait dengan *air travel* dan kepariwisataan) ditambah dengan jasa maritim, pendidikan, keuangan khusus asuransi, dan kesehatan yang kesemuanya telah masuk dalam AFAS-5.¹⁵

Namun pada perundingan putaran kedua, Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya dan Cina, telah menyepakati dibukanya kembali mekanisme perundingan *request* dan *offer* guna lebih memperdalam dan memperluas cakupan komitmen negara-negara ASEAN dan Cina. Baik ASEAN maupun Cina memiliki komitmen yang kuat untuk berpartisipasi dalam mekanisme perundingan berbasis *request-offer* guna penyelesaian paket perundingan putaran kedua yang ditargetkan selesai pada bulan Juli 2008.

Untuk itu, Indonesia mendorong liberalisasi sektor jasa melalui Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, yang bertindak sebagai koordinator (tim koordinator bidang jasa) di semua forum dan sektor, termasuk sebagai pengelola sektor jasa keuangan *non-bank* dan jasa profesi (akuntan dan penilai).

D. MOBILITAS TENAGA KERJA CINA AKIBAT TEKANAN DOMESTIK CINA

Aliran tenaga kerja Cina, bukan saja para profesional, tetapi juga level menengah ke bawah, dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah. Hal ini terlihat dari besarnya mobilitas tenaga kerja Cina ke berbagai negara lain, termasuk Indonesia. Hal itu tidak lepas dari kondisi internal Cina sebagai negara yang jumlah penduduknya lebih dari 1,3 miliar orang atau kira-kira satu perlima dari penduduk dunia. Oleh karena itu, Cina menghadapi persoalan kependudukan dan ketenagakerjaan yang serius. Sejak awal tahun 2000-an, Cina sudah

¹⁵ http://www.kemlu.go.id/Documents/Kerja_sama%20Ekonomi%20ASEAN.doc, diunduh pada tanggal 2 Agustus 2011.

tergolong surplus tenaga kerja. Sementara itu, pengangguran sudah mulai menghantui Cina sejak akhir tahun 1970-an.¹⁶

Pengangguran pada umumnya terjadi di daerah perkotaan, tidak di pedesaan. Di pedesaan, pada umumnya banyak pekerja yang dapat terserap di sektor pertanian. Hal itu didukung dengan masih banyaknya lahan garapan. Berbeda dengan di perkotaan, pengangguran merupakan persoalan yang kompleks dan masuk pada banyak sektor di Cina. Sebagaimana analisis Hu Angang dan Sheng Xin, pada tahun 2003 tingkat pengangguran terus bertambah hingga di atas 7%. Suatu persentase yang perlu diwaspadai mengingat sebelumnya tidak pernah mencapai di atas 5% atau sekitar 16,48 juta.¹⁷

Sementara itu, perusahaan investasi perbankan dan layanan penelitan Cina, China International Capital Corporation (CICC) menunjukkan bahwa Cina dapat menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi pada tahun 2011 seiring berakhirnya jutaan pekerjaan temporer yang akan menyelesaikan paket stimulus proyek pemerintah sebesar 4 triliun yuan (US\$ 585 miliar). Bank yang berbasis di Beijing ini juga menekankan bahwa riset dari National Development and Reform Commission mengindikasikan bahwa stimulus tersebut membawa 5,6 juta pekerjaan baru dan hampir 50 juta posisi temporer selama proyek konstruksi tersebut. Akan tetapi, persediaan tenaga kerja ke dalam pasar pada tahun 2011 dapat naik 39 juta, yang terdiri dari 7,58 juta lulusan sekolah tinggi, 6 sampai 7 juta tenaga kerja yang surplus bergerak dari area pedesaan, dan 25 juta pekerja temporer yang akan kehilangan pekerjaan yang berkaitan dengan stimulus.

¹⁶ Michael Webber dan Zhu Ying, "Primitive Accumulation, Transition and Unemployment in China", dalam Grace O.M. Lee and Malcolm Warner (Eds.), *Unemployment in China: Economy, Human Resources and Labour Markets*, Routledge, London, 2007, hlm. 17.

¹⁷ Hu Angang dan Sheng Xin, "Urban Unemployment in China: A Background Analysis (1995–2003)", dalam Grace O.M. Lee and Malcolm Warner (Eds.), *Ibid*, hlm. 37.



Akibatnya, diperkirakan hanya ada sekitar 8 juta pekerjaan baru tercipta yang mana dapat memimpin pada 31 juta kenaikan dalam angka pengangguran, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Cina bertumbuh lambat ke 7,5% pada tahun 2011.¹⁸

Tren yang terjadi di Cina dengan membandingkan pengangguran pada awal tahun 2000 dengan yang terjadi hari ini, dapat dipastikan bahwa ada upaya yang serius dari pemerintah Cina untuk mencari lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Upaya ini tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri bersama-sama masuknya investasi Cina ke suatu negara.

Mudahnya investasi Cina masuk ke negara lain, khususnya ke negara-negara ASEAN, tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi Cina sejak reformasi pada awal tahun 1980-an yang rata-rata di atas 10%. Hal ini membuat perekonomian Cina menjadi terbesar ketiga di dunia, setelah AS dan Jepang, dengan GDP sekitar US\$ 4,3 triliun. Dalam masa krisis ekonomi global sekarang ini, perekonomian Cina masih dapat tumbuh sekitar 7%, sementara seluruh perekonomian negara maju mengalami resesi. Secara sektoral, perekonomian Cina didukung oleh industri manufaktur yang merupakan 60% dari GDP. Pertumbuhan tinggi sektor industri ini didukung oleh aliran kredit perbankan Cina yang tumbuh tinggi, bahkan dalam masa krisis sekarang ini. Sementara dari sisi pengeluaran, investasi dan ekspor merupakan pendukung utama perekonomian Cina, masing-masing sekitar 40% dari GDP.¹⁹

¹⁸ <http://id.ibtimes.com/articles/1756/20100617/cicc-Cina-mungkin-menghadapi-tingkat-pengangguran-tinggi-pada-2011.htm>, 17 Juni 2010, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2011.

¹⁹ Umar Juoro, "Arah Investasi Cina Di Indonesia", 20 Agustus 2009, <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/36-juni-2009/107-arah-investasi-Cina-di-indonesia.html>, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2011.

E. TENAGA KERJA CINA DI INDONESIA

Masuknya TKA ke Indonesia tidak lepas dari masuknya investasi asing ke Indonesia.²⁰ Sejak tahun 1967, Indonesia telah membuka peluang investor asing masuk ke Indonesia yang pada umumnya bergerak pada bidang sumber daya alam. Dalam perkembangannya di masa orde baru, investasi asing terus berkembang dan menjadi kekuatan pembangunan ekonomi Indonesia.²¹ Hal itu terus berlanjut hingga sekarang, ketika situasi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Salah satu keuntungan penggunaan TKA adalah sebagai bagian dari perdagangan jasa dapat menjadi sumber nilai tambah (*value added*) yang cukup besar.

²⁰Bahkan lebih dahulu hadir peraturan penggunaan TKA, sejak tahun 1958. Hal itu dapat dilihat pada Undang Undang No.3 Tahun 1958 tentang penempatan TKA. Undang-undang tersebut secara jelas telah memberikan kesempatan masuknya TKA ke pasar tenaga kerja Indonesia dengan segala pembatasannya guna melindungi TKI. Hal itu ditindaklanjuti dengan diterbitkan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1974 tentang pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang. Keputusan tersebut berdasarkan pada hasil Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang pentingnya perluasan kesempatan kerja bagi Warga Negara Indonesia. Selain itu, upaya memanfaatkan sebanyak mungkin tenaga kerja Indonesia pada proyek-proyek pembangunan dan kegiatan usaha lainnya di Indonesia, baik dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, termasuk yang dilakukan dalam rangka bantuan proyek dan bantuan teknik. Adapun peraturan atau keputusan setingkat Presiden dan Menteri yang berturut-turut diterbitkan berfungsi untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan TKA pada sektor-sektor tertentu.

²¹Dasar hukumnya adalah UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diperbaharui dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU tersebut diperkuat dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1994 yang meratifikasi Perjanjian Pendirian WTO pada bulan November 1994. Ketiga UU tersebut secara bertahap meliberalkan ekonomi Indonesia. Di satu sisi liberalisasi dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, liberalisasi telah meminggirkan sebagian anggota masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah. Di Indonesia, investasi asing meski sudah ada sejak beberapa dekade tetap merupakan salah satu yang kontroversial.



Pada dasarnya, sebagaimana tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003, penggunaan TKA dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi dan memperluas lapangan pekerjaan dan keahlian bagi tenaga kerja Indonesia (TKI). Keberadaan TKA diharapkan memicu terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi kepada TKI sehingga kemampuan dan ketrampilan TKI akan berkembang dengan sendirinya. Dalam hal itu, penggunaan TKA merupakan suatu peluang. Di sisi lain, penggunaan TKA juga merupakan suatu tantangan ketika pelaksanaan penggunaan TKA tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya, sebagai contoh TKA asal Cina yang berada di Indonesia.



Dalam hal jumlah, penggunaan TKA Cina tidak terlepas dari perubahan ekonomi dan politik suatu negara. Di Indonesia, jumlah TKA pada umumnya dan khususnya dari Cina setelah tahun 2005 relatif lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun tepat sesudah terjadi reformasi. Selain adanya perubahan politik, pada saat yang sama juga terjadi krisis moneter tahun 1998. Investasi mengalami penurunan yang signifikan dan baru mulai berkembang kembali pada tahun 2005. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mencatat bahwa pada tahun 2001 jumlah TKA di Indonesia sebesar 24.319 orang dan sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2003, yaitu hanya mencapai 18.138 orang yang pada umumnya masih dikuasai oleh TKA non-Asia. Baru pada tahun 2005 mengalami peningkatan kembali.

Data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja RI (Pusdatinaker) menunjukkan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia berasal lebih dari 163 negara. Bila dilihat dari persentase tertinggi dalam tiga tahun terakhir, awalnya TKA asal Jepang lebih menguasai pasar tenaga kerja pada tahun 2007 (10,307%). Namun sejak tahun 2008, didominasi oleh Cina yaitu 16,35% (2008) dan 19,23% (2009), dibandingkan dari Jepang 12,62% (2008) dan 8,62% (2009). Besarnya jumlah TKA dari Cina juga tidak lepas dari

Tabel 7. Jumlah Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Asal dan Jumlah

No	Asal	Th. 2007	%	Th. 2008	%	Th 2009	%
	Non-ASIA	19.115	25,6	20.845	24,9	13.699	23,0
1	Amerika Serikat	4.504	6,02	5.062	6,05	3.306	5,55
2	Australia	5.219	6,98	5.699	6,81	3.488	5,86
3	Belanda	1.053	1,41	1.113	1,33	824	1,38
4	Inggris	3.937	5,26	4.237	5,06	2.850	4,78
5	Jerman	1.290	1,72	1.404	1,68	976	1,64
6	Kanada	1.412	1,89	1.476	1,76	1.026	1,72
7	Perancis	1.700	2,27	1.854	2,22	1.229	2,06
	ASIA (non-ASEAN)	33.219	44,4	38.619	46,1	26.111	43,8
1	China	9.851	13,17	13.678	16,35	11.455	19,23
2	India	5.126	6,85	5.760	6,88	3.688	6,19
3	Jepang	10.307	13,78	10.557	12,62	5.133	8,62
4	Korea Selatan	6.072	8,12	6.683	7,99	4.438	7,45
5	Taiwan	1.863	2,49	1.941	2,32	1.397	2,35
	ASEAN	16.146	21,6	17.127	20,5	12.452	20,9
1	Filipina	4.531	6,06	4.313	5,15	2.675	4,49
2	Malaysia	6.163	8,24	6.582	7,87	4.408	7,40
3	Singapura	3.715	4,97	3.744	4,47	1.763	2,96
4	Thailand	1.737	2,32	2.488	2,97	3.606	6,05
1	<i>Negara-negara lainnya</i>	6.308	8,43	7.091	8,5	7.306	12,3
	TOTAL	74.788	100,0	83.682	100,0	59.568	100,0

Sumber: Diolah dari data Pusdatinaker, 2010.

dibukanya upaya hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Cina, yang berujung pada FTA ASEAN–Cina (ACFTA) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Sementara itu, persentase TKA dari Amerika, Eropa, dan Australia terlihat hampir berimbang. Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan adanya desakan Perdana Menteri Malaysia untuk dapat menarik investor dari intra-ASEAN, yang kemudian didukung Indonesia dan Singapura. Dengan adanya kesepakatan *ASEAN Investment Area (AIA)* pada tahun 1998, Indonesia mulai banyak membuka diri pada investasi intra ASEAN.²²

²² Tri Nuke Pudjiastuti, “Kepentingan Indonesia dalam Komunitas Ekonomi ASEAN”, dalam Adriana Elisabeth (Ed), *Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN*, LIPI Press, Jakarta, 2009, hlm.188-189.

Tabel 8. Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Asal dan Lapangan Usaha (s.d. Mei 2010)

No.	Asal	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, & Perikanan	Pertambangan & Pengangkutan	Industri Pengerahan	Listrik, Gas & Air	Konstruksi	Perdagangan Rumah Makan & Jasa Akomodasi	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	Lemb. Keu., Real Estat, Persewaan & Jasa Perusahaan	Jasa Kemasyarakatan Sosial & Perseorangan	Jumlah
	Non-ASIA	105	914	835	1.210	925	2.005	371	953	2.497	9.815
1	Amerika Serikat	21	178	130	502	135	306	68	194	1006	2.540
2	Australia	22	540	207	187	364	539	64	295	457	2.675
3	Belanda	12	11	70	8	63	199	50	78	127	618
4	Inggris	35	128	146	354	235	372	79	223	576	2.148
5	Jerman	7	9	160	8	39	236	48	43	218	768
6	Kanada	1	20	4	19	4	16	9	13	24	110
7	Perancis	7	28	118	132	85	337	53	107	89	956
	ASIA(non-ASEAN)	610	1.370	8.709	734	2.751	5.338	606	1.328	1.395	22.841
1	China	317	884	2.361	495	1.486	2.134	37	377	529	8.620
2	India	23	323	991	96	334	786	103	352	203	3.211
3	Jepang	77	65	2.531	132	806	909	181	404	190	5.295
4	Korea Selatan	70	93	2.067	9	114	1.295	223	177	324	4.372
5	Taiwan	123	5	759	2	11	214	62	18	149	1.343
	ASEAN	1.278	692	1.777	262	1.050	1.820	512	538	858	8.787
1	Filipina	56	83	420	56	359	318	162	170	631	2.255
2	Malaysia	607	154	775	115	415	891	136	251	85	3.429
3	Singapura	11	50	470	65	183	409	109	108	133	1.538
4	Thailand	604	405	112	26	93	202	105	9	9	1.565
	Negara lainnya	81	303	585	426	514	1.055	308	260	1006	4.538
	TOTAL	2.074	3.279	11.906	2.632	5.240	10.218	1.797	3.079	5.756	45.981
	%	4,5	7	25,9	5,7	11,4	22,2	3,9	6,7	12,5	100,0

Sumber: Diolah dari data Pusdatinaker, 2010.

Sementara itu, data tahun 2009 menunjukkan bahwa TKA Cina yang bekerja di Indonesia jumlahnya menurun. Direktur Pembinaan TKA, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), menyatakan bahwa kecenderungan turunnya jumlah TKA di Indonesia salah satunya disebabkan adanya krisis ekonomi global tahun 2008. Tren penurunan jumlah TKA masih terus berlanjut pada tahun 2009 sehingga penempatan TKA dalam jabatan juga mengalami perubahan. Meskipun mengalami penurunan, TKA asal Cina menunjukkan tren pergeseran dari yang mayoritas *highly skilled* menjadi semi *skilled* yang masuk dalam pasar tenaga kerja di Indonesia. Pergeseran tersebut sebenarnya sebagai suatu ancaman atas perlindungan dan kesempatan TKI. Pada kategori jabatan tata usaha dan pekerjaan kasar, seharusnya tidak diberikan kepada TKA. Kalaupun ada, hanya dalam jangka waktu tertentu. Seharusnya posisi teknisi dan tenaga tata usaha, yang saat ini sudah banyak jenjang pendidikan di Indonesia mempersiapkan TKI pada level tersebut, dapat diambil alih setelah dilakukan transfer pengetahuan dan teknologi.

Persoalannya menjadi lebih serius ketika data di atas menunjukkan bahwa TKA asal Cina masuk di seluruh sektor dan cukup mendominasi. Namun, jumlah terbesar yang diminati adalah pada industri pengolahan yang bersaing ketat dengan TKA asal Jepang dan Korea Selatan. Selain itu, TKA juga menunjukkan minat besar pada jasa konstruksi, perdagangan, dan jasa rumah makan serta akomodasi.

Sebenarnya, komitmen Indonesia atas penggunaan TKA didasarkan pada *economic need test*, yaitu kebutuhan untuk TKA yang dimaksud. Tiap sektor memiliki spesifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Hal itu diperjelas dengan bidang-bidang tugas tertentu dan jabatan-jabatan tertentu yang diperkenankan untuk diisi oleh TKA. Kehadiran TKA dalam perekonomian Indonesia secara konseptual adalah untuk menguatkan kemampuan dan kompetensi

tenaga kerja lokal di masa mendatang, dengan memanfaatkan TKA dalam hal *transfer of knowledge*.²³ Namun demikian, ternyata dalam kenyataannya sangat sedikit *transfer of knowledge* tersebut bila tidak mau dikatakan tidak ada.

Menariknya, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan bahwa belum ada kesepakatan baik secara bilateral maupun regional terkait dengan pembukaan pasar tenaga kerja. Seluruh negara yang masuk FTAs masih menggunakan dan menerapkan aturan negaranya masing-masing dalam memperlakukan TKA. Lebih jauh lagi, sektor jasa TKA merupakan yang paling banyak persoalan dalam ketenagakerjaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penggunaan TKA tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam kesepakatan FTA di dalam ASEAN maupun dengan negara mitra.

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa beragamnya sektor dan luasnya wilayah yang mempekerjakan TKA menjadikan banyak persoalan tidak dapat dihindari. Hal itu terlihat dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mendeportasi TKA yang tidak memiliki legalitas status.²⁴ Oleh karena itu,

²³ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 45 ayat 1.

²⁴ Kasus banyaknya TKA yang dideportasi lebih banyak karena menyalahgunakan status visa dan *overstayers*, selain ada yang merupakan *illegal entry* ke Indonesia, salah satunya kasus dua kabupaten Kaiwana-Papua Barat. Kasus lainnya, yaitu di Batam saat ini sedikitnya ada empat ribu TKA yang bekerja di 3.216 perusahaan, dari pihak keimigrasian memperkirakan banyak yang tidak memiliki izin bekerja. Lihat <http://www.tempointeraktif.com/share/?act=tmV3cw=&type=UHJ>, <http://www.riasaptarika.web.id/index.php/2008/09/10/tka-berladang-di-balik-paspor-wisata/> dan http://www.riau.go.id/index.php?mod=isi&cid_news=4367, diunduh pada tanggal 16 April 2010.

²⁴ Setidaknya sebagai contoh kasus, pada tahun 1974 warga Malaysia dan Cina yang memiliki kemudahan izin tinggal terbatas (KITAS) dari keimigrasian untuk bekerja di kapal. Namun pada kenyataannya, mereka bekerja di perusahaan pengalengan ikan di kabupaten Kaiwana-Papua Barat. Kasus lainnya yaitu di Batam saat ini sedikitnya ada empat ribu TKA yang bekerja di 3.216 perusahaan, dari pihak keimigrasian memperkirakan banyak yang tidak memiliki izin bekerja. Lihat <http://www.tempointeraktif.com/share/?act=tmV3cw=&type=UHJ>, <http://www.riasaptarika.web.id/index>.

dapat disimpulkan bahwa di dalam atau luar kerangka FTA masih terdapat persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan TKA, yaitu:

- 1) Kejelasan batasan kepentingan (*urgency*) penggunaan TKA pada institusi asing maupun institusi nasional dan lokal (seperti yayasan dan perusahaan);
- 2) Standar kompetensi dan kualifikasinya, meskipun secara sektoral telah ada pengaturannya;
- 3) Kejelasan penggunaan TKA mulai dari proses perizinan hingga pemutusan hubungan kerja serta belum jelasnya perbedaan ketika TKA tersebut dibawa oleh perusahaan dengan sebagai MNP;
- 4) Penekanan dan sanksi ketika tidak mematuhi penyelenggaraan/ pengadaan tenaga kerja lokal sebagai pendamping/magang untuk mendapatkan *transfer of knowledge* dan teknologi;
- 5) Pengaturan kompensasi TKA yang tidak diskriminatif atas tenaga kerja lokal ketika kualifikasinya sama;
- 6) Pengaturan perpanjangan TKA dan pemanfaatan tenaga kerja lokal yang semula menjadi pendamping/magang;
- 7) Kejelasan hubungan pusat dan daerah terkait dengan TKA;
- 8) Kejelasan pengawasan dan perlindungan sosial TKA;
- 9) Kejelasan dalam proses pemutusan hubungan kerja dan pesangon.

Bila persoalan-persoalan di atas tidak segera dibereskan, legalitas, selektivitas, keamanan, dan kebermanfaatn TKA menjadi patut dipertanyakan. Terlebih lagi dalam kerangka FTA dan AEC yang menekankan bahwa pada tahun 2015, pasar jasa tenaga kerja akan lebih terbuka. Oleh karena itu, Indonesia mau tidak mau harus mengatur strateginya dalam kaitannya dengan TKA maupun tenaga

http://www.riau.go.id/index.php?mod=isi&id_news=4367, diunduh pada tanggal 16 April 2010.



kerja dalam negeri, bila tidak ingin terjadi persoalan-persoalan yang lebih besar, yaitu pemutusan hubungan kerja tenaga kerja lokal. Hal itu dapat terjadi sebagai akibat ketidakmampuan Indonesia dalam mengembangkan pasar tenaga kerja lokal yang kompetitif.

Banyaknya peraturan yang ditujukan pada penggunaan TKA ternyata tidak sepenuhnya menjamin pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu persoalan yang banyak mewarnai kehidupan politik di Indonesia adalah persoalan desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan sistem politik tersebut yang kurang diikuti dengan persiapan infrastruktur yang cukup di daerah membuat persoalan, salah satunya persoalan penggunaan TKA di daerah menjadi serius. Akibatnya, kewenangan yang diberikan kepada daerah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota, untuk perpanjangan pengurusan perizinan penggunaan TKA sering kali terasa sangat birokratis dan membutuhkan waktu yang lama. Padahal, izin penggunaannya hanya dalam jangka waktu satu tahun saja yang kemudian dapat diperbarui hingga batas waktu dua tahun pada jabatan yang sama.

F. DAMPAK BURUK BAGI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA

Data Kementerian Perindustrian tahun 2010 menunjukkan terdapat sektor industri padat karya yang terkena dampak implementasi ACFTA, meliputi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri alas kaki (sepatu), industri elektronik, industri mebel kayu dan rotan, industri mainan anak, industri permesinan, industri besi dan baja, industri makanan dan minuman, serta industri jamu dan kosmetik. Indikasi kerugian implementasi ACFTA antara lain menurunnya produksi (industri) sekitar 25–50%, penurunan penjualan di pasar domestik 10–25%, dan penurunan keuntungan 10–25%. Selain itu, pengurangan tenaga kerja diperkirakan mencapai 10–25%.



Persoalan menjadi lebih serius karena kini masalahnya bukan orang per orang pekerja seperti dengan masuknya TKA Cina ke Indonesia, tetapi penurunan produksi berdampak pada pengurangan pekerja yang mayoritas adalah para pekerja kelas bawah di Indonesia. Padahal, sebagaimana disebutkan di depan, lebih dari 50% pekerja di Indonesia adalah para pekerja kategori kurang trampil. Forum Perjuangan Petani menyatakan bahwa Serikat Pekerja menolak pelaksanaan ACFTA yang memungkinkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Lebih lanjut, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menegaskan bahwa yang masuk ke Indonesia bukan saja investasi, tetapi membanjirnya produk Cina yang harganya lebih murah dengan kualitas buruk tersebut. Kondisi tersebut selain berdampak besar pada pasar domestik, juga mematikan produk Indonesia.²⁵ Artinya, secara perlahan mematikan perusahaan dan mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi para pekerja yang berbangsa Indonesia. Diperkirakan bahwa akan ada sekitar 2,5 juta pekerja intensif di sektor sandang dan kulit serta industri pertanian akan kehilangan pekerjaan. Lebih buruk lagi akan ada dana sekitar 1 triliun rupiah yang harus disiapkan untuk membayar klaim pemutusan hubungan kerja.

Keadaan yang demikian sebenarnya telah diantisipasi oleh Kementerian Bidang Perekonomian di Indonesia, yang diupayakan untuk dinegosiasikan ulang dan upaya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta akan memonitor dan mendeteksi PHK. Namun demikian, ternyata dalam implementasinya masih jauh dari harapan, tidak hanya untuk para pekerja kelas bawah, kesulitan ini juga terasa oleh para pekerja kategori ahli yang banyak kehilangan kesempatan karena tidak adanya pembatasan bagi TKA di Indonesia.

²⁵ Sekitar dua puluh organisasi Serikat pekerja menyelenggarakan Konferensi Pers di Jakarta yang diorganisasi oleh Komando Revolusioner (KOBAR) yang menyatakan penolakan atas pelaksanaan CAFTA. Lihat Ivan Lim dan Phillipp Kauppert, "Dilema Politik Dalam Menghadapi CAFTA: Apa Pilihan untuk Indonesia?", *Jurnal Sosial Demokrasi*, Vol 8, No. 3, 2010, hlm 64–65.



Hilangnya kesempatan para pekerja yang berwarga negara Indonesia tersebut, akan berdampak multidimensional. Tidak hanya beban negara atas besarnya pengangguran dan rentan kemiskinan, tetapi dengan hilangnya kemampuan masyarakat untuk mendapatkan penenuhan kebutuhan juga akan mengurangi kemampuan seseorang mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang pada ujungnya memicu meningkatnya kemungkinan terjadinya kriminalitas. Bila keadaan itu terjadi secara nasional, dapat dipastikan MDGs 2014 akan jauh dari harapan.

Disadari atau tidak, negara telah melemahkan kepentingan nasionalnya sendiri. Kerentanan masyarakat tumbuh subur karena negara tidak mampu melindungi kepentingan bangsanya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kerentanan ini akan menimbulkan potensi konflik yang lebih serius. Setidaknya, belajar dari banyaknya PHK dan demonstrasi karyawan dan yang di-PHK di kawasan industri menimbulkan kerugian tersendiri karena produksi terhenti. Data Kemnakertrans menunjukkan bahwa pada tahun 2010 jumlah kasus dan orang yang di-PHK menurun, hanya 1.432 kasus (16.393 orang) dari 4.979 kasus (30.181 orang) pada tahun 2009. Namun demikian, bila diperhatikan kasus 2009 hingga sekarang, banyak yang belum selesai. Jadi, meskipun dari sisi jumlah menurun, sebenarnya kasus-kasus tersebut menumpuk. Kerentanan inilah yang tidak bisa dihindari.

G. PENUTUP

Hubungan Indonesia-Cina dalam kerangka ACFTA, khususnya di sektor jasa dan tenaga kerja, pada dasarnya tidak dapat dihindari karena sudah berlangsung. Hal ini tidak hanya menjadi persoalan bilateral, tetapi juga menjadi persoalan regional ASEAN. Namun demikian, sebenarnya kekuatan kualitas dan kuantitas SDM Cina yang dimanfaatkan untuk mengembangkan *world manufacture base*,

seharusnya mampu dimanfaatkan Indonesia sebagai wahana untuk mentransformasi SDM-nya melalui *learning process*. Apalagi sebenarnya Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya, aspek substansial pada penataan politik ekonomi di Indonesia haruslah menjadi tugas negara untuk mengintervensi secara terukur ketika menyangkut hajat hidup masyarakat luas, sebagai kewajiban negara untuk melindungi dan mengejawantahkan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Laju ekspansi Cina ke negara-negara ASEAN, khususnya ke Indonesia, tidak terbendung lagi dan semua akan menjadi petaka bagi Indonesia bila negara tidak mampu menata dan menegakkan hukum internal negara Indonesia. Indonesia hanya akan menjadi objek yang menarik bagi siapapun yang hendak memanfaatkannya, termasuk negara Cina dalam kerangka ACFTA.

DAFTAR PUSTAKA

- “ASEAN Economic Blueprint”, dalam *Roadmap for an ASEAN Community 2009–2015*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009.
- Angang, Hu dan Sheng Xin, “Urban Unemployment in China: A Background Analysis (1995–2003)”, dalam Lee, Grace O. M. and Malcolm Warner (Eds.), *Unemployment in China: Economy, Human Resources and Labour Markets*, London: Routledge, 2007.
- Berita Resmi Statistik No. 33/05/Th. XIII*, 10 Mei 2010.
- Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerja Sama Ekonomi Internasional, *Perkembangan Jasa-Jasa dan Posisi Indonesia dalam Perundingan GATS ke Depan*, Bappenas, Jakarta, 2004.
- Elisabeth, Adriana, “Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN: Urgensi dan Permasalahannya” dalam Adriana Elisabeth (Ed), *Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN*, LIPI Press, Jakarta, 2009.
- Hew, Denis, “Introduction: Brick by Brick—The Building of an ASEAN Economic Community” dalam Denis Hew (Ed.), *Brick by Brick—The Building of an ASEAN Economic Community*, ISEAS, Singapura, 2007.
- <http://id.ibtimes.com/articles/1756/20100617/cicc-Cina-mungkin-menghadapi-tingkat-pengangguran-tinggi-pada-2011.htm>, 17 Juni 2010, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2011.

- <http://www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%20Ekonomi%20ASEAN.doc>, diunduh pada tanggal 2 Agustus 2011.
- <http://www.riasaptarika.web.id/index.php/2008/09/10/tka-berladang-di-balik-paspor-wisata/>, diunduh pada tanggal 16 April 2010.
- <http://www.riasaptarika.web.id/index.php/2008/09/10/tka-berladang-di-balik-paspor-wisata/>, diunduh pada tanggal 16 April 2010.
- http://www.riau.go.id/index.php?mod=isi&id_news=4367, diunduh pada tanggal 16 April 2010.
- http://www.riau.go.id/index.php?mod=isi&id_news=4367, diunduh pada tanggal 16 April 2010.
- <http://www.tempointeraktif.com/share?act=tmV3cw=&type=UHJ>, diunduh pada tanggal 16 April 2010.
- “Introduction To ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)”, <http://www.aseansec.org/>, diunduh pada tanggal 24 Agustus 2010.
- Juoro, Umar. “Arah Investasi Cina Di Indonesia”, 20 Agustus 2009, <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/36-juni-2009/107-arrah-investasi-Cina-di-indonesia.html>, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2011.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973* tentang pentingnya perluasan kesempatan kerja bagi Warga Negara Indonesia. *Kompas*, 21 Juni 2011.
- Lim, Ivan dan Phillipp Kauppert, “Dilema Politik Dalam Menghadapi CAFTA: Apa Pilihan untuk Indonesia?”, *Jurnal Sosial Demokrasi*, Vol 8, No. 3, 2010.
- Pudjiastuti, Tri Nuke, “Kepentingan Indonesia dalam Komunitas Ekonomi ASEAN” dalam Adriana Elisabeth (Ed), *Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN*, LIPI Press, Jakarta, 2009.
- Sungkar, Jasmin, “Isu Perdagangan Bebas Barang dan Jasa dalam Komunitas Ekonomi ASEAN” dalam Adriana Elisabeth (Ed), *Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN*, LIPI Press, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang No.3 Tahun 1958* tentang Penempatan TKA.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007* tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1994*
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003* tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang No.1 Tahun 1967* tentang Penanaman Modal Asing
- Webber, Michael dan Zhu Ying, “Primitive Accumulation, Transition and Unemployment in China”, dalam Grace O.M. Lee and Malcolm Warner (Eds.), *Unemployment in China: Economy, Human Resources and Labour Markets*, Routledge, London, 2007.
- WTO Trade Statistic 2007.





BAB V

Hubungan Indonesia-Cina dari Perspektif Politik-Keamanan

Nanto Sriyanto

A. PENGANTAR

Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan Cina sejak tahun 1950. Hubungan Indonesia dengan Cina kemudian mengalami penurunan yang tajam hingga dibekukan pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965 yang Indonesia curigai tak lepas dari peranan Cina di belakangnya. Hubungan kedua negara dibekukan sejak bulan Oktober 1967 hingga dibuka kembali pada tahun 1990. Pada tahun 2010, dua puluh tahun lebih sejak normalisasi hubungan serta memasuki 60 tahun hubungan bilateral kedua negara, kedua pihak mencanangkan Tahun Persahabatan Indonesia-Cina. Dalam rentang waktu panjang yang telah dilalui, hubungan kedua negara tentunya mengalami pasang surut, bahkan mencapai titik nadir saat Indonesia membekukan hubungan diplomatik. Hingga kini, perkembangan hubungan ekonomi kedua negara menunjukkan peningkatan tajam yang terlihat melalui angka ekspor-impor kedua negara. Ekspor (migas dan nonmigas) Indonesia ke Cina dalam kurun waktu 2006–2010 meningkat dari US\$ 8,34 juta menjadi US\$ 15,69 juta, sedangkan impor Indonesia dari Cina juga meningkat dari US\$ 6,64 juta menjadi US\$ 20,42 juta.¹ Angka perdagangan tersebut menunjukkan

¹ http://www.kemendag.go.id/statistik_neraca_perdagangan_dengan_negara_mitra_dagang/



lonjakan ekspor Indonesia yang juga dibarengi impor yang tak kalah tinggi. Pada tanggal 25 April 2005 kedua negara bahkan telah menandatangani kemitraan strategis yang ditandatangani oleh Presiden Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao.

Perkembangan hubungan kedua negara dari sisi keamanan juga terlibat dalam sejumlah isu krusial. Meski hubungan Indonesia-Cina pada era Reformasi pascakejatuhan Presiden Soeharto mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sejumlah isu keamanan masih cukup penting dalam perkembangan bilateral kedua negara maupun perkembangan isu penting di kawasan. Persoalan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia masih cukup penting meski telah mengalami pergeseran bila memperhatikan pada tahun 1990-an saat Orde Baru masih memegang pemerintahan di Indonesia. Kebangkitan Cina yang digadang-gadang oleh Cina sebagai kebangkitan yang damai (*peaceful rise*) menurut sebagian pihak perlu diwaspadai sebagai kekuatan yang suatu saat dapat menjadi sumber ketegangan keamanan di kawasan. Hal itu dikaitkan dengan ketegangan dan konflik klaim wilayah di seputar kepulauan di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina dan sejumlah negara ASEAN.

Indonesia sendiri pada era Reformasi mengalami perubahan persepsi keamanan yang ditandai dengan tercantumnya sejumlah isu keamanan nontradisional dalam buku putih pertahanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan. Selain itu, masih ditetapkan pula sejumlah isu teritorial yang dapat mengancam keutuhan wilayah Indonesia. Faktor ancaman eksternal menurut perumus kebijakan pertahanan Indonesia memang tidak dirumuskan sebagai ancaman invasi asing, tetapi pertimbangan keamanan masih menempatkan persoalan perbatasan dengan sejumlah negara tetangga, yaitu keamanan dalam hal perlindungan sumber daya alam, keamanan perbatasan, dan pelanggaran batas yang dilakukan oleh negara lain. Dalam hal lain, Indonesia juga sangat berkepentingan dengan pergeseran kekuatan



bagi arsitektur keamanan kawasan di Asia Timur.² Akibat dari hal itu adalah kebijakan luar negeri Indonesia selama satu dasawarsa pas-careformasi dapat dikatakan memiliki empat tujuan utama, yaitu: (1) mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi; (2) penguatan integritas teritorial dan keamanan nasional; (3) konsolidasi demokrasi; dan (4) meningkatkan postur diplomasi Indonesia di kawasan dan internasional. Dalam hal ini, beberapa negara menjadi penting bagi Indonesia untuk memenuhi tujuan kebijakan luar negeri tersebut.³

Sementara itu, di pihak Cina, persoalan keamanan yang penting antara lain persoalan pasokan bahan baku dan pasar bagi industri dalam negerinya. Cina dalam pendekatan keamanan energinya sangat menekankan pada *state centric* yang berupaya mendekatkan negara-negara penghasil sumber daya energi melalui pendekatan ekonomi dan keamanan. Geliat kebutuhan energi di Cina sendiri merupakan bagian penting dari industrialisasi yang berlangsung pesat sejak tahun 1990-an. Kebangkitan ekonomi Cina juga dibarengi dengan peningkatan kekuatan militer Cina dengan program modernisasinya. Hal terakhir ini menjadi kecemasan tersendiri bagi sejumlah negara, terutama dengan anggapan tidak transparannya Cina terhadap perkembangan militernya. Meskipun Cina sudah terlibat dalam kerja sama regional, baik ARF (*ASEAN Regional Forum*) maupun forum lainnya, kekuatan Cina yang membuatnya semakin asertif, terutama dalam persoalan teritorial tak pelak membuat sejumlah negara menimbang kebangkitan Cina sebagai faktor penting yang harus dikendalikan, kalau tidak mau dibilang sebagai ancaman.

² Rizal Sukma, "Indonesia's Security Outlook, Defence Policy, and Regional Cooperation" dalam The National Institute for Defense Studies, *Asia Pacific Countries' Security Outlook and Its Implications for the Defense Sector*, NIDS Joint Research Series No. 5, 2010, hlm. 152.

³ Dewi Fortuna Anwar, *A Journey of Change: Indonesia's Foreign Policy*, (V4N3 Fall 2009, Cover Stories, September 2009, http://www.globalasia.org/V4N3_Fall_2009/Dewi_Fortuna_Anwar.html)

Berdasarkan latar belakang demikian, bab ini mendiskusikan persoalan keamanan antara Indonesia dan Cina. Pijakan yang digunakan adalah persepsi ancaman dari kedua pihak yang berkembang sejak pemulihan hubungan diplomatik di tahun 1990-an hingga kini. Rentang waktu tersebut akan memberikan perbandingan gambaran mengenai hubungan kedua negara sejak dibuka dan masih di bawah pemerintahan Orde Baru dan hubungan di era Reformasi. Isu yang dibahas adalah persoalan dan ganjalan keamanan antara Indonesia dan juga peluang yang dapat dimanfaatkan dalam hubungan keamanan Indonesia dan Cina. Hubungan kedua pihak juga dibahas pada tingkat kawasan dengan mempertimbangkan sejumlah isu keamanan kawasan, seperti klaim perbatasan dan keamanan maritim selain juga persoalan keamanan nontradisional. Tulisan ini menggunakan perspektif Indonesia sehingga untuk beberapa aspek menempatkan Cina sebagai “mitra statis” atau tidak banyak menggali perspektif Cina dalam persoalan hubungan bilateral.

B. PERSEPSI KEAMANAN INDONESIA DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI PASCAREFORMASI

Reformasi telah membawa perubahan besar dalam struktur politik domestik sekaligus politik luar negeri. Di ranah domestik, kekuasaan presidensial terhadap lembaga tinggi lainnya mengalami perubahan. Presiden tidak lagi berada pada posisi dominan dibandingkan saat Presiden Soeharto masih memegang kendali pemerintahan. Di ranah politik luar negeri, postur politik luar negeri Indonesia mengalami pergeseran. Hal pertama yang terjadi adalah pengurangan jumlah pos diplomatik yang dimiliki Indonesia sebagai akibat keguncangan ekonomi akibat krisis ekonomi Asia 1997. Indonesia juga mengalami keguncangan dengan menguatnya isu separatisme usai pergantian rezim di tahun-tahun tersebut. Indonesia pada periode ini mengalami perubahan drastis dari negara besar dan berpengaruh di kawasan



hingga menjadi sebuah negara yang untuk menjaga keamanan domestiknya saja cukup kerepotan. Transisi rezim pasca-Reformasi juga menunjukkan gejala lemahnya negara di Indonesia yang dibarengi dengan surutnya peranan Indonesia di dunia internasional.⁴

Persoalan separasi menjadi salah satu fokus penting bagi Indonesia menyusul kemerdekaan yang diperoleh Timor Timur usai jejak pendapat. Hal itu yang juga mendorong Indonesia untuk mengedepankan politik luar negeri yang dapat menjaga integritas teritorialnya. Hubungan luar negeri Indonesia yang dilakukan pada masa awal Reformasi hingga paruh pertama dasawarsa abad 21 mengedepankan hubungan dengan negara-negara sahabat yang dapat mendukung integritas nasional Indonesia. Selain itu, persoalan ekonomi yang mengguncang Indonesia juga mendorong politik luar negeri yang menghasilkan keuntungan ekonomi, terutama dengan berkembangnya ekonomi kawasan pascakrisis. Keberadaan Indonesia dalam perdagangan bebas di kawasan dan kebutuhan akan investasi asing menjadi salah satu kunci penting kepentingan nasional Indonesia bagi stabilitas ekonomi sekaligus keamanan Indonesia.

Seiring dengan berjalan baiknya transisi demokrasi yang berlangsung pasca-Orde Baru, Indonesia kembali menunjukkan posisi aktifnya di dalam forum internasional. Indonesia menempatkan ASEAN sebagai poros utama dalam percaturan politik internasional di kawasan. ASEAN merupakan penjur utama Indonesia dalam menghadapi persoalan regional, termasuk di dalamnya gejolak keamanan yang terjadi di Laut Cina Selatan.⁵ Indonesia juga tetap mengedepankan PBB sebagai lembaga dunia yang sepatutnya berada

⁴ Dewi fortuna Anwar, "Foreign Policy, Islam, and Democracy in Indonesia", *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, 2010, hlm. 39.

⁵ Rizal Sukma, "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort Amid Uncertainties" dalam *Chapter 5 NIDS Joint Research Series No. 5, Asia Pacific Countries' Security Outlook and Its Implications for the Defense Sector*; Jepang, The National Institute for Defense Studies, 2010.





di garda terdepan dalam menangani persoalan dunia, termasuk isu terorisme yang mencuat pascatragedi 11 September yang menimpa Amerika Serikat. Multilateralisme yang dikedepankan Indonesia ini antara lain dikemukakan oleh Presiden Megawati dalam lawatannya ke Rusia. Indonesia secara implisit mengkhawatirkan aksi unilateral yang dilakukan negara adidaya dalam menangani persoalan dunia yang akar persoalannya bertalian dengan beragam persoalan lainnya. Hal itu juga yang menjadi dorongan Indonesia untuk mengedepankan lembaga multilateral dalam menyelesaikan isu regional, terutama dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Timur. Forum multilateral bagi Indonesia merupakan solusi yang dapat membuat pihak negara besar dan kecil di kawasan untuk dapat lebih menemukan solusi bersama.⁶

Politik luar negeri Indonesia sejak era Abdurrahman Wahid hingga Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan geliat untuk mengedepankan prinsip politik bebas aktif. Meski dengan beberapa interpretasi yang beragam pada tiap pelaksanaannya, Indonesia pada dasarnya berupaya untuk dapat mandiri dengan seluas mungkin membina hubungan dengan negara sahabat. Di era Abdurrahman Wahid bahkan kecenderungan Indonesia untuk dapat membina hubungan dengan negara-negara di luar negara Barat menjadi salah satu ciri yang kentara. Abdurrahman Wahid selain banyak melakukan kunjungan ke negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin, juga menjadikan Republik Rakyat Cina (RRC) sebagai negara pertama yang dikunjungi saat menjabat sebagai presiden.⁷ Kunjungan kenegaraan Presiden Megawati ke Beijing pada tahun 2002 bahkan menghasilkan sejumlah kerja sama, khususnya pertanian dan energi, yang semakin mempererat hubungan kedua negara. Menurut Novotny, hubungan

⁶ Rizal Sukma, "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort Amid Uncertainties", *op.cit.*

⁷ *Ibid.*

Indonesia dengan negara besar di kawasan dan dunia pada era Reformasi mengalami pergeseran dengan melihat perubahan ancaman yang muncul dari perilaku negara besar. Secara bilateral, dengan mengambil contoh kasus persepsi ancaman Indonesia atas Cina dan Amerika Serikat, Novotny menegaskan bahwa terdapat pergeseran persepsi atas kedua negara tersebut. Hubungan Indonesia dengan Cina membaik pasca-Reformasi berbarengan dengan dukungan Cina secara ekonomi kepada negara-negara Asia yang mengalami krisis ekonomi. Bantuan keuangan yang diberikan Cina kepada Indonesia merupakan bentuk konkrit yang mendukung terbentuknya citra Cina sebagai kekuatan besar yang mendukung kepentingan Indonesia. Sementara itu, persepsi Indonesia atas perilaku Amerika Serikat dan negara-negara barat yang meninggalkan dan bahkan mengambil keuntungan dari lepasnya Timor Timur serta penggunaan tuduhan pelanggaran HAM menurut sebagian elite di Jakarta sebagai bentuk campur tangan terhadap politik domestik Indonesia.⁸ Berdasarkan paparan kondisi domestik tersebut, faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah dinamika keamanan kawasan terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Cina.

C. DINAMIKA POLITIK KEAMANAN KAWASAN DI ABAD 21

Dinamika kawasan Asia Pasifik di abad 21 merupakan dinamika yang diwarnai dengan kebangkitan ekonomi negara-negara yang pada akhir dasawarwa 1990-an mengalami keguncangan ekonomi, yang bahkan di beberapa negara dibarengi dengan pergantian rezim penguasa.

Dominasi isu ekonomi itu tak lepas dari geliat kebangkitan Cina di sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi mem-

⁸ Daniel Novotný, "Indonesia's Foreign Policy: in Quest for the Balance of Threats", Makalah Seminar pada the 15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia di Canberra 29 Juni – 2 Juli 2004.

buat negara tersebut menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan tidak saja di kawasan, tetapi di dunia. Dalam hal ini, diskusi yang muncul adalah apakah Cina akan menjadi kekuatan yang menandingi dan menyaingi Amerika Serikat atau menjadi salah satu stabilisator dan sumber kemakmuran kawasan dengan kekuatan ekonominya.

Kebangkitan Cina yang dibarengi dengan dilema ancaman dan kesempatan tersebut menjadi topik besar dalam melihat perilaku politik luar negeri negara tirai bambu tersebut. Cina sendiri dalam menegaskan posisinya dalam politik luar negeri di kawasan menunjukkan melalui pengembangan hubungan bilateral dengan banyak negara di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan isu tersebut dan berdasarkan kondisi domestik, Cina pada tahun 2004 menetapkan *grand strategy* dengan tajuk “*peaceful development*” (*heping fazhan*). Strategi itu digenapi dengan formulasi konsep dari Perdana Menteri Hu Jintao “Dunia yang Harmoni”. Penekanan tersebut ditandaskan lebih lanjut dalam buku putih pertahanan Cina yang diliris pada bulan Desember 2005 bertajuk *China’s Peaceful Development Road*. Doktrin kebangkitan Cina yang damai tersebut berlandaskan pada pengembangan hubungan bilateral dan multilateral yang sudah dijalankan sejak akhir 1990-an. Hubungan bilateral yang ditandatangani Cina dengan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mencakup mulai dari aspek kebijakan satu Cina, timbal balik kunjungan dan konsultasi antarpejabat tinggi, hubungan ekonomi, hubungan keamanan energi (baik dalam bentuk pasokan maupun jaminan alur pelayaran), hingga persoalan kemanan non-tradisional, termasuk kerja sama penanggulangan bencana. Hubungan dengan negara-negara ASEAN sendiri mencapai momentum dengan ditandatangani kemitraan strategi dengan organisasi tersebut pada Oktober 2003.⁹

⁹ Carlyle A. Thayer, “Southeast Asian Reactions to China’s Peaceful Development Doctrine: Indonesia, the Philippines, and Thailand”, NBR Analysis, Vol. 18, No. 5,



Hingga tahun 2006, hubungan Cina dan ASEAN secara multilateral telah mencapai 28 kerangka kerja sama yang mencakup konsultasi antarpejabat tinggi dalam persoalan kerja sama politik keamanan, konferensi tahunan menteri luar negeri, dan konferensi tingkat tinggi antarpemimpin negara. Di tingkat bilateral juga cukup memukau dengan keberhasilannya mengembangkan kemitraan strategis dengan sejumlah negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Pada kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla, ke Beijing, Indonesia dan Cina menandatangani kerja sama perdagangan, keamanan energi, infrastruktur, pertanian, perikanan, dan kesehatan sebagai area kerja sama kedua negara.¹⁰



Kehadiran Cina yang meningkat pada forum internasional di kawasan tidak lepas dari perubahan yang terjadi di ranah domestik yang mempengaruhi persepsi ancaman Cina pasca-Perang Dingin. Bila pada era Perang Dingin posisi Beijing sempat diuntungkan dengan adanya ketegangan Washington dan Moskow pada era Carter yang menjalankan *pingpong diplomacy*, pasca-Perang Dingin Beijing melihat hilangnya faktor Moskow dalam percaturan politik dunia di mata Amerika Serikat dan turut mengubah konstelasi politik Amerika di kawasan. Dalam hal ini, Beijing juga melihat Moskow dalam posisi berbeda dan mulai melihat Jepang sebagai sebuah pesaing yang harus diperhatikan dalam interaksi di kawasan. Hal lain yang turut menjadi faktor ancaman bagi Cina adalah persoalan Taiwan. Kemerdekaan Taiwan merupakan isu sensitif bagi publik domestik Cina. Hal ini yang menjadi persoalan penting dan membuat Beijing menjadi sangat tegas dalam persoalan yang menurutnya adalah soal kedaulatan dan keutuhan wilayah.¹¹



April 2008, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

¹¹ Jian Yang, "China's Security Challenges: Priorities and Policy Implications" dalam The National Institute for Defense Studies, *Asia Pacific Countries' Security Outlook and Its*



Kebangkitan Cina sendiri secara eksternal ditandai dengan merebaknya persepsi ancaman Cina dari negara-negara lain. “Teori” mengenai ancaman Cina ini menurut Yan Bai sebagaimana dikutip oleh Jian Yang telah berkembang dalam empat gelombang teori ancaman Cina (*four waves of the Cina threat theory*). Gelombang pertama ditandai dengan hadirnya tulisan Ross Munro yang berjudul “*Awakening Dragon*” yang diterbitkan pada tahun 1992. Gelombang selanjutnya dibarengi dengan krisis Selat Taiwan pada tahun 1995–1996 yang menghadirkan tulisan berjudul “*The Coming Conflict with Cina*”. Gelombang ketiga menyusul selang beberapa tahun (1998–1999) yang hadir berdasarkan *The Cox Report*, kasus mata-mata Wen Ho Lee, dan lanjutan dari kampanye finansial AS terhadap Cina, yang juga pada gelombang ini dipublikasikannya *Year of the Rat and Red Dragon Rising*. Gelombang keempat yang terjadi belakangan (2005–2006) merupakan ancaman Cina yang paling substantif. Hal itu dapat dilihat dari terbitan-terbitan yang menyuarakan ancaman Cina tersebut seperti laporan tahunan Pentagon kepada Kongres AS atas kekuatan militer Cina pada tanggal 19 Juli 2005, yang diikuti dengan *US–China Economic and Security Review Commission’s Annual Report* yang dikeluarkan pada awal November 2005, *the 2006 Quadrennial Defense Review*, serta tak luput juga artikel yang dipublikasikan oleh media AS seperti *The Weekly Standard* dan *The New York Times*.

Ancaman Cina yang didengung-dengungkan tersebut juga tak lepas dari agresivitas Cina di sektor energi. Perkembangan industri Cina menuntut adanya jaminan pasokan energi yang telah dijawab Cina dengan ekspansi besar-besaran di bidang energi. Hal itu mendorong Cina aktif di wilayah-wilayah sumber energi seperti Timur Tengah hingga Afrika. Indonesia sendiri menjadi salah satu sumber pasokan bagi kebutuhan energi Cina. Selain jaminan sumber pasokan, jaminan transportasi keamanan energi menjadi salah satu perhatian

Implications for the Defense Sector, NIDS Joint Research Series, No. 5, 2010, hlm. 144.

Cina. Hal ini menuntutnya untuk aktif memperhatikan keamanan maritim di jalur-jalur pelayaran yang menjadi rute utama armada yang memasok migas bagi industri di daratan Cina. Persoalan energi ini juga yang mendorong Cina memodernisasi armada angkatan lautnya (*PLAN/ People Liberation Army Navy*).¹² Kehadiran PLAN di sejumlah rute rawan merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan armada dengan kekuatan laut dalam. Hal itu salah satunya didasari pada instruksi Laksamana Liu Huaqing di tahun 1988 yang menetapkan rencana pembangunan jangka panjang bagi PLAN. Instruksi itu terdiri dari konsepsi tentang tiga rantai-rantai kepulauan (*island chains*). Tahap pertama adalah pada tahun 2010 PLAN harus mampu menunjukkan kehadirannya sebagai kekuatan armada laut dalam (*deep-water presence*) yang terentang dari Jepang-Taiwan hingga ke Filipina. Selanjutnya, rantai kedua akan dikembangkan dari barat Aleutia hingga ke Kepulauan Mariana di timur Pulau Papua pada tahun 2025. Rantai ketiga akan terentang hingga ke Antartika yang dicanangkan tercapai pada tahun 2050.¹³

Perkembangan ekonomi dan militer Cina serta berkembangnya isu ancaman juga upaya Cina untuk menunjukkan itikad baiknya, menjadi isu penting bagi dinamika keamanan kawasan. Beberapa isu yang berkembang terkait dengan kebangkitan Cina tersebut melibatkan juga persoalan klaim wilayah di Kepulauan Spratly. Tumpang tindih klaim wilayah ini telah menyebabkan ketegangan antara Cina dengan sejumlah negara-negara ASEAN dan juga Taiwan. Sejumlah konflik terbuka antara Cina dan negara-negara ASEAN yang tercatat

¹² Ryan Clarke, "Report on Chinese Energy Security and the Role of the PLAN", *Culture Mandala: Bulletin of the Centre for East-West Cultural & Economic Studies*, Vol. 8, Issue 2, December 2009, hlm. 8.

¹³ Jian Yang, *op.cit*, hlm. 145.

antara lain adalah dengan Vietnam dan Filipina.¹⁴ Cina juga terlibat tumpang tindih klaim wilayah dengan Jepang atas pulau di Laut Cina Timur.¹⁵ Dengan ketegangan yang dapat meletupkan konflik tersebut, peluang dan ancaman atas stabilitas keamanan kawasan menjadi taruhannya. Solusi yang menjadi pilihan untuk mencegah konflik tersebut antara lain melalui mekanisme lembaga multilateral seperti ARF yang salah satu tujuannya pembentukannya oleh ASEAN untuk menempatkan Cina dalam kerangka norma kawasan.

D. FAKTOR PERSEPSI KEAMANAN TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-CINA

Hubungan bilateral Indonesia dengan Cina seperti diuraikan dalam subbab politik luar negeri Indonesia di atas menegaskan pendapat yang menyatakan bahwa hubungan antara kedua negara mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan hubungan perdagangan bilateral antara kedua negara dan penurunan isu sensitif seperti etnis Tionghoa yang berada di Indonesia.

Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia menjadi salah satu faktor penting bagi kedua negara dalam menjalankan hubungan bilateral. Hal tersebut juga yang menjadi kendala dan sempat menimbulkan ketegangan diplomatik terkait dengan perlakuan Indonesia terhadap etnis Tionghoa perantauan tersebut. Namun, perkembangan hubungan kedua negara belakangan menunjukkan keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia telah ditempatkan dalam kerangka yang saling menghormati dan tidak akan mengganggu hubungan diplomatik antara

¹⁴ "Indonesia Stresses Maritime Security at Summit", *The Jakarta Globe*, <http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-stresses-maritime-security-at-summit/479350>, 18 November 2011.

¹⁵ Reinhard Drift, "Japanese-Chinese Territorial Disputes in The East Cina Sea – Between Military Confrontation And Economic Cooperation", *Asia Research Centre Working Paper 24*, 2008.



kedua negara. Hal itu seperti diuraikan oleh Rizal Sukma dengan merujuk pada dua kasus kerusuhan yang menimbulkan korban pada etnis Tionghoa yaitu kerusuhan pada bulan April 1994 di Medan dan kerusuhan Mei 1998. Di kedua kasus tersebut, terdapat perbedaan yang menunjukkan bagaimana kedua pemerintah menempatkan isu etnis Tionghoa dalam hubungan bilateral kedua negara. Pada kerusuhan April 1994, pemerintah Indonesia dalam menjawab nota perhatian pemerintah Cina atas kerusuhan tersebut membalas dengan menuduh Cina mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Ketegangan yang baru berjarak empat tahun dari pencairan hubungan diplomatik tersebut bahkan sempat mencuatkan ancaman pembekuan hubungan bilateral kembali. Berbeda dengan kasus kerusuhan tersebut, pada kerusuhan Mei 1998, baik pemerintah Cina maupun Indonesia tetap menahan diri dalam mengeluarkan nota terkait dengan kerusuhan yang terjadi saat menjelang pergantian rezim di Indonesia itu. Pada saat itu, pemerintah Cina meski mengeluarkan nota keprihatinan tetap menegaskan berulang kali bahwa hal tersebut sebagai persoalan domestik Indonesia. Pemerintah Indonesia pun dalam tanggapannya tidak secara khusus menimpali nota keprihatinan dari pemerintah Cina tersebut. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Ali Alatas dalam tanggapannya tetap menganggap bahwa nota Cina tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah kedua negara berhasil menjaga ketegangan yang ditimbulkan isu sensitif tersebut.¹⁶

Hubungan Indonesia-Cina meningkat tajam memasuki awal dasawarsa abad 21. Perdagangan kedua negara meningkat dan angka investasi Cina di Indonesia meningkat. Hal ini bahkan menjadi catatan tersendiri bila dibandingkan hubungan bilateral Indonesia dengan AS. Pada saat kunjungan Obama ke Indonesia pada bulan

¹⁶ Rizal Sukma, "Indonesia's Security Outlook, Defence Policy and Regional Cooperation", *op.cit.*, hlm 142, 144.

November 2010, kunjungan tersebut didahului oleh Wu Bangguo, kepala Kongres Rakyat Cina (semacam MPR) yang menghasilkan perjanjian investasi infrastruktur senilai US\$ 6,6 juta. Hal ini seperti menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan Cina lebih menghasilkan nilai ekonomi yang konkrit dibanding hubungan Indonesia dengan AS sebagai negara adidaya.¹⁷

Hubungan bilateral Indonesia dengan Cina pasca-Reformasi terjadi antara lain sebagai bentuk dari ketidakpuasan Indonesia atas sikap pemerintah negara-negara Barat, terutama AS. Bukan saja persoalan HAM yang menjadi sorotan negara-negara barat, namun persoalan kedaulatan wilayah juga menjadi sumber kecurigaan elite Jakarta terkait dengan lepasnya Timor Timur. Hubungan Indonesia dengan Cina merupakan bagian dari perimbangan dan penegasan prinsip bebas aktif selain dukungan bagi keutuhan wilayah Indonesia. Selain itu, hubungan dengan Cina juga menjadi sumber peningkatan perekonomian Indonesia, terutama dari sisi investasi dan finansial. Hal itu sudah dimulai saat Krisis Moneter 1997 yang melanda Indonesia dan negara-negara Asia. Cina merupakan sumber dana segar yang sangat dibutuhkan Indonesia. Sumber dana segar itu dapat diperoleh Indonesia dengan syarat dan cara yang relatif mudah dibandingkan dengan yang diajukan oleh lembaga keuangan internasional.

Kerja sama bilateral kedua negara juga mencakup persoalan keamanan nontradisional yang dimulai pascabencana tsunami bulan Desember 2004. Cina menjadi sumber bantuan dan menjanjikan investasi untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat gempa dan tsunami. Bantuan awal yang diberikan Cina pada bulan Januari 2005 mencapai US\$ 3 juta seperti yang dinyatakan oleh PM Wen Jinbao. Hingga bulan April 2005, bantuan tersebut telah meningkat menjadi US\$ 30 juta saat Menteri Perdagangan Bo Xilai

¹⁷ Jessica Brown, "Jakarta's Juggling Act: Balancing China and America in the Asia-Pacific", *Foreign Policy Analysis*, No. 5, 3 Februari 2011, hlm. 3.



menambahkan bantuan sebesar US\$ 2 juta. Bantuan bencana tersebut diikuti dengan kerja sama dalam penanggulangan wabah epidemik yang mengancam kawasan ini pada awal dasawarsa abad 21. Kerja sama ini menjadikan aspek *human security* sebagai isu kemanan yang turut menjadi perhatian dalam hubungan kedua negara.¹⁸ Kerja sama keamanan Indonesia juga meliputi kerja sama energi. Kerja sama di sektor energi ini meliputi perjanjian yang memberikan izin eksplorasi perusahaan minyak Cina (CNOOC, PetroChina) di Indonesia. Kerja sama ini dimulai saat kunjungan Presiden Megawati ke Beijing pada tahun 2002. Selain itu Cina juga ikut dalam pengembangan pembangkit listrik yang menjadi kebutuhan Indonesia. Kerja sama kedua negara mencapai puncak dengan ditandatangani kemitraan strategis pada tanggal 25 April 2005 antara PM Wen Jinbao dan Presiden SBY.

Kerja sama kedua negara yang meningkat itu juga tidak lepas dari perkembangan demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada etnis Cina untuk lebih mengekspresikan identitasnya. Kebebasan berekspresi bagi etnis Cina yang dibuka sejak era Presiden Abdurrahman Wahid membantu menekan salah satu faktor sensitif hubungan Indonesia dan Cina. Hubungan kedua negara meningkat juga disebabkan kemudahan bepergian antara masyarakat dan pejabat negara. Pasca-Reformasi kemudahan ini membantu peningkatan pemahaman antara pejabat dan masyarakat yang memudahkan pembangunan persepsi baik antara pihak-pihak di kedua negara.¹⁹

Walaupun peningkatan hubungan kedua negara mengalami peningkatan yang begitu tajam, bukan berarti kedua negara lepas dari kendala dan potensi ketegangan. Kebangkitan ekonomi dan militer Cina merupakan salah satu potensi ketegangan tersebut. Angka perdagangan yang timpang antara Indonesia dan Cina membuat

¹⁸ Rizal Sukma, "Indonesia's Security Outlook, Defence Policy and Regional Cooperation", hlm. 151.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 149.



sebagian pihak di Indonesia beranggapan bahwa Jakarta akan dalam posisi yang lemah terhadap Beijing. Kebangkitan militer Cina yang diiringi dengan klaim wilayah terkait dengan kebutuhan sumber daya alam menjadikan ketegangan kawasan dan bilateral. Termasuk dalam hal ini adalah peta lidah Cina yang dipublikasikan pada tahun 2003. Peta tersebut mengklaim sebagian wilayah Natuna sebagai bagian dari ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Cina. Selain itu, potensi ancaman keamanan maritim membuat Cina begitu perhatian dengan kondisi keamanan pelayaran di Selat Malaka. Hal itu juga menjadi perhatian sejumlah negara besar lain, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Dalam kasus tersebut, Indonesia bersikeras mempertahankan kedaulatannya dan menolak kehadiran armada asing dalam pengelolaan keamanan di perairan yang menjadi pemisah antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura tersebut.²⁰ Kehadiran Cina juga menjadi isu tersendiri terkait dengan pertimbangan kekuatan dan kerja sama keamanan di kawasan. Hal itu akan dibahas di subbab selanjutnya yang menguraikan faktor Cina dalam kerja sama multilateral.

E. KEBANGKITAN CINA DAN KERJA SAMA MULTILATERAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Kebangkitan Cina yang juga dibarengi dengan peningkatan hubungan bilateral dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur juga menunjukkan geliat yang sama di tingkat multilateral. Cina aktif dalam dialog strategis dengan ASEAN sebagai organisasi negara-negara Asia Tenggara. Sebelum tahun 1990, hubungan Cina dengan negara-negara ASEAN hanya sebatas hubungan bilateral. Hubungan Cina dengan ASEAN sebagai mitra dialog dimulai pada kehadiran Menlu Qian Qichen pada *ASEAN Ministerial Meeting* ke-24 di Kuala Lumpur pada bulan Juli 1991. Kehadiran Qichen pada pertemuan tersebut sebatas sebagai tamu negara yang berkunjung di

²⁰ Jessica Brown, *op.cit*, hlm. 7.



Malaysia. Pada saat itu, status Cina semata sebagai *consultative partner*. Kunjungan tersebut berlanjut dengan pendekatan yang dilakukan saat kunjungan Sekretaris Jendral (Sekjen) ASEAN, Dato Ajit Singh, ke Beijing pada tahun 1993. Pada tahun 1996, Cina memperoleh status sebagai mitra dialog penuh dalam ASEAN sebagaimana Jepang, AS, Australia, dan Korea Selatan pada AMM ke-29 di Jakarta. Kerja sama keamanan ASEAN-Cina juga berkembang pada persoalan keamanan di Laut Cina Selatan dengan dimulainya pembahasan rancangan *Code of Conduct* mengenai persoalan Laut Cina Selatan pada bulan Mei 2000. Rancangan tersebut selesai ditandatangani pada bulan November 2002 tentang *Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea*. Kerja sama keamanan antara ASEAN dan Cina mencapai salah satu momentumnya dengan penandatanganan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) pada tahun 2003.²¹

Penandatanganan kerja sama keamanan tersebut terbilang mampu meyakinkan sejumlah negara lain di kawasan untuk dapat membina hubungan yang lebih terbuka dengan Cina. Hal itu terlihat dengan peningkatan hubungan Cina dan Vietnam terkait dengan persoalan perbatasan darat dan Teluk Tonkin, serta hubungan Cina dengan Filipina yang meningkat dengan adanya kunjungan Presiden Arroyo pada tahun 2004. Hal ini semakin meningkatkan postur Cina di kawasan yang juga dibarengi dengan diplomasi *track two* untuk persoalan keamanan Laut Cina Selatan yang dipayungi dalam kerja sama ARF.²²

²¹ Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, dan Chin Kin Wah, "An Overview of ASEAN-China Relations", dalam Saw Swee-Hock, Sheng Lijun dan Chin Kin Wah (Eds.), *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, Institute of South East Asian Studies (ISEAS), Singapore, 2005, hlm. 2.

²² Carlyle A. Thayer, "China-ASEAN Relations: China Consolidates Its Long-term Bilateral Relations with Southeast Asia", *Comparative Connections A Quarterly E-Journal on East Asian Bilateral Relations*, Vol. 2, No. 2 Second Quarter 2000, hlm. 65.



Kerjasama keamanan antara ASEAN dan Cina dan keterlibatan Cina dalam ARF merupakan bagian dari upaya Jakarta untuk menarik Cina dalam norma internasional dan kawasan. Hal itu juga menjadi bagian dari upaya Jakarta yang melihat bahwa Cina lebih proporsional ditempatkan dalam kerangka kerja sama multilateral daripada bilateral. Ketegangan kawasan yang ditempatkan dalam solusi *ASEAN Way* diasumsikan akan mampu meredakan ketidakmenentuan masa depan politik luar negeri Cina di kawasan. Indonesia dalam hal ini berusaha menempatkan ASEAN dan ARF sebagai ruang terbuka untuk keterlibatan kekuatan besar lainnya dalam kerangka norma ASEAN. Dengan kata lain, Indonesia tidak ingin ASEAN menjadi pijakan bagi Cina untuk meng-*counter* keberadaan kekuatan dunia lainnya,²³ dan sebaliknya untuk membuka peluang bagi kekuatan asing untuk dapat berpartisipasi dalam arsitektur kekuatan kawasan yang “sehat”.

Dalam hal ini, Indonesia masih mengakui kekuatan lain yang tetap berperan dalam arsitektur keamanan kawasan. Dalam persoalan Laut Cina Selatan, Indonesia menerima peranan Menlu AS, Hillary Clinton, sebagai mediator dalam solusi atas klaim wilayah tersebut yang merupakan bagian dari Indonesia untuk tetap menjaga keseimbangan kekuatan dalam forum multilateral.²⁴

F. KERJA SAMA KEAMANAN INDONESIA DAN CINA: PROS AND CONS

Hubungan Indonesia dan Cina dalam konteks kerjasama keamanan menunjukkan geliat seiring perkembangan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Kebangkitan ekonomi Cina dan geliat perekonomian Indonesia menjadi salah satu motor dan pemicu isu kerjasama ke-

²³ Rizal Sukma, “Indonesia’s Response to the Rise of Cina: Growing Comfort Amid Uncertainties”, *op.cit*, hlm. 153.

²⁴ Jessica Brown, *op.cit*, hlm. 12.



amanan di antara kedua negara. Pengembangan kerja sama keamanan energi dalam bentuk ekspor bahan baku dan investasi energi Cina di Indonesia merupakan konsekuensi dari pertumbuhan perekonomian kedua negara. Hubungan keamanan kedua negara tersebut juga berlanjut pada sektor keamanan tradisional (pengembangan industri pertahanan) meskipun menurut sebuah pendapat telah kehilangan momentumnya.²⁵

Kerja sama bilateral antara kedua negara juga mencakup sektor keamanan maritim dan persoalan Laut Cina Selatan. Kedua peluang kerja sama ini berangkat dari persoalan kebutuhan energi yang semakin meningkat bagi Cina. Kerja sama maritim di Selat Malaka menjadi kebutuhan penting bagi Cina yang sebagian besar arus perdagangan dan pasokan migasnya melalui selat itu. Sementara itu, persoalan Laut Cina Selatan juga tak lepas dari potensi cadangan migas yang dikandungnya.

Dalam prospek kerja sama di kedua isu tersebut, Indonesia mengedepankan instrumen diplomasi multilateral yang mengedepankan kerangka ASEAN. Upaya untuk mengajak semua pihak menghormati kerangka nilai bersama yang dibangun dalam TAC menjadi salah satu acuan normatif diplomasi Indonesia dan negara-negara ASEAN. Namun di sisi lain, “perimbangan kekuatan” yang dilakukan dengan tetap membuka pihak negara besar lainnya untuk berperan sesuai dengan kerangka TAC merupakan tantangan tersendiri dalam upaya Indonesia mendudukkan Cina dalam kerangka norma kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Dewi Fortuna, “A Journey of Change: Indonesia’s Foreign Policy”, (V4N3 Fall 2009, Cover Stories, September 2009, http://www.globalasia.org/V4N3_Fall_2009/Dewi_Fortuna_Anwar.html)

²⁵ Ian Storey, “China and Indonesia: Military-Security Ties Fail to Gain Momentum”, *China Brief*, Vol. IX Issue 4, 20 Februari 2009, hlm. 7.

- Anwar, Dewi fortuna, "Foreign Policy, Islam, and Democracy in Indonesia", *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* Vol. 3, 2010.
- Brown, Jessica, "Jakarta's Juggling Act: Balancing China and America in the Asia-Pacific", *Foreign Policy Analysis* No. 5, 3 Februari 2011.
- Clarke, Ryan, "Report on Chinese Energy Security and the Role of the PLAN", *Culture Mandala: Bulletin of the Centre for East-West Cultural & Economic Studies, Vol. 8, Issue 2, December 2009*.
- Daniel Novotný, "Indonesia's Foreign Policy: in Quest for the Balance of Threats", Makalah Seminar pada the 15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Canberra 29 Juni–2 Juli 2004.
- Drift, Reinhard, "Japanese-Chinese Territorial Disputes in The East China Sea – Between Military Confrontation And Economic Cooperation", *Asia Research Centre Working Paper 24*, 2008.
- Storey, Ian, (2009), "China and Indonesia: Military-Security Ties Fail to Gain Momentum", *China Brief* Vol. IX Issue 4, 20 Februari 2009.
- Sukma, Rizal, "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort Amid Uncertainties", dalam The National Institute for Defense Studies, *The Rise of China: Responses from Southeast Asia and Japan, NIDS Joint Research Series*, No. 4, The National Institute for Defense Studies, Jepang, 2009.
- Sukma, Rizal, "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties" dalam *Chapter 5 NIDS Joint Research Series No. 5, Asia Pacific Countries' Security Outlook and Its Implications for the Defense Sector*, The National Institute for Defense Studies, Jepang, 2010.
- Swee-Hock, Saw, Sheng Lijun dan Chin Kin Wah (Eds.), *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, Institute of South East Asian Studies (ISEAS), Singapura, 2005.
- Thayer, Carlyle A., "China-ASEAN Relations: China Consolidates Its Long-term Bilateral Relations with Southeast Asia", *Comparative Connections A Quarterly E-Journal on East Asian Bilateral Relations Volume 2*, Number 2 Second Quarter, 2000.
- Thayer, Carlyle A., "Southeast Asian Reactions to China's Peaceful Development Doctrine: Indonesia, the Philippines, and Thailand", *NBR Analysis* Vol. 18, No. 5, April 2008.
- The Jakarta Globe, Indonesia Stresses Maritime Security at Summit, <http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-stresses-maritime-security-at-summit/479350>, 18 November 2011.



Yang, Jian, "China's Security Challenges: Priorities and Policy Implications"
dalam The National Institute for Defense Studies, *Asia Pacific Countries'
Security Outlook and Its Implications for the Defense Sector*, NIDS Joint
Research Series No. 5 2010 (Jepang: The National Institute for Defense
Studies, 2010)

http://www.kemendag.go.id/statistik_neraca_perdagangan_dengan_negara_mitra_dagang/





BAB VI

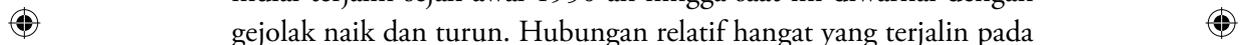
Prospek Hubungan Indonesia-Cina

Ganewati Wuryandari

“There lies a sleeping giant. Let her sleep. For when she wakes, she will shake the world”.

(Napoleon)¹

A. PENGANTAR



Ditilik dari sejarahnya, Indonesia dan Cina mempunyai hubungan bilateral yang tidak selalu mudah. Hubungan kedua negara yang mulai terjalin sejak awal 1950-an hingga saat ini diwarnai dengan gejolak naik dan turun. Hubungan relatif hangat yang terjalin pada masa Soekarno sifatnya tidak langgeng, yang terjadi kemudian adalah pembekuan hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1967. Hubungan kedua negara yang beku selama 23 tahun mulai mencair dengan dibukanya kembali normalisasi hubungan Jakarta-Beijing pada tahun 1990. Sejak era reformasi, Indonesia–Cina pun memperlihatkan hubungan yang semakin hangat. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa hubungan bilateral kedua negara tidak menghadapi kendala. Sejumlah isu yang terkait dengan persoalan ekonomi dan politik-keamanan, seperti perdagangan, tenaga kerja dan jasa, serta perbatasan maritim sebagaimana telah disinggung pada bab-bab sebelumnya, bila tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi menjadi ancaman terhadap kohesivitas hubungan bilateral kedua

¹ Kutipan ini diambil dari “Fear of The Dragon”, *Far Eastern Economic Review*, 13 April 1995, hlm. 24.



negara. Persoalan-persoalan tersebut masih menjadi tantangan berat dalam membangun hubungan Indonesia-Cina.

Jalinan hubungan Indonesia-Cina yang tidak selalu mudah di atas, dalam realitasnya menjadi semakin kompleks ke depannya. Hal ini terkait dengan adanya perubahan konfigurasi kekuatan negara-negara besar di kawasan pasca-Perang Dingin yang memposisikan pengaruh global Cina yang semakin besar, baik pada aspek politik, keamanan, ekonomi, maupun militer. Sebagian kalangan bahkan meyakini bahwa peningkatan kekuatan pengaruh Cina berpotensi menjadikan negara tersebut adi kuasa di masa depan yang mampu menggoyang unilateralisme Amerika Serikat (AS). Realitas ini sangat dimungkinkan, terutama karena saat ini, menurut analisis Aleksius Jemadu, telah terjadi pergeseran kekuatan dan pertumbuhan ekonomi dari Barat (Atlantik) ke Asia Timur dan Cina menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar setelah AS.² Perkembangan kekuatan pengaruh Cina yang mengesankan tersebut telah menarik perhatian banyak kalangan, mulai dari para penentu kebijakan, pebisnis, perencana pertahanan, hingga akademisi. Indonesia, sebagaimana halnya negara-negara lainnya di kawasan, menganggap bahwa berkembangnya kekuatan pengaruh Cina yang semakin meningkat bisa menjadi tantangan serius. Pengaruh yang semakin besar dari negara tirai bambu tersebut bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi dan keamanan. Oleh karena itu, Indonesia perlu merumuskan kebijakan luar negeri yang terukur untuk merespons perkembangan tersebut. Artinya, suatu kebijakan yang dapat memaksimalkan tercapainya kepentingan nasional Indonesia.

² Aleksius Jemadu, "Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara", *power point* disampaikan dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Kelompok Peneliti Indonesia-Cina P2P-LIPI, Jakarta, 4 Oktober 2011.



Tulisan ini bermaksud untuk menelaah hubungan bilateral antara Indonesia dan Cina, khususnya pada era Reformasi. Pertanyaan utama yang diajukan dalam konteks hubungan bilateral kedua negara adalah bagaimana Indonesia seharusnya menyikapi semua perkembangan Cina saat ini? Dalam analisisnya, tulisan ini dibagi dalam beberapa subbagian. Subbagian pertama melihat secara sekilas hubungan kedua negara. Subbagian ini menjadi dasar analisis subbagian berikutnya yang mengkaji mengenai arah hubungan Jakarta-Beijing di masa mendatang, terutama dengan kemajuan Cina sekarang ini sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang potensial di kawasan Asia Pasifik. Bagian akhir tulisan ini merupakan hasil rangkuman dalam bentuk penutup.

B. DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA-CINA



Hubungan Indonesia-Cina yang terbangun enam bulan setelah Belanda menyerahkan kedaulatannya pada Desember 1949 hingga saat ini memiliki karakteristik hubungan yang sarat dengan ketidakstabilan. Pada masa Soekarno, misalnya, hubungan kedua negara dapat dikatakan berjalan dengan relatif hangat. Kebijakan luar negeri yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran pertarungan antara *Old Forces* (OLDEFOS) versus *New Emerging Forces* (NEFOS) dan penerapan politik konfrontasi semesta terhadap Irian Barat dan Malaysia, pada kenyataannya telah menyebabkan Indonesia menjadi "terkucil" dari pergaulan internasional. Situasi ini berpengaruh besar dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia kemudian meluncur ke orbit Cina. Kedua negara pun sepakat untuk menjalin hubungan kokoh meski pernah terpuruk, terutama akibat kebijakan tentara Indonesia tahun 1959 yang melarang pedagang Cina untuk melakukan perdagangan eceran di luar kota-kota besar. Komitmen ini antara lain dapat dilihat dari kesediaan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi perjanjian dwikewarganegaraan dengan Cina pada tahun 1960. Pada bulan

Agustus 1961, pemerintah juga meratifikasi perjanjian persahabatan antara Cina dan Indonesia. Kehangatan hubungan kedua negara juga tercermin dari saling kunjung pejabat tinggi kedua negara dan bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah Cina ke Indonesia sebesar US\$ 41 juta pada tahun 1958. Pada tahun 1959, negara tirai bambu ini juga memberikan bantuan yang sifatnya khusus untuk pembangunan gedung *Asian Games*. Puncak kehangatan hubungan kedua negara kemudian melahirkan apa yang disebut oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1965 sebagai “Poros Jakarta-Peking”.³

Namun demikian, kehangatan hubungan kedua negara tidaklah berjalan lama. Peristiwa pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965 menjadi salah satu faktor. Menyusul peristiwa tersebut, Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967, tidak saja membubarkan PKI melainkan juga secara unilateral memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina pada tanggal 23 Oktober 1967. Negara tirai bambu ini diyakini telah mendukung G30S/PKI di Indonesia.

Seluruh episode peristiwa di atas dan juga sikap antikomunis pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto pada kenyataannya telah mempengaruhi hubungan Indonesia-Cina dalam kurun waktu hampir dua setengah dekade berikutnya. Faktor dinamika politik domestik yang terkait dengan persepsi bahwa Cina menjadi ancaman utama atas keamanan Indonesia, terutama dalam bentuknya yang subversif melalui bekas anggota PKI dan etnis Cina, tampaknya telah menjadi ganjalan besar di dalam upaya untuk menormalisasi hubungan kedua negara. Hal ini terlihat dari waktu relatif panjang (23 tahun) yang dibutuhkan sebelum pada akhirnya Indonesia setuju

³ Untuk analisis lebih dalam mengenai latar belakang politik luar negeri di era Soekarno berorientasi ke Cina, lihat Ganewati Wuryandari (Ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 92–108.



untuk membuka normalisasi hubungan dengan Cina pada bulan Agustus 1990. Meskipun Indonesia-Cina telah merestorasi hubungan diplomatik mereka, pada kenyataannya hubungan kedua negara tidak memperlihatkan hubungan yang semakin kokoh. Sementara negara-negara anggota ASEAN mulai membangun hubungan bilateral yang semakin menguat dengan Cina pada awal 1990-an, Indonesia lebih memilih pendekatan tidak langsung melalui forum multilateral dengan Cina seperti di *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan ASEAN+3.⁴ Pilihan pendekatan hubungan dengan jalur multilateral ini secara tidak langsung merupakan cermin dari karakter kehati-hatian dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Kehati-hatian ini tidak lain bermuara pada kecurigaan dan kekhawatiran akan intervensi Cina pada politik domestik Indonesia yang masih kuat. Persepsi ini tampak terus berlanjut hingga Soeharto lengser dari kursi kepemimpinannya pada tanggal 21 Mei 1998.⁵

Lengsernya Soeharto mengakhiri masa tiga puluh satu tahun pemerintahan otoriter dan dimulainya babakan baru dalam politik Indonesia dengan mendasarkan sistem pemerintahannya pada nilai-nilai demokrasi. Transformasi politik ini memberikan ruang baru bagi peningkatan hubungan Indonesia-Cina yang sebelumnya belum sepenuhnya kondusif pada masa Soeharto. Normalisasi hubungan ke arah yang lebih serius ditunjukkan pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kadar kekhawatiran Indonesia terhadap ancaman ideologi komunis Cina yang terasa kuat selama era Soeharto pun saat ini tampak terlihat

⁴ Lihat Rizal Sukma, "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort Amid Uncertainties" dalam *The Rise of China: Responses from Southeast Asia and Japan*, *NIDS Joint Research Series* No. 4, National Institute for Defence Studies, Tokyo, 2009, hlm.143.

⁵ Untuk lebih rinci mengenai hal tersebut, lihat Rizal Sukma, *Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship*, Routledge, London, 1999.

semakin berkurang.⁶ Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan luar negeri yang selama ini seakan menjauhi negeri tirai bambu tersebut berubah menjadi bentuk politik luar negeri yang selangkah demi selangkah semakin kooperatif. Gelombang kerja sama terutama di bidang ekonomi dan militer pun semakin meningkat. Hal ini menjadi simbol bahwa kedua negara telah berada pada sebuah babak baru dalam hubungan diplomatik Indonesia-Cina.

Hanya saja, pada masa pemerintahan Presiden Habibie, politik luar negeri Indonesia belum tampak memperlihatkan hasil signifikan terhadap Cina. Meski salah satu pilar utama kebijakan luar negeri saat itu ditujukan pada upaya pemulihan ekonomi Indonesia sebagai imbas dari krisis ekonomi tahun 1997, namun sejatinya fokus utama pemerintahannya lebih pada urusan domestik, terutama terkait dengan persoalan ancaman integrasi nasional dan persoalan Timor Timur. Kedua persoalan tersebut menjadi kepentingan nasional yang lebih mendesak dan diprioritaskan penyelesaiannya. Stabilitas politik di dalam negeri dipandang oleh rezim yang berkuasa saat itu sebagai prasyarat penting bagi dasar pemulihan ekonomi Indonesia yang terimbas krisis ekonomi 1997. Di samping itu, masa pemerintahan Habibie yang relatif sangat singkat, yaitu satu tahun delapan bulan, juga tidak memberikan kesempatan banyak bagi pemerintahannya untuk menjalankan politik luar negerinya secara lebih komprehensif, termasuk dalam isu hubungan Indonesia-Cina.⁷

Era Abdurrahman Wahid (1999–2000), secara jelas memperlihatkan keinginannya untuk lebih mendekatkan hubungan Indonesia dengan Cina. Cina merupakan negara pertama yang dikunjungi

⁶ Rizal Sukma, "Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement", *Asian Survey*, Vol. 49, No. 4, August 2009, hlm.591–609.

⁷ Analisa politik luar negeri Indonesia terhadap Cina pasca rezim Soeharto, khususnya dalam kerja sama bidang ekonomi dapat dilihat pada <http://fullthink.blogspot.com/2011/04/analisa-politik-luar-negeri-indonesia.html>.



dalam lawatannya setelah terpilih sebagai Presiden. Inilah babak baru yang meningkatkan hubungan kedua negara yang berujung pada kesediaan Cina memberikan bantuan keuangan, kredit, kerja sama dalam bidang keuangan, teknologi, pariwisata, serta *counter trade* di bidang energi, yaitu menukar LNG (*Liquid Natural Gas*) Indonesia dengan produk-produk Cina.⁸ Di dalam negeri juga terjadi perubahan, yaitu Abdurrahman Wahid mencabut larangan-larangan diskriminatif terhadap penduduk Tionghoa dan menjadikan Imlek sebagai salah satu hari raya nasional. Ia juga mencoba merangkul Cina melalui inisiasinya yang dikenal sebagai “Forum Pasifik Barat Daya” yang juga mengikutsertakan India dan negara-negara Asia lainnya. Ide awal dari forum yang sayangnya hanya tumbuh seumur jagung tersebut sesungguhnya dipicu oleh ketidakpuasan Abdurrahman Wahid atas dominasi negara-negara Barat dalam hubungan internasional. Pengalaman Indonesia atas lepasnya Timor-Timur yang dinilai juga tidak lepas dari andil Amerika Serikat dan Australia mendorongnya untuk merangkul Cina dan negara-negara Asia lainnya untuk “melawan” pengaruh negara Barat melalui pembentukan forum tersebut.⁹

Hubungan Indonesia-Cina yang sudah terbangun pada era sebelumnya dilanjutkan oleh Presiden Megawati yang menggantikan Abdurrahman Wahid pada tahun 2000. Hubungan keduanya dieratkan dengan saling kunjung pejabat kedua negara, seperti Perdana Menteri (PM) Zhu Rongji ke Jakarta pada tahun 2001 dan Presiden Megawati ke Republik Rakyat Cina (RRC) pada tanggal 24–27 Maret 2002. Hubungan kedua negara masih dititikberatkan pada kerja sama ekonomi, terutama yang terkait dengan bidang pertambangan dan energi. Keseriusan hubungan kedua negara tersebut antara lain terlihat

⁸ Syamsul Hadi, *Merangkul Cina: Hubungan Indonesia-Cina pasca Soeharto*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

⁹ Rizal Sukma, “Indonesia’s Response to the Rise of China: Growing Comfort Amid Uncertainties”, *op.cit.*, hlm.146.

dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang pembentukan Forum Energi Indonesia-Cina pada tanggal 24 Maret 2002. Kesepakatan mereka ini penting artinya karena memberikan payung hukum bagi investasi Cina dalam bidang energi. Terkait soal energi, Indonesia telah menjual gas alam ke Cina sejak tahun 2002 untuk pasokan Provinsi Fujian. Meskipun perlu juga menjadi catatan bahwa penjualan gas alam Indonesia ini ditengarai penuh kontroversi, terutama terkait dengan soal harga jual gas Tangguh yang oleh sebagian kalangan dinilai sangat rendah dibandingkan dengan nilai jual gas di pasaran.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY, 2004–sekarang), kebijakan untuk lebih mempererat hubungan Indonesia-Cina terus berlanjut dan bahkan tampak terjadi perluasan dan pendalaman kualitas kerja sama kedua negara. Representasi fenomena ini terlihat dari kemajuan pesat kerja sama ekonomi yang mereka lakukan. Tercatat kegiatan ekspor impor kedua negara menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini terbukti sejak Kemitraan Strategis Republik Indonesia (RI)-RRC dibentuk pada tahun 2005, volume perdagangan kedua negara terus meningkat menjadi US\$ 31,5 miliar (2008) dan turun sedikit akibat krisis global menjadi US\$ 28,3 miliar (2009).¹⁰ Namun demikian, volume perdagangan bilateral mengalami kenaikan kembali pada tahun 2010 menjadi US\$ 36,1 miliar dan bahkan Indonesia memiliki ambisi yang kuat untuk memanfaatkan kebangkitan ekonomi Cina dengan memproyeksikan volume perdagangan bilateral menjadi US\$ 80 miliar pada tahun 2015.¹¹

¹⁰ Dewi Astuti dan Anugerah Perkasa, "Hubungan RI-Cina Harus Bebas Unsur Politik", *Bisnis Indonesia*, 6 Juli 2010, hlm.6.

¹¹ Imron Cotan, *The Jakarta Post*, 31 May 2011. Lihat juga Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri RI, "Hubungan Indonesia-RRT", *power point* disampaikan dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Kelompok Peneliti Indonesia-Cina P2P-LIPI, Jakarta, 4 Oktober 2011.



Di tengah menguatnya kerja sama di bidang ekonomi di atas, Indonesia-Cina juga lebih memperluas cakupan kerja samanya pada bidang-bidang lainnya, seperti sosial-budaya dan pertahanan-keamanan. Sifat hubungan yang lebih komprehensif ini jelas terlihat dalam Perjanjian Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership Agreement*) yang disepakati kedua negara saat Presiden RRC Hu Jin Tao berkunjung ke Indonesia pada tanggal 25 April 2005. Melalui Kemitraan Strategis, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama politik dan keamanan, memperdalam kerja sama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kerja sama sosial budaya, dan memperluas hubungan nonpemerintah. Ada tiga bidang yang dicakup dalam perjanjian kemitraan strategis ini, yaitu kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi dan pembangunan, serta kerja sama sosial budaya.¹² Melalui kerangka Kemitraan Strategis ini, ada beberapa capaian kesepakatan kerja sama yang telah dihasilkan oleh kedua negara, antara lain *Defense Cooperation Agreement* (DCA), industri pertahanan, maritim, pengembangan riset dan teknologi, pendidikan, dan kerja sama ekonomi pembangunan berupa pinjaman Cina sebesar US\$ 1,8 miliar untuk proyek infrastruktur. Sebesar 40% dari dana tersebut digunakan untuk proyek pembangunan Jembatan Suramadu dan 60% untuk proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW.¹³

Atas dasar uraian di atas, terlihat bahwa pemerintah pasca Orde Baru mulai dari Habibie hingga SBY terlihat semakin lebih nyaman dalam menjalin hubungan dengan Cina. Kondisi ini tercermin dari berbagai perluasan cakupan dan peningkatan kerja sama mereka mulai tahun 1998 hingga sekarang. Perubahan politik yang mewarnai

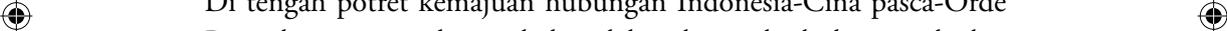
¹² Zainuddin Djafar, *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur, Kajian Perspektif Asia Ekonomi-Politik*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2008, hlm.126.

¹³ Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri RI, "Hubungan Indonesia-RRT", *op.cit.*



proses reformasi demokratik yang mengikuti lengsernya Soeharto memberikan ruang lebih luas bagi para pemimpin pasca Orde Baru untuk tidak lagi terkungkung dengan perspektif ancaman ideologi dalam kaitannya dengan Cina, terlebih negara tirai bambu ini telah menjelma sebagai kekuatan ekonomi baru di pentas dunia. Realitas baru ini dilihat pemerintah pasca Orde Baru sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kembali dan meningkatkan perekonomian nasional yang terpuruk akibat krisis ekonomi Asia 1997 yang imbasnya pun masih terasakan selama beberapa tahun sesudahnya. Kebutuhan untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Cina juga dipicu oleh adanya fakta lain, yaitu populasi penduduk Cina yang mencapai sekitar 1,3 milyar jiwa tentu merupakan faktor pendorong akan mitra ekonomi yang potensial.

C. TANTANGAN HUBUNGAN INDONESIA-CINA



Di tengah potret kemajuan hubungan Indonesia-Cina pasca-Orde Baru di atas, yang harus diakui dalam kerangka hubungan kedua negara tersebut tantangan terbesar justru terletak pada faktor domestik. Pada satu sisi, harus diakui adanya realitas hubungan bilateral di bidang ekonomi yang semakin meningkat antara Indonesia-Cina. Hal ini tercermin antara lain dari meningkatnya nilai perdagangan kedua negara, yang pada tahun 2008 mencapai US\$ 31,5 miliar dan dalam lima tahun berikutnya diperkirakan mencapai US\$ 50 miliar.¹⁴ Peningkatan nilai perdagangan tersebut didasarkan pada semakin meningkatnya hubungan ekonomi kedua negara, yang tidak hanya meliputi bidang perdagangan barang dan jasa, tetapi juga investasi lainnya, seperti perhotelan dan jasa-jasa lainnya. Peningkatan hubungan bilateral ekonomi tersebut juga tidak terlepas dari terjalannya kerja sama perdagangan bebas antara ASEAN-Cina (*ASEAN-China*

¹⁴ Dewi Astuti dan Anugerah Perkasa, "Hubungan RI-Cina Harus Bebas Unsur Politik", *op.cit.*



Free Trade Agreement, ACFTA) yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2002 dan mulai berlaku sejak bulan Januari 2010. Melalui kerja sama ini para pelaku usaha didorong untuk memaksimalkan potensi perdagangannya. Kalau kerja sama tersebut dimaksimalkan, potesinya tentu besar sekali, terutama mengingat jumlah penduduk kedua negara yang sangat besar, yaitu Cina sekitar 1,3 miliar dan Indonesia sekitar 230 juta penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk ASEAN sendiri sekitar 500 juta orang. Kekuatan populasi kedua negara dan ASEAN-Cina yang mencapai hampir 2 miliar tentu merupakan potensi pasar yang begitu besar.

Namun, hubungan bilateral di bidang ekonomi antara Indonesia-Cina yang terus meningkat tersebut dalam realitasnya tidak dalam keadaan seimbang. Harus diakui, Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar dan telah menjadi “pasar” menggiurkan bagi berbagai produk Cina. Indonesia baru sebatas bisa bermain sebagai konsumen yang baik ketimbang kompetitor yang tangguh dalam peluang yang dibuka melalui kerja sama perdagangan bebas kedua negara. Kondisi ini tercermin antara lain melalui defisit perdagangan kedua negara masih cukup besar. Neraca perdagangan Indonesia-Cina periode bulan Januari–Mei 2011 mengalami defisit sebesar US\$ 2,7 miliar atau meningkat 30,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.¹⁵

Ketidakseimbangan hubungan bilateral ekonomi Indonesia-Cina di atas tampaknya lebih dipicu oleh faktor-faktor internal daripada eksternal. Salah satu faktor utamanya adalah ketidaksiapan Indonesia. Jangka waktu sepuluh tahun semenjak pembicaraan pertama kali dimulai mengenai kerja sama perdagangan bebas Indonesia-Cina, yang pada akhirnya berlaku sejak bulan Januari 2010, tampak tidak

¹⁵ Bappenas, “Hubungan Ekonomi Indonesia-Cina Terus Meningkat”, 3 Desember 2009, <http://www.bappenas.go.id/node/116/2468/hubungan-bilateral-indonesia---Cina-terus-meningkat-/>, diunduh pada tanggal 28 September 2011.



dimanfaatkan secara baik oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, yang antara lain terdiri dari institusi pemerintah dan pelaku usaha, untuk menyambut kerja sama pasar bebas tersebut. Realitas ini tercermin dari munculnya berbagai wacana yang cukup hangat tak lama setelah kerja sama tersebut berlaku. Beberapa pihak menginginkan Indonesia melakukan peninjauan ulang atas kesepakatan pasar bebas antara ASEAN-Cina tersebut. Wacana ini seharusnya tidak perlu muncul ke permukaan bila Indonesia sudah mempunyai kesiapan matang karena perundingan mengenai hal tersebut sudah dilaksanakan sepuluh tahun sebelumnya. Wacana tersebut sejatinya muncul dari kekhawatiran internal yang bermuara pada ketidaksiapan untuk berkompetisi dengan Cina. Kurang matangnya perencanaan terpadu dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan perdagangan bebas tersebut tampaknya merupakan sumber kekhawatiran ini. Dalam hal ini, pemerintah, misalnya, kurang secara maksimal memberikan pembinaan dan insentif untuk pelaku usaha yang menjalin perdagangan dan investasi dengan pihak Cina. Kondisi ini ditambah lagi dengan keterbatasan pelaku usaha, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, maupun modal yang menyebabkan produk-produk mereka relatif kurang mampu bersaing dengan produk-produk Cina yang relatif lebih bagus tampilannya dan murah. Hambatan lainnya berasal dari barang-barang Indonesia yang sebagian besar komplementer dengan Cina.

Hanya saja, membanjirnya impor Cina pada gilirannya menimbulkan kekhawatiran baru. Sekalipun investasi dan perdagangan dengan Cina tetap dilihat oleh sebagian kalangan sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri, kuatnya kecenderungan ekonomi Cina dalam memenetrasi pasar domestik juga dipandang oleh beberapa pihak sebagai ancaman.¹⁶ Potensi

¹⁶ Rizal Sukma, "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort Amid Uncertainties", *op.cit.*, hlm.152.

ancaman dari menguatnya kekuatan ekonomi di dalam negeri dapat mengoyahkan ketahanan pasar tenaga kerja. Hal ini antara lain berangkat dari fakta yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa pabrik-pabrik dan industri jasa yang didirikan melalui investasi Cina di Indonesia tidak jarang menggunakan banyak tenaga kerja yang berasal dari Cina, seperti yang ada dalam pembangunan proyek di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jati Gede di Jawa Barat dan di Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura). Hal ini dimungkinkan karena prasyarat yang diberikan oleh pemerintah Cina dalam setiap bantuan atau pinjaman yang diberikannya kepada Indonesia, salah satu poinnya adalah harus menyertakan tenaga kerja yang berasal dari negara tirai bambu tersebut.¹⁷ Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya revisi isi perjanjian bantuan atau pinjaman pemerintah Cina, tentu realitas ini akan mengurangi daya serap pasar tenaga kerja domestik yang seharusnya mendapatkan prioritas utama di dalam sektor ketenagakerjaan dan jasa. Selain itu, kuatnya serbuan barang-barang Cina juga berpeluang menjadi potensi ancaman bagi ketahanan produk dalam negeri, seperti makanan, minuman, buah-buahan, dan industri garmen. Contoh paling jelas adalah fenomena tahun 2008–2009 saat produk massal batik *printing* Cina dengan corak yang menawan dan harga murah telah mampu menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan usaha-usaha batik skala kecil dan menengah Indonesia. Kekhawatiran akan menguatnya kekuatan ekonomi Cina bagi ketahanan nasional ekonomi akan bertambah semakin kompleks, terutama manakala Cina yang berpeluang untuk menggenggam kekuatan ekonomi domestik Indonesia pada gilirannya dapat menyebabkan negara kepulauan ini dalam posisi rentan. Artinya, Cina dapat menggunakan kekuatan ekonomi yang dimilikinya tersebut

¹⁷ Pandangan ini mengemuka ketika diselenggarakan *Focus Group Discussion* “Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara” oleh Tim Peneliti Indonesia-Cina, Pusat Peneliteian Politik-LIPI, Bandung, 22 Agustus 2011 dan Jakarta, 4 Oktober 2011.



untuk mendesakkan atau memaksakan kepentingan-kepentingan politiknya terhadap Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan Abraham Denmark, yakni ada kekhawatiran di antara elite-elite politik di kawasan bahwa pengaruh ekonomi Cina akan membuat Indonesia lebih rentan terhadap tekanan politik dari Beijing.¹⁸

Sekalipun kekhawatiran-kekhawatiran tersebut tetap menjadi tantangan kedua negara di dalam membangun hubungan bilateral, satu kenyataan yang tidak dapat dibantah dalam konteks hubungan tersebut adalah realitas bahwa kemajuan ekonomi Cina tetap merupakan potensi peluang yang harus dimanfaatkan bagi Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan RI, bahwa kekhawatiran terhadap Cina tetap ada, tetapi hal tersebut tidak menjadi faktor yang mengurangi rasa kekaguman akan keberhasilan Cina.¹⁹



Sekalipun tantangan yang muncul melekat pada aspek ketidakseimbangan dalam hubungan bilateral ekonomi Indonesia-Cina yang pada gilirannya telah memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran bagi ketahanan ekonomi dan politik nasional Indonesia di atas, tetapi terbukti bahwa sejauh ini kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dapat dikelola sehingga tidak mengganggu hubungan hangat yang dijalin dalam berbagai kerja sama yang dilakukan kedua negara. Realitas ini tercermin melalui data hubungan ekonomi kedua negara yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sebagaimana telah disampaikan pada awal tulisan ini.

Pada sisi lain, harus juga diakui hubungan bilateral Indonesia-Cina di bidang politik-keamanan pasca-Orde Baru juga memperli-

¹⁸ Jessica Brown, "Jakarta's Juggling Act: Balancing China and America in the Asia Pacific", *Foreign Policy Analysis* No. 5, The Centre For Independent Studies, 3 Februari 2011, hlm.7.

¹⁹ Andrew Higgins, "Some in Indonesia Praise, Seek to Replicate China's Fight Against United States," *The Washington Post*, 29 March 2010.



hatkan peningkatan. Hubungan ini tampak semakin kokoh ketika kedua negara menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis tahun 2005 yang salah satunya memuat kesepakatan untuk memperkuat kerja sama di bidang politik-keamanan. Kesepakatan perjanjian ini menjadi wujud semakin menguatnya *mutual trust* kedua negara yang selama beberapa dekade sebelumnya sempat absen di dalam hubungan kedua negara. Persepsi Cina sebagai ancaman dalam kehidupan politik domestik yang berkembang kuat pada dekade 1960-an terutama setelah peristiwa G-30S/PKI pun tampak semakin memudar. Sikap “apriori” masyarakat terhadap minoritas Tionghoa yang hampir mendominasi kehidupan ekonomi nasional juga tampak semakin membaik. Diskriminasi terhadap mereka yang tercermin di dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik yang diperlakukan semasa pemerintahan Soeharto pun telah dicabut pada masa reformasi, terutama pada era Abdurrahman Wahid.

Hubungan bilateral Indonesia-Cina di bidang politik-keamanan yang meningkat secara signifikan di atas sesungguhnya capaian ini dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan nasional Indonesia yang lebih luas. Dalam konteks ini, Indonesia ingin memanfaatkan hubungan baik dengan Cina tersebut sebagai alat politik untuk mengimbangi tekanan kekuatan pengaruh negara adidaya lainnya, yaitu Amerika Serikat (AS). Sebagaimana dinyatakan oleh Syamsul Hadi dalam wawancaranya dengan *The New York Times* (2010) bahwa “[t]he Indonesian government felt that the U.S. was putting too much pressure on Indonesia and other ASEAN nations to choose sides”.²⁰ Untuk kepentingan nasionalnya yang lebih luas, Indonesia tidak menginginkan dalam posisi memilih salah satu di antara dua negara adidaya tersebut. Kedekatan Indonesia dengan Cina, menurut Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,

²⁰ Norimitsu Onishi, “Indonesia Is Courted by Obama and China,” *The New York Times*, 9 November 2010.



tidak perlu diantagoniskan dengan AS.²¹ Hal ini karena Indonesia juga menginginkan AS sebagai kekuatan penyeimbang Cina, dan sebaliknya dengan kekuatan ekonomi dan politik yang potensial dari Cina bisa dijadikan jalan tengah bila mengalami kebuntuan atau tekanan dari kekuatan global AS. Dalam konteks ini, Jessica Brown (2011) mengilustrasikan Indonesia memainkan “*juggling*” untuk menyeimbangkan perebutan pengaruh Cina dan AS atas negaranya. Secara strategis, adu permainan ini bukan hanya demi kepentingan nasional Indonesia, melainkan juga kepentingan yang lebih luas terutama keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik.²²



Untuk soal yang terakhir terkait dengan keamanan dan perdamaian di kawasan di atas, Indonesia sangat menaruh perhatian terhadap Cina. Dalam pandangan Indonesia, perimbangan kekuatan yang terjadi antara Cina dan AS diharapkan dapat mendukung keberlanjutan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. Untuk mewujudkan hal ini, salah satunya terlihat di bawah kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2011 dalam pertemuan *East Asia Summit* (EAS) di Bali, November 2011. Keanggotaan EAS bertambah, tidak lagi sebagaimana ide awal Malaysia yang hanya terdiri dari ASEAN+3, melainkan AS dan Rusia juga turut berpartisipasi menyusul Australia, New Zealand, dan India yang sudah terlebih dahulu sebagai anggota. Dalam hal ini, Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam diplomasinya telah berupaya untuk mencoba menempatkan ASEAN sebagai pusat yang menentukan arah perkembangan arsitektur politik keamanan di kawasan, bukan AS ataupun Cina.



Berbeda dalam konteks hubungan bilateral keamanan kedua negara yang menunjukkan Indonesia terlihat semakin nyaman

²¹ Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kemlu RI, “Hubungan Indonesia-RRT”, *op.cit.*

²² Jessica Brown, “Jakarta’s Juggling Act: Balancing China and America in the Asia Pacific”, *op.cit.*, hlm 3 dan hlm.11; “China Struts Larger on World Stage”, *The Jakarta Post*, 25 Mei 2011.



dengan Cina, tidak demikian halnya dengan Cina dalam konteks keamanan regional. Mungkin kondisi ini tidak muncul jika Cina tidak menunjukkan sikap yang makin asertif dalam kebijakan luar negerinya terhadap negara-negara tetangga. Sikap ini telah menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. Kondisi ini terkait dengan keinginan Cina untuk meningkatkan kemampuan militernya sejalan dengan peningkatan kemajuan ekonominya. Peningkatan kemampuan militer Cina tersebut pada satu sisi dilihat sebagai upaya negara ini untuk melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya, yakni untuk menjamin keamanan jalur laut perdagangan internasional di perairan internasional. Negara tirai bambu ini sangat berkepentingan untuk mengamankan jalur perairan laut internasional tersebut, salah satunya karena terkait dengan ketergantungan Cina akan suplai energi dari luar untuk mendukung pembangunan ekonominya.



Hanya saja, pada sisi lain peningkatan kekuatan militer yang terus tumbuh tersebut selain dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan teritorial Cina juga dimanfaatkan untuk mendukung penegasan atas klaim teritorialnya atas beberapa gugus pulau kepulauan yang masih disengketakan dengan beberapa negara tetangga, seperti di gugusan pulau di Laut Cina Selatan, sengketa pemilikan atas pulau-pulau lainnya dengan Korea Utara, Jepang, dan Indonesia, serta klaim wilayah kedaulatannya atas Taiwan. Persoalannya, dengan mendasarkan pada catatan sejarah, negara tirai bambu ini tidak pernah terlihat ragu untuk mendukung klaim kepentingan nasionalnya dengan kekuatan militer yang dimilikinya. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, misalnya, Cina dikenal sebagai negara yang mendukung dan memfasilitasi berbagai gerakan dan pemberontakan yang dilancarkan oleh kaum komunis di beberapa negara di kawasan, seperti Indonesia. Selain itu, dari 15 aksi militer yang dilancarkan sejak negara ini terbentuk pada tahun 1949, Cina hanya mengakui dua peristiwa sebagai agresi militer



negara ini ke wilayah negara lain, yaitu di Perang Korea dan inkursi ke Vietnam tahun 1979. Selebihnya, dalam kasus pengambilalihan Pulau Paracel dari Saigon tahun 1979 dan juga sebagian dari gugusan Spratlys dari Hanoi tahun 1988, Cina hanya mengklaimnya sebagai operasi militer untuk mendapatkan kembali kedaulatan wilayahnya yang telah diokupasi secara ilegal oleh negara lain.²³ Sebagian besar negara di kawasan menilai aksi-aksi Cina tersebut sebagai agresi militer, tetapi Cina melihat aksi-aksi tersebut dalam perspektif yang sangat berbeda. Menurut Beijing, aksi-aksi tersebut hanya sebagai bagian dari upaya diri untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Sikap defensif Cina ini antara lain dapat dilihat dari pernyataan Panglima Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Cina, Jenderal Chen Bingde, dalam pernyataannya yang dikutip oleh majalah *Jane's Defence Weekly* (JDW) edisi 20 Juli 2011. Dalam menanggapi kekhawatiran negara-negara di kawasan akan pembangunan kekuatan militer Cina, Jenderal Chen menyatakan bahwa kekuatan militer Cina, seperti pengembangan peluru kendali (rudal) balistik antikapal perang Dong Feng DF-21D dan kapal selam hasil modifikasi bekas kapal selam Uni Soviet, hanya dirancang semata-mata untuk keperluan pertahanan. Rudal-rudal dan kapal selam tersebut, menurut Jenderal Chen, "Nantinya (hanya) akan digunakan sebagai senjata untuk bertahan, bukan untuk menyerang".²⁴

Sikap defensif Cina atas peningkatan kekuatannya di atas tentu dapat dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap negara untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya dari agresi luar. Namun, kekhawatiran negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, terhadap perkembangan kekuatan militer Cina juga bisa dipahami. Hal ini terutama terkait dengan sejarah aksi-aksi militer negara tersebut dan kecenderungan sikap Cina yang tampak makin asertif

²³ "Fear of the Dragon", *op.cit.*, hlm. 24.

²⁴ "Jepang: Cina Makin Meresahkan", *Kompas*, 3 Agustus 2011, hlm.8.

dengan negara-negara tetangga, khususnya terkait upaya penegasan klaim sepihak Cina atas beberapa wilayah yang masih dalam status sengketa sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Selain klaim sepihak Cina atas beberapa wilayah di kawasan, hal lain yang menjadi sumber kekhawatiran negara-negara di kawasan terkait dengan peningkatan kemampuan militer Cina adalah ketidak-keterbukaan negara ini atas anggaran militernya.²⁵ Secara formal, belanja sektor pertahanan Cina sesungguhnya dapat diketahui melalui Buku Putih Pertahanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Beijing. Namun demikian, banyak kalangan yang masih meragukan “kesahihan” dari jumlah anggaran militer yang sesungguhnya dikeluarkan oleh pemerintah Beijing. Anggaran militer Cina yang diumumkan setiap tahunnya tersebut diduga oleh sebagian kalangan hanya merupakan sebagian saja dari keseluruhan anggaran yang sejatinya dikeluarkan oleh Cina. Kekhawatiran negara-negara di kawasan ini terefleksikan, salah satunya melalui Laporan Tahunan atau Buku Putih Pertahanan Jepang tahun 2011 yang dipublikasikan pada tanggal 2 Agustus 2011. Laporan tersebut secara jelas menyatakan, “[k]ebijakan pertahanan dan pergerakan militer yang tertutup ini menjadi sumber kekhawatiran di kawasan, termasuk Jepang dan seluruh komunitas internasional. Kami perlu mempelajari secara hati-hati”.²⁶ Dengan demikian, laporan ini menggarisbawahi kekhawatiran negara-negara tetangga Cina lainnya terhadap pertumbuhan kekuatan militer Cina.

Realitas di kawasan yang melihat potensi Cina sebagai “*The Rising Regional Threat*” di atas telah coba ditanggapi Cina melalui kebijakan pasifis yang dimaksudkan untuk mencitrakan diri sebagai “*benign power*”. Selain untuk mengurangi ketegangan-ketegangan dengan negara-negara tetangganya, kebijakan ini juga untuk mem-

²⁵ “Fear of The Dragon”, *op.cit*, hlm. 24.

²⁶ “Jepang: Cina Makin Meresahkan”, *op.cit*, hlm. 8.

bangun kepercayaan politik di kawasan dan menjamin negara-negara tetangganya akan “*benign intentions*”.²⁷ Perubahan kebijakan Cina ini dapat dilihat dari partisipasi negara ini dalam kerja sama multilateral kawasan, baik melalui ASEAN+3, ARF, dan EAS. Perkembangan keterlibatan Cina dalam multilateralisme tersebut, menurut Anita Pertiwi, merupakan kecenderungan positif bahwa Cina memiliki keinginan untuk mempromosikan multilateralisme dan menjaga stabilitas keamanan kawasan secara bersama-sama.²⁸ Di samping itu, Cina juga sudah sepakat untuk menandatangani *Declaration of Conduct* (DoC) di dalam upaya penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) pada tahun 2002. Dalam perkembangannya, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2011 mengajukan inisiatif agar penyelesaian sengketa wilayah tersebut diselesaikan melalui forum multilateral daripada bilateral yang selama ini digunakan oleh pihak Cina dengan negara-negara yang bersengketa. Dalam konteks ini, Indonesia berharap pihak-pihak yang saling tumpang-tindih klaim atas LCS dapat menyepakati *Code of Conduct* (CoC) yang dibahas sebagai salah satu agenda di pertemuan EAS di Bali pada bulan November 2011.

Meskipun pada tataran kebijakan Cina telah menunjukkan perubahan di dalam cara pandang masalah strategis di kawasan, tetapi sejauh mana Cina sungguh-sungguh mau melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati masih menjadi suatu hal yang perlu dicermati lebih hati-hati. Apalagi bila menyangkut masalah kedaulatan wilayahnya. Cina cenderung tidak ragu menggunakan kekuatannya militernya

²⁷ Li Mingjiang, “The Origins Of China’s Proactive Regional Strategy”, lihat di laporan Konferensi *Dynamic Interactions Between Regional States and China*, diselenggarakan The S. Rajaratnam School Of International Studies (RSIS), Singapore, 8–9 Maret 2007, hlm. 3.

²⁸ Anita Pertiwi, “Pergeseran Kepimpinan Jepang ke Cina di Asia: Studi Ekonomi Politik Internasional (Periode 2002–2005)”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2007, hlm. 86.



untuk mengamankan wilayah kedaulatan yang diklaimnya. Negara ini, misalnya, baru-baru ini kembali mengancam Vietnam dengan menggunakan cara-cara militer bila negara ini tetap meneruskan kebijakannya untuk memberikan hak eksplorasi kepada perusahaan minyak India pada bulan September 2011 di Kepulauan Spratly. Kebijakan Vietnam ini dianggap oleh Cina telah melanggar hak kedaulatan wilayahnya.²⁹

D. PROYEKSI ARAH HUBUNGAN JAKARTA-BEIJING

Hubungan yang terjalin antara Indonesia-Cina tentu tidak berlangsung dalam ruang hampa. Dinamika hubungan kedua negara sangat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan yang terjadi pada tataran global, regional, dan nasional masing-masing negara. Dalam konteks ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa telah terjadi pergeseran kekuatan dan pertumbuhan ekonomi dari barat (Atlantik) ke Asia Timur, dengan Cina sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah AS. Kekuatan ekonomi dan peningkatan kemampuan militer Cina yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini bahkan pada tataran tertentu telah mampu menggoyang konfigurasi peta kekuatan internasional dan regional pasca- Perang Dingin yang didominasi oleh kekuatan unilateral AS. Bahkan, negara tirai bambu ini diprediksi tidak hanya menggoyang melainkan akan menggeser posisi AS sebagai adidaya kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2020. Prediksi ini telah disampaikan *The Euromonitor International* di dalam artikelnya “Top 10 largest economies in 2020” tanggal 7 Juli 2010. Di artikel tersebut, *The Euromonitor International* mengutip kajian kelompok riset pasar global yang menyatakan bahwa “[b]y 2020 there will be a major shift in the global balance of economic power compared to 2010....Emerging economies will

²⁹ “Jepang: Cina Makin Meresahkan”, *op.cit.*, hlm. 8.

rise in importance and Cina will have overtaken the USA to lead the list of the world's top ten largest economies by GDP measured in PPP terms.”³⁰

Pergeseran kekuatan ekonomi global ke Asia Timur dengan kebangkitan ekonomi dan militer Cina tentu akan menjadi determinan penting dalam dinamika hubungan Indonesia–Cina di masa depan. Pada level geostrategis, Indonesia tentu sadar akan pentingnya untuk terus memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari kebangkitan Cina. Dengan mengacu pada kemajuan ekonomi Cina yang dibarengi dengan suatu realitas sebagai negara yang berpenduduk terbesar di dunia, sudah tentu hubungan dengan Cina “terlalu penting untuk diabaikan”.³¹ Indonesia harus jeli untuk memanfaatkan setiap peluang dalam perdagangan dan investasi dengan Cina, terlebih lagi kemudahan untuk melakukan hal tersebut telah dipayungi secara hukum melalui kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN-Cina dan antara Indonesia-Cina. Misalnya, dengan pertumbuhan ekonominya yang memukau, Cina tentu membutuhkan negara kaya sumber alam seperti Indonesia untuk mensuplai kebutuhan energinya, seperti minyak, gas alam, batu bara, mineral, kayu olahan, dan lain-lain untuk kelangsungan industrinya dalam jangka panjang. Hal yang tidak dapat diabaikan adalah kedekatan Indonesia dengan Cina sekarang ini, dengan kekuatan ekonomi dan politik yang dimilikinya secara potensial akan menjadi kekuatan negara adi daya baru, dapat dijadikan jalan tengah bila mengalami kebuntuan dengan kekuatan global, seperti AS. Kedekatan pemerintah RI pada Cina, dengan demikian tidak perlu diantagoniskan dengan AS,³² melainkan harus

³⁰ Aleksius Jemadu, “Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara”, *op.cit.*

³¹ Direktorat Jenderal Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri RI, “Hubungan Indonesia-RRT”, *op.cit.*

³² *Ibid.*

dimanfaatkan dalam politik luar negeri Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasional.

Sementara itu, Cina tampaknya juga menyadari pentingnya menjalin hubungan dengan Indonesia. Indonesia tidak hanya dipandang penting secara geopolitik dan strategis, tetapi juga baik untuk perdagangan maupun investasi. Ada upaya yang cukup agresif dari Cina untuk melakukan investasi di Indonesia, termasuk dalam industri pertambangan dan listrik untuk menjamin pasokan energi dari Indonesia. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah posisi geografis Indonesia yang sangat strategis, yaitu berada di lintas dua benua Asia–Australia serta dua samudara Hindia dan Pasifik menjadi vital bagi Cina yang menggunakan jalur pelayaran internasional tersebut untuk keperluan perdagangan dan jaminan pasokan energi. Selain itu, Indonesia juga dipandang Cina sebagai pangsa pasar yang amat potensial antara lain untuk berbagai produk pertanian, sepeda motor, tekstil, garmen, obat-obatan, dan juga produk industri pertahanannya.

Hubungan Indonesia-Cina yang didasarkan pada pilar hubungan saling membutuhkan (*interdependence*) di atas seharusnya menjadi dasar utama bangunan kerja sama kedua negara. Jakarta dan Beijing pada hakikatnya adalah dua negara yang saling membutuhkan dalam rangka saling mendukung upaya menjaga kelangsungan pembangunan jangka panjang mereka. Atas dasar pemahaman ini, Indonesia tidak seharusnya memiliki persepsi “*inferior*” ketika berhadapan dengan kekuatan pengaruh Cina yang semakin besar. Indonesia jelas memiliki posisi tawar yang dapat digunakan sebagai modalitas dan “*bargaining position*” dalam diplomasi dengan Cina. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan isu kekayaan sumber energi dalam negeri yang melimpah dalam diplomasi ekonomi dengan Cina, terutama mengingat Cina adalah negara yang dalam realitasnya sangat menggantungkan kebutuhan energinya dari pihak luar, termasuk dari Indonesia. Model diplomasi ekonomi demikian perlu dikedepankan agar negara tidak



dirugikan seperti yang terjadi dalam kasus suplai gas dari Tangguh. Kerugian yang ditanggung Indonesia dalam jangka waktu 25 tahun kontrak jual beli gas tersebut dengan Cina yang diperkirakan mencapai US\$ 4 juta per tahun menjadi alasan kuat untuk perlunya dilakukan renegotiasi harga jual gas tersebut. Pemerintah perlu melakukan penyelidikan kembali atas perjanjian kontrak penjualan gas Tangguh tersebut karena menurut Kurtubi, Direktur Pusat Kajian Ekonomi Minyak dan Energi, penetapan harga jual gas di bawah harga pasar jelas sebuah tindakan “*fraud*” dan bisa ditetapkan sebagai tindakan kejahatan.³³

Sekalipun ada benturan persoalan yang muncul melekat pada aspek perbedaan kepentingan nasional di dalam hubungan bilateral Indonesia-Cina, sejauh ini kedua negara telah berhasil membendung dan mengelolanya dengan baik. Ini terlihat selama era Reformasi, eskalasi konflik yang meluas tidak pernah muncul ke permukaan. Kedua negara kini tampak memiliki hubungan bilateral yang semakin kokoh baik di bidang kerja sama ekonomi maupun pertahanan. Kemampuan kedua negara dalam mengelola persoalan yang timbul dalam hubungan kedua negara tampaknya telah menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya hubungan yang hangat antara Jakarta-Beijing selama era Reformasi ini.

Terkait dengan hal di atas, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa arah perkembangan kedua negara di masa depan juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana kedua negara menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang muncul di antara mereka. Indonesia perlu mengantisipasi potensi masalah tersebut terutama dengan melihat kecenderungan Cina akhir-akhir ini yang memilih penggunaan kekuatan ekonominya sebagai “senjata” penekan bila ada persoalan yang muncul dalam interaksi hubungan dua negara. Kasus perseli-

³³ *The Jakarta Globe*, 1 September 2011.



sihan kedua negara terkait dengan isu keamanan makanan dan alat mainan anak-anak pada bulan Agustus 2007 bisa dijadikan ilustrasi. Pemerintah Indonesia ketika itu mengeluarkan peringatan akan bahaya makanan dan mainan impor dari Cina terhadap kesehatan. Pemerintah Cina dengan segera membalasnya dengan melarang impor makanan laut dari Indonesia.³⁴ Bila model penyelesaian masalah antara kedua negara akan selalu didasarkan pada pertimbangan “retaliation”, maka hubungan kedua negara di masa depan tidak dapat dielakkan akan kemungkinan selalu adanya gejolak dan guncangan. Untuk itu, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah antisipasi sehingga lebih siap bila di kemudian hari menghadapi aksi retaliasi dari Cina.

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh Indonesia haruslah didasarkan pada perhitungan yang cerdas dan bijaksana sehingga dapat dihindarkan akan kemungkinan merusak hubungan kedua negara. Dengan kondisi ekonomi dan militer Cina sekarang, sangat tidak menguntungkan jika Indonesia sampai merusak hubungan baik hanya karena kebijakan yang salah. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan luar negeri Indonesia yang telah sejak lama berpegang pada “One Cina Policy”. Kebijakan Satu Cina di dunia internasional adalah hal yang sangat vital dalam membina hubungan baik dengan negara tersebut. Hingga saat ini, Cina sangat sensitif akan adanya pandangan Taiwan sebagai negara berdaulat. Jika ada negara yang mengakui kedaulatan Taiwan sebagai “Cina” yang lain, Beijing sudah pasti akan berlaku sangat tidak bersahabat padanya. Sifat “keras” Cina terkait klaim wilayah kedaulatannya atas Taiwan tidak lain merupakan bentuk preventif untuk menjaga keutuhan wilayahnya akan kemungkinan adanya “domino effect” lepasnya beberapa wilayah kedaulatannya apabila Taiwan benar-benar diakui sebagai negara baru. Hal ini karena Cina sedang menghadapi potensi

³⁴ “Indonesia Seeks Explanation from Cina over Seafood Ban”, *Antara News*, <http://www.antara.co.id>, 27 Agustus 2007.

ancaman disintegrasi dengan adanya rongrongan tuntutan dari Tibet dan suku Uighur yang menginginkan untuk wilayah-wilayah baru lepas dari kekuasaan Cina.

Sementara itu, dalam konteks hubungan ekonomi, harus diakui bahwa bangkitnya ekonomi Cina tentu memberikan peluang yang tidak sedikit bagi Indonesia. Namun sejauh ini, peluang dagang dan investasi yang terbuka untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan Cina terutama setelah adanya ACFTA, tampak belum dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia. Indonesia yang kelihatan sangat siap ketika memperjuangkan perdagangan bebas dengan Cina di forum-forum perundingan, dalam tataran operasionalnya ketika kesepakatan itu berlaku pada bulan Januari 2010 ternyata mengalami “kedodoran”. Indonesia terbukti belum siap untuk berkompetisi dalam pasar bebas tersebut. Cermin kondisi ini terlihat antara lain dari angka defisit perdagangan yang semakin membengkak dengan Cina dan juga terjadinya silang pendapat beberapa waktu lalu antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sebagai pemangku kepentingan utama di dalam kerja sama ekonomi Indonesia-Cina dalam isu ekspor rotan olahan. Selain itu, angka pertumbuhan ekspor Indonesia ke Cina juga sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Singapura yang hanya memiliki penduduk sekitar 1,5 juta orang.³⁵ Untuk merespon peluang sekaligus kompetisi ekonomi ketat yang ditawarkan melalui ACFTA, di masa depan Indonesia perlu memiliki sebuah *grand design* yang memuat peta jalan untuk mengoptimalkan hubungan ekonomi dengan Cina. *Grand design* tersebut nantinya tidak hanya memuat hal yang terkait dengan faktor kelembagaan dan tahapan pencapaian, melainkan yang paling penting adalah pengaturan koordinasi,

³⁵ Aleksius Jemadu, “Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Kemampuan, dan Ekonomi di Asia Tenggara”, *op.cit.*



sinkronisasi, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan yang tampaknya sejauh ini belum cukup optimal.

E. PENUTUP

Hubungan bilateral Indonesia-Cina pada pasca-Orde Baru memperlihatkan wajah yang semakin hangat. Cermin kondisi ini terlihat dari kerja sama antara kedua negara yang mengalami peningkatan secara cukup signifikan. Cina yang mengalami kemajuan pesat di dalam pembangunan ekonomi dan pertahanan-keamanannya akan terus dimanfaatkan oleh Indonesia demi memenuhi kepentingan nasionalnya. Namun demikian, harus diakui bahwa hubungan yang semakin hangat di antara kedua negara juga masih dibayang-bayangi oleh sejumlah kendala yang berpotensi dapat mengganggu hubungan mereka di masa depan. Tidak saja faktor ketidaksiapan Indonesia secara internal di dalam menghadapi kompetisi yang terbuka di dalam perdagangan bebas ASEAN-Cina, tetapi juga adanya kekhawatiran di Indonesia atas faktor ketidakpastian di dalam kebijakan luar negeri Cina, terutama terhadap klaim tumpang tindih atas gugusan pulau di LCS, klaim kedaulatan atas Taiwan, dan persoalan konflik perbatasan dengan sejumlah negara di kawasan, seperti Jepang dan Korea Selatan.

Dengan kondisi ekonomi dan militer Cina yang sekarang, sangat tidak menguntungkan jika Indonesia sampai merusak hubungan baik hanya karena kebijakan yang salah. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Indonesia dalam posisi “inferior” dalam diplomasi dengan Cina. Posisi geostrategis dan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dimiliki Indonesia dapat digunakan bukan saja sebagai modalitas, melainkan juga untuk mempertajam diplomasi ekonominya agar Indonesia tidak dirugikan seperti yang terjadi dalam kasus suplai gas dari Tangguh. Posisi setara di dalam hubungan kedua negara mutlak diperlukan karena pada hakikatnya baik Indonesia maupun Cina adalah dua negara yang saling membutuhkan di dalam upaya mereka

menjaga kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Untuk lebih memperkuat posisi Indonesia di dalam hubungannya dengan Cina di masa depan, diplomasi Indonesia membutuhkan adanya ketersediaan *grand design* yang terpadu yang mendukung terciptanya basis kekuatan ekonomi dan politik internal yang solid dalam menghadapi kemunculan kekuatan ekonomi dan militer Cina yang tampak tidak terbendung.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Dewi dan Anugerah Perkasa, "Hubungan RI-Cina Harus Bebas Unsur Politik", *Bisnis Indonesia*, 6 Juli 2010.
- Bappenas, "Hubungan Ekonomi Indonesia-Cina Terus Meningkatkan", <http://www.bappenas.go.id/node/116/2468/hubungan-bilateral-indonesia---Cina-terus-meningkat-/>, 3 Desember 2009, diunduh pada 28 September 2011.
- Brown, Jessica "Jakarta's Juggling Act: Balancing China and America in the Asia Pacific", *Foreign Policy Analysis*, The Centre For Independent Studies, No. 5, 3 February 2011.
- Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri RI, "Hubungan Indonesia-RRT", *power point* disampaikan dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Kelompok Peneliti Indonesia-Cina P2P-LIPI, Jakarta, 4 Oktober 2011.
- Djafar, Zainuddin, *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur, Kajian Perspektif Asia Ekonomi-Politik*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2008.
- "Fear of The Dragon", *Far Eastern Economic Review*, 13 April 1995.
- Hadi, Syamsul, *Merangkul Cina: Hubungan Indonesia-Cina pasca Soeharto*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Higgins, Andrew, "Some in Indonesia Praise, Seek To Replicate China's Fight Against United States," *The Washington Post*, 29 March 2010.
- "Indonesia Seeks Explanation from China over Seafood Ban", *Antara News*, <http://www.antara.co.id>, 27 Agustus 2007.
- Jemadu, Aleksius "Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan dan Ekonomi di Asia Tenggara", *power point* disampaikan dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Kelompok Peneliti Indonesia-Cina P2P-LIPI, Jakarta, 4 Oktober 2011.
- "Jepang: Cina Makin Meresahkan", *Kompas*, 3 Agustus 2011.

- 
- 
- 
- Mingjiang, Li, "The Origins Of China's Proactive Regional Strategy", lihat di laporan Konferensi *Dynamic Interactions Between Regional States and China*, yang diselenggarakan The S. Rajaratnam School Of International Studies (RSIS), Singapore, 8–9 Maret 2007.
- Onishi, Norimitsu, "Indonesia Is Courted by Obama and China," *The New York Times*, 9 November 2010.
- Pertiwi, Anita, "Pergeseran Kepimpinan Jepang ke Cina di Asia: Studi Ekonomi Politik Internasional (Periode 2002–2005)", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Sukma, Rizal "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort Amid Uncertainties." dalam *The Rise of China: Responses from Southeast Asia and Japan*, NIDS Joint Research Series No. 4, National Institute for Defence Studies, Tokyo, 2009.
- , *Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship*, Routledge, London, 1999.
- , 'Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement,' *Asian Survey*, Vol. 49, No. 4, August 2009.
- The Jakarta Post*, 31 May 2011.
- The Jakarta Globe*, 1 September 2011.
- Wuryandari, Ganewati (Ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- 
- 





BIODATA PENULIS

ADRIANA ELISABETH

Adalah peneliteti di Pusat Penelitetian Politik-LIPI dengan bidang keahlian pada pembangunan regional Asia Tenggara, khususnya studi kerja sama subregional ekonomi di ASEAN. Menyelesaikan pendidikan S1 bidang Hubungan Internasional di FISIP Universitas Jayabaya tahun 1987 dan gelar *Master of Social Sciences in International Relations* dari University of Tazmania pada 1995, dan pada 2008 memperoleh gelar Ph.D. dari *Department of History and Politics*, University of Wolongong. Sejak 1995 telah aktif terlibat dalam penelitetian ASEAN.

GANEWATI WURYANDARI

Saat ini tercatat sebagai peneliteti di Pusat Penelitetian Politik (P2P) LIPI. Mendapatkan gelar Dra. dari Fisipol UGM tahun 1987, M.A. dalam bidang International Relations di Department of Politics, Monash University tahun 1994, dan Ph.D. Discipline of Asian Studies-the University of Western Australia tahun 2006. Fokus kajiannya adalah: Asia-Pasifik, Australia-Indonesia, Timor Leste, perbatasan, politik luar negeri Indonesia, dan isu-isu kontemporer dalam hubungan internasional. Beberapa karya/buku terakhir yang telah dihasilkan antara lain: *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Politik Domestik* (2008, Pustaka Pelajar, editor), *Isu Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Permasalahan dan Solusi Pemecahannya* (2009, Pustaka Pelajar, editor), *Politik Luar Negeri Indonesia di*



Tengah Arus Perubahan Politik Internasional (2011, Pustaka Pelajar, editor), dan “East Timor’s Membership In ASEAN: Prospects And Challenges” (2011, ASEAN Outlook, Taiwan).

NANTO SRIYANTO

Merupakan salah satu penelitel bidang perkembangan politik internasional-Pusat Penelitelian Politik (P2P) LIPI. Ketertarikan utamanya adalah mengenai perkembangan keamanan internasional, khususnya isu keamanan nontradisional dan politik luar negeri. Selama hampir sepuluh tahun bergabung di P2P LIPI dan telah melakukan penelitelian yang tercakup dalam bidang tersebut, seperti keamanan energi, isu lingkungan sebagai bagian dari keamanan nontradisional, serta persoalan politik luar negeri Indonesia. Persoalan hubungan Indonesia-Cina terkait dengan dinamika keamanan kawasan yang menjadi bagian dari ketertarikannya dengan isu hegemoni internasional.

LIDYA CHRISTIN SINAGA

Menamatkan pendidikan S1 dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2005 dengan judul skripsi “Politik Reformasi Perusahaan Negara di Cina Pasca 1978”. Sejak 2006 hingga saat ini menjadi salah satu penelitel di bidang perkembangan politik internasional, Pusat Penelitelian Politik-LIPI. Saat ini tergabung dalam Tim Penelitelian ASEAN P2P-LIPI (2008–sekarang) dan Tim Penelitelian Kebencanaan (2011–sekarang).

RATNA SHOFI INAYATI

Adalah penelitel bidang perkembangan politik internasional Pusat Penelitelian Politik-LIPI dengan fokus kajian Asia Tenggara dan Politik Luar Negeri Indonesia. Gelar Master ia peroleh dari Southeastern



University Washington D.C. Amerika Serikat dengan bidang studi *Internasional Management*. Spesialisasinya adalah dinamika kerja sama ASEAN dan peran Indonesia pada tataran regional, internasional, dan global. Juga melakukan kajian tentang Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN Sebuah Potret Kerjasama, Dinamika Geo Politik Ekonomi Wilayah Pesisir Selat Makassar, dan Kajian Perbandingan Pemilu di Malaysia.

TRI NUKE PUDJIASTUTI

adalah peneliteti di Pusat Penelitetian Politik–Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Pada tahun 2000 memperoleh gelar MA (Master of Arts) di Universitas Adelaide–Australia Selatan dengan fokus migrasi internasional, yang ditekuninya hingga sekarang. Saat ini tergabung dalam kelompok penelitetian ASEAN P2P-LIPI (2008–sekarang) dan kelompok kajian hubungan Indonesia-Taiwan (2011–sekarang).



Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara

Hubungan Indonesia-Cina pada dasarnya telah berlangsung sejak lama dan mengalami pasang surut hubungan selama lebih dari enam dekade. Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Asia Pasifik merupakan kawasan penting dan strategis bagi kepentingan nasional Indonesia, baik secara politik, pertahanan, keamanan, maupun ekonomi. Perkembangan politik apapun yang terjadi di kawasan ini akan membawa dampak langsung dan tidak langsung terhadap kepentingan Indonesia.

Menguatnya pengaruh Cina dalam konstelasi global dan regional tentu juga berdampak secara langsung bagi Indonesia. Selain itu, menguatnya peran Cina harus dipandang sebagai peluang yang perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan nasional Indonesia.

Buku ini mengulas secara komprehensif hubungan Indonesia-Cina baik di bidang politik, pertahanan keamanan, maupun ekonomi. Peluang dan Tantangan dalam hubungan Indonesia-Cina juga menjadi fokus buku ini, dengan mengangkat studi kasus pada sektor jasa dan tenaga kerja serta analisis prospek hubungan Indonesia-Cina



Buku Obor

Distributor:

Yayasan Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10 Jakarta 10230
Telp. (021) 319 26978, 392 0114
Faks. (021) 319 24488
yayasan_obor@cbn.net.id

LIPI Press

